



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun di daerah, perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wajo tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil rencana tata ruang di daerah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional dan rencana tata ruang provinsi.

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pad ayat (1) memuat rumusan visi Wajo Daerah perniagaan yang maju dengan pertanian modern yang mandiri dan berkelanjutan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan misi:
 - a. kolaborasi untuk transformasi sosial;
 - b. kolaborasi untuk transformasi ekonomi;
 - c. kolaborasi untuk transformasi tata kelola;
 - d. kolaborasi untuk keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 - e. kolaborasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. kolaborasi untuk pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas daerah;
 - g. kolaborasi untuk penyediaan sarana dan parsarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. kolaborasi untuk kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 5

- (1) RPJPD dapat diubah dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 27 Oktober 2024
Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 27 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.07.115.24

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjangka panjang, tentu harus dilakukan dengan memprediksi masalah dan tantangan ke depan yang berkenaan dengan pengaruh dinamika perubahan sehingga dapat menjadi peluang strategis dalam pembangunan daerah. RPJPD harus konkrit mengimplementasikan sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sinergi dan berkelanjutan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan/dinamika lingkungan strategis yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 164

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJPD merupakan kewajiban bagi setiap daerah otonom di Indonesia. RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan tahapan jangka panjang pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek daerah (RKPD). RPJPD ini memuat data dan informasi aktual pencapaian pembangunan daerah selama tahapan jangka panjang sebelumnya beserta dengan permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi daerah hingga saat ini dan menjadi fokus perhatian untuk diselesaikan dan diatasi dalam pembangunan jangka panjang berikutnya. Memuat visi dan misi jangka panjang pembangunan daerah dengan sejumlah tujuan dan sasaran beserta dengan indikator yang akan dicapai dalam tahapan pembangunan jangka panjang berikutnya. Menggambarkan *road map* (peta jalan) untuk mencapainya melalui rumusan misi, arah pembangunan/kebijakan beserta sasaran pokok dan indikator kinerja utama pembangunan daerah dalam dua puluh tahun yang akan datang. Artinya, RPJPD ini akan menjadi arahan dan pedoman multipihak dalam dua puluh tahun kedepan bagi setiap stakeholder pembangunan daerah, baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maupun oleh pelaku bisnis serta masyarakat umum pelaku dan pemangku pembangunan daerah lainnya.

Kabupaten Wajo merupakan daerah otonom yang menjadi salah satu pilar strategis pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga memiliki kewajiban yang sama dalam penyusunan RPJPD untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045 ini. RPJPD ini memedomani RPJPN Indonesia dan RPJPD Provinsi Sulsel 2025-2045, baik secara teknis struktural maupun secara substansial pembangunan nasional dan daerah. RPJPD Kabupaten Wajo periode 2025-

2045 ini merupakan penjabaran dan secara konsisten menjaga keselarasan dengan RPJPN Indonesia dan RPJPD Provinsi Sulsel periode yang sama. Meskipun berkewajiban memedomani dan menjaga konsistensi RPJPN & RPJPD Sulsel, RPJPD Kabupaten Wajo harus tetap mampu menjaga dan menonjolkan kekhasan dan karakteristik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Konsistensi diperlukan untuk memastikan bahwa karakteristik sumberdaya pembangunan daerah Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulsel sejalan dengan *road map* pembangunan nasional dalam menjalankan transformasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Kabupaten Wajo menjadi salah satu bagian penting dari transformasi pembangunan Provinsi Sulsel dan Nasional Indonesia dalam jangka panjang 2025-2045. Kabupaten Wajo mengambil peran penting dalam transformasi pembangunan sosial, transformasi pembangunan ekonomi dan transformasi tata kelola menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Terwujudnya Indonesia yang setara dengan dengan negara maju dan menjadi kekuatan lima besar ekonomi dunia, saat memasuki seabad Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang akan datang.

Transformasi pembangunan nasional dan daerah yang akan dijalankan dalam pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang akan datang, difokuskan pada delapan misi pembangunan nasional dan daerah. Transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola dengan didukung oleh dua landasan transformasi dan tiga kerangka implementasi transformasi. Komitmen transformasi pembangunan ini, secara konsisten harus tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, baik dalam dokumen jangka panjang maupun dalam dokumen jangka menengah dan jangka pendek daerah, serta pada dokumen jangka menengah dan pendek sektoral, berdasarkan urusan pemerintah dan pemerintah daerah.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu bagian penting dari sejarah demokrasi moderen dalam sistem pemerintahan global dan nasional. Berkarakteristik agraris sebagai sumberdaya pembangunan utama bagi daerah dan masyarakatnya. Karakteristik pembangunan dengan topografi wilayah yang paling lengkap di Sulsel, dataran tinggi, dataran rendah dan bahkan bercirikan perairan laut dan danau yang merupakan potensi sumberdaya pembangunan daerah yang sangat besar untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat bila mampu dikelola dan ditangani secara baik.

Selain itu, Kabupaten Wajo juga sangat dikenal sebagai daerah otonom dengan potensi SDM yang memiliki jiwa entrepreneurship sehingga pada daerah ini juga melekat sebutan sebagai daerah niaga yang potensial.

RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mengambil peran penting dan strategis, berkontribusi dalam menjabarkan dan memperkuat transformasi pembangunan nasional dan daerah sebagaimana karakteristik dan potensi dasar pembangunan yang dimilikinya. Penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan perpaduan antara *bottom-up* dan *top down planning*. Disusun berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017. Secara spesifik, penyusunan RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 ini dilakukan dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan melalui penyusunan rancangan awal, konsultasi publik rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, perumusan rancangan akhir, reviu APIP terhadap rancangan akhir, penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD, pembahasan Ranperda, evaluasi Ranperda, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum

RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 ini dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);

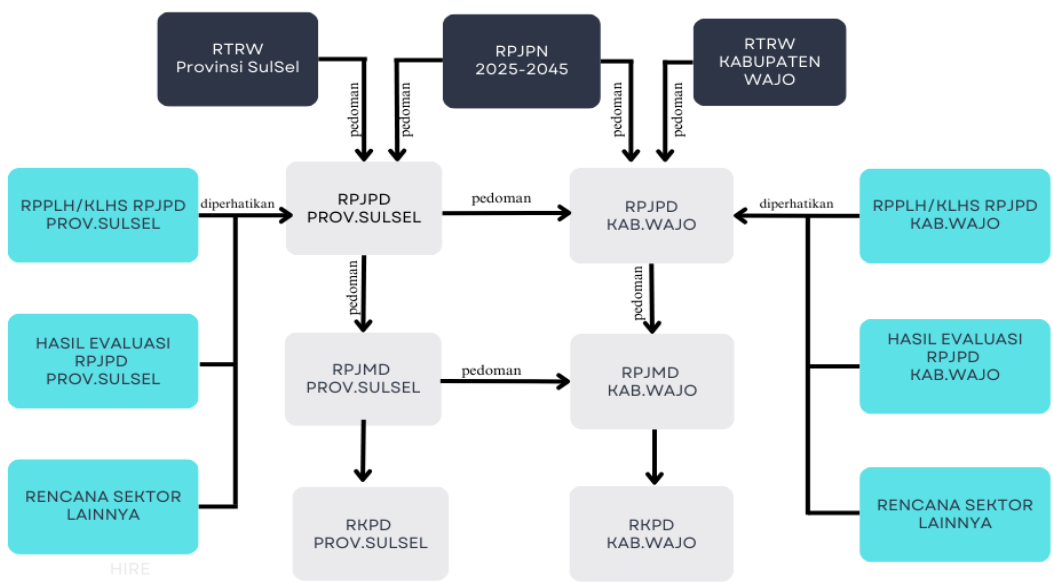
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 154);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan pembangunan yang dijalankan, mulai dari tahapan jangka panjang hingga tahapan jangka menengah dan tahunan. Begitupun secara hirarkial berdasarkan level pemerintahan dan bidang urusan. Mulai dari level pemerintah, hingga pada tingkatan pemerintah daerah otonom provinsi/kabupaten/kota termasuk penjabarannya ke bidang urusan bahkan hingga desa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diamanatkan untuk menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 merupakan

perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Proses penyusunannya dilakukan secara teknokratik, berdasarkan arahan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Wajo. Sementara itu, bagi unit pemerintahan yang lebih rendah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengembangkan perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya secara hirarkial dan berdasarkan tahapan/periode perencanaan yang dimaksud.



Gambar 1.1

Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 selaras dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Kabupaten Wajo. RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wajo selama 20 tahun berdasarkan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode yang sama. Menyusun desain perencanaan pembangunan daerah jangka panjang berdasarkan permasalahan yang dihadapi, mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mendesain koordinasi dan sinergitas antarpelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wajo. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Sulsel.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045 ini, sebagai berikut:

- Menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan kebijakan pembangunan serta program bagi calon kepala daerah pada setiap pemilihan kepala daerah dan penyusunan RPJMD kepala daerah terpilih Kabupaten Wajo selama periode 2025-2045.
- Memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka menengah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wajo pada setiap periode kepemimpinan daerah selama tahun 2025-2045.
- Menetapkan prioritas setiap tahapan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wajo selama periode 2025-2045.
- Menjadi rujukan dan arahan kebijakan bagi multipihak dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik secara personal dan kelompok serta kewilayahan maupun kolaborasi strategis dalam lingkup Kabupaten Wajo selama periode 2025-2045.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna mendukung maksud dan tujuan secara terstruktur RPJPD ini disusun secara sistematis berikut ini.

Bab Satu, berupa Bab Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RPJPD.

Bab Dua, berupa Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi daerah yang mendeskripsikan berbagai aspek terkait dengan geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025, serta tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab Tiga, berupa Bab Permasalahan dan Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan pembangunan jangka panjang daerah dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang dihadapi Kabupaten Wajo ke depan.

Bab Empat, berupa Bab Visi dan Misi Daerah, memuat visi dan sasaran visi daerah tahun 2025-2045, serta misi yang menggambarkan bentuk intervensi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.

Bab Lima, berupa Bab Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, memuat secara singkat mengenai arah kebijakan pembangunan per lima tahun serta sasaran pokok dan arah pembangunan.

Bab Enam, berupa Bab Penutup, memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

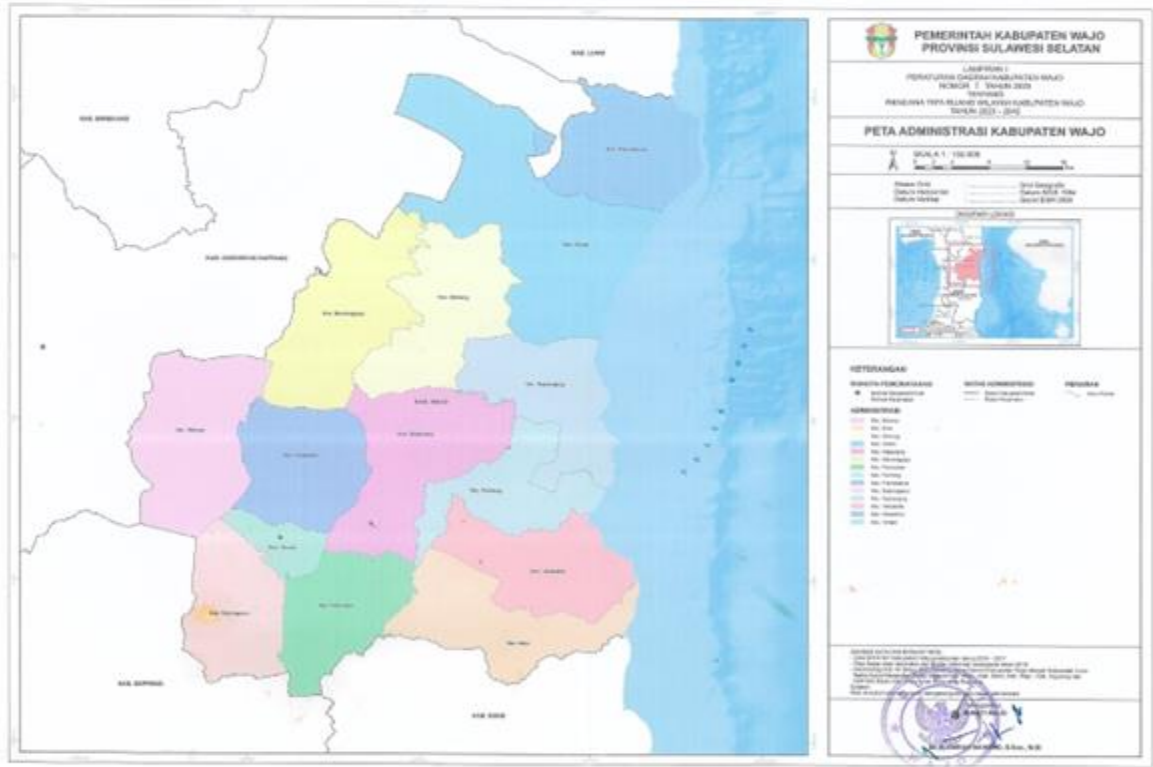
Kabupaten Wajo berada di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibukota Sengkang yang berjarak sekitar 200 hingga 242 km dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai Kabupaten Wajo, terdapat tiga jalur yang bisa ditempuh, yaitu melalui Camba (Kabupaten Maros), Bulu Dua (Kabupaten Soppeng), dan melalui Kota Parepare.

Kabupaten Wajo secara astronomis berada di antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53' - 120° 27' BT. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di utara, Teluk Bone di timur, Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di selatan, serta Kabupaten Sidenreng Rappang di barat.

Luas Kabupaten Wajo mencapai 260.872 hektare, atau sekitar 4,17% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geostrategis, bagian selatan Kabupaten Wajo menjadi jalur transportasi antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Wilayah ini juga berfungsi sebagai daerah transit dengan akses ke beberapa daerah strategis, seperti Kabupaten Sidrap, Luwu, Toraja, dan Kota Parepare. Posisi yang strategis ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Wajo dalam mendukung mobilitas barang, jasa, dan orang.

Wilayah administratif Kabupaten Wajo terdiri atas 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 142 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Keera seluas 37.412 Ha atau sekitar 14,34% dari luas Kabupaten Wajo, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Tempe dengan luas wilayah 4.692 Ha atau sekitar 1,80% dari luas wilayah Kabupaten Wajo.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Berdasarkan jumlah desa/kelurahan, maka Kecamatan Pitumpanua merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 27 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Maniangepajo merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit, yaitu 8 desa/kelurahan. Pembagian administrasi wilayah Kabupaten Wajo secara lengkap termuat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Belawa	22.752	8,72%	6	3	9
2	Bola	17.864	6,85%	10	1	11
3	Gilireng	19.668	7,54%	8	1	9
4	Keera	37.412	14,34%	9	1	10
5	Majauleng	22.206	8,51%	14	4	18
6	Maniangepajo	22.652	8,68%	5	3	8
7	Pammana	15.444	5,92%	14	2	16
8	Penrang	13.839	5,30%	9	1	10
9	Pitumpanua	18.022	6,91%	23	4	27
10	Sabbangparu	15.338	5,88%	12	3	15
11	Sajoanging	17.375	6,66%	6	3	9
12	Takkalalla	16.743	6,42%	11	2	13

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
13	Tanasitolo	16.865	6,46%	15	4	19
14	Tempe	4.692	1,80%	0	16	16
Jumlah		260.872	100%	142	48	190

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Diolah)

Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut, termasuk dalam kategori wilayah dataran rendah. Daerah ini memiliki tiga karakter lahan yang meliputi perbukitan, dataran rendah, serta laut dan danau, yang diilustrasikan dalam ungkapan Bugis, *mangkalungu ri bulue, massulappe ri pottanangnge, mattoddang ri tasie/tapparenge*. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Wajo memiliki 3 (tiga) dimensi lahan. Dimensi lahan yang pertama adalah tanah berbukit yang berjejer dari selatan ke utara, mulai dari Kecamatan Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, hingga Pitumpanua sebagai dataran tinggi. Kecamatan-kecamatan ini merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente, serta peternakan. Dimensi lahan kedua, yaitu tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat. Sedangkan dimensi lahan yang ketiga adalah keberadaan Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang di sepanjang pesisir Teluk Bone di sebelah timur. Keduanya merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak. Gambaran mengenai kondisi topografi Kabupaten Wajo diuraikan berdasarkan ketinggian, kemiringan, dan jenis tanah.

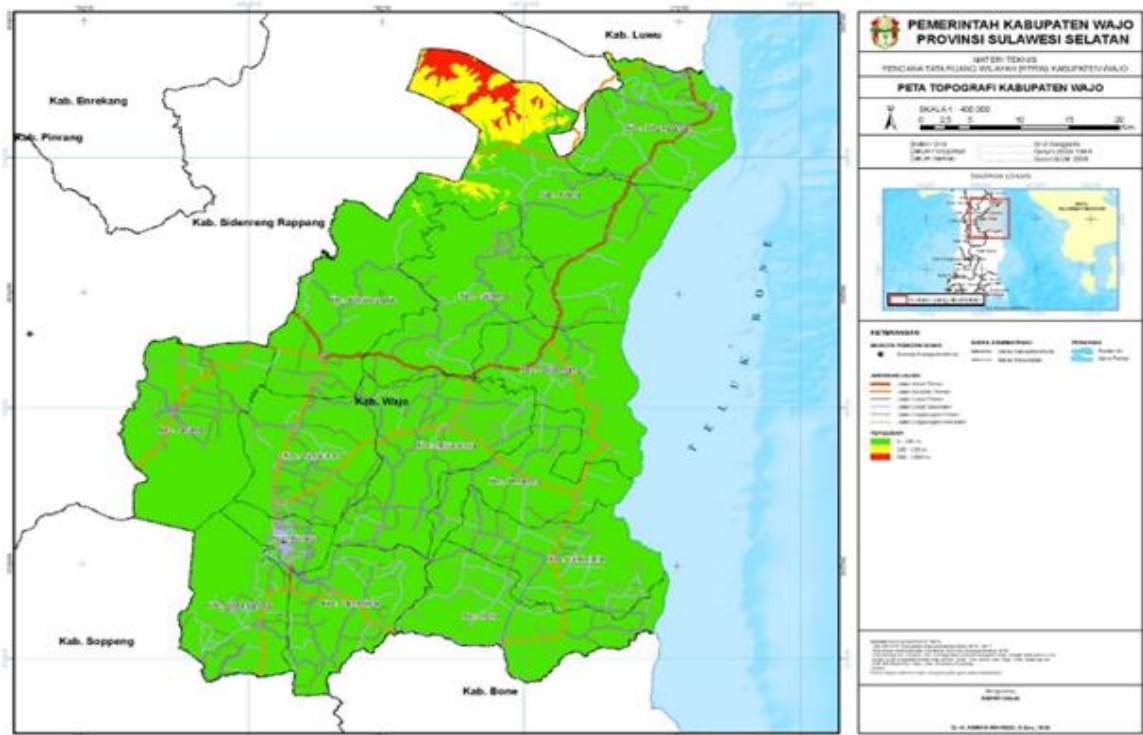
A. Ketinggian Wilayah

Ketinggian wilayah dari permukaan laut atau elevasi merupakan faktor pembatas alam terhadap pengusahaan tanaman di daerah beriklim tropis. Begitu pula pengaruh pembatas ketinggian akan banyak tampak pada temperatur atau suhu yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pertumbuhan. Secara morfologis Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl). Dalam menyusun penggolongan wilayah tanah usaha, ketinggian wilayah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, yaitu:

1. Ketinggian wilayah antara 0-7 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam kelompok tanah usaha terbatas.

- 2. Ketinggian wilayah antara 7-25 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha Ia dan Ib.
- 3. Ketinggian wilayah antara 25-100 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam wilayah tanah usaha utama Ic.
- 4. Ketinggian wilayah antara 100-500 meter di atas permukaan laut, dikelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha utama Id.

Gambar 2. 2
Peta Topografi (Ketinggian Wilayah)
Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Sebagian besar wilayah Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, mencakup 209.876,85 hektare atau 84,13% dari luas kabupaten. Wilayah dengan ketinggian di atas 100 meter mencakup 11.511,11 hektare atau 4,61% dari luas kabupaten. Informasi mengenai sebaran ketinggian dan luas wilayah di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Ketinggian

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Sabbangparu	100 sampai 500 m	14,75	0,12%
		25 sampai 100 m	2.616,66	21,06%
		7 sampai 25 m	8.759,39	70,51%
		Rawa	1.031,25	8,30%
Luas Kecamatan Sabangparu			12.422,05	100,00%

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen (%)
2	Tempe	100 sampai 500 m	4,20	0,10%
		25 sampai 100 m	1.656,60	38,82%
		7 sampai 25 m	1.646,15	38,58%
		Danau	543,68	12,74%
		Rawa	416,74	9,77%
Luas Kecamatan Tempe			4.267,37	100,00%
3	Pammana	100 sampai 500 m	22,92	0,15%
		25 sampai 100 m	5.811,29	38,77%
		7 sampai 25 m	7.593,49	50,65%
		Danau	212,80	1,42%
		Rawa	1.350,56	9,01%
Luas Kecamatan Pammana			14.991,06	100,00%
4	Bola	25 sampai 100 m	4.290,87	24,23%
		7 sampai 25 m	8.975,95	50,68%
		0 sampai 7 m	1.026,73	5,80%
		Rawa	3.418,27	19,30%
Luas Kecamatan Bola			17.711,82	100,00%
5	Takkalalla	25 sampai 100 m	5.314,23	31,65%
		7 sampai 25 m	6.925,98	41,25%
		0 sampai 7 m	4.549,11	27,10%
Luas Kecamatan Takkalalla			16.789,32	100,00%
6	Sajoanging	25 sampai 100 m	3.294,17	19,03%
		7 sampai 25 m	5.603,08	32,36%
		0 sampai 7 m	8.417,31	48,61%
Luas Kecamatan Sajoanging			17.314,56	100,00%
7	Majauleng	100 sampai 500 m	396,92	1,80%
		25 sampai 100 m	13.926,50	63,13%
		7 sampai 25 m	6.809,87	30,87%
		0 sampai 7 m	71,39	0,32%
		Danau	31,85	0,14%
		Rawa	822,40	3,73%
Luas Kecamatan Majauleng			22.058,93	100,00%
8	Tanasitolo	100 sampai 500 m	343,06	2,26%
		25 sampai 100 m	10.414,03	68,46%
		7 sampai 25 m	2.598,88	17,08%
		Danau	349,61	2,30%
		Rawa	1.506,75	9,90%
Luas Kecamatan Tanasitolo			15.212,33	100,00%
9	Belawa	25 sampai 100 m	1.465,83	9,04%
		7 sampai 25 m	10.857,81	66,98%
		Danau	456,66	2,82%

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen (%)
		Rawa	3.429,42	21,16%
Luas Kecamatan Belawa			16.209,72	100,00%
10	Maniangpajo	100 sampai 500 m	1.788,01	10,41%
		25 sampai 100 m	13.731,92	79,98%
		7 sampai 25 m	1.261,46	7,35%
		Rawa	387,38	2,26%
Luas Kecamatan Maniangpajo			17.168,77	100,00%
11	Keera	> 500 m	96,92	0,34%
		100 sampai 500 m	5.405,88	18,74%
		25 sampai 100 m	9.293,56	32%
		7 sampai 25 m	7.618,70	26,41%
		0 sampai 7 m	6.432,98	22,30%
Luas Kecamatan Keera			28.848,04	100,00%
12	Pitumpanua	100 sampai 500 m	454,98	2,48%
		25 sampai 100 m	4.577,14	24,95%
		7 sampai 25 m	7.792,98	42,48%
		0 sampai 7 m	5.518,40	30,08%
Luas Kecamatan Pitumpanua			18.343,50	100,00%
13	Penrang	25 sampai 100 m	7.917,44	57,79%
		7 sampai 25 m	4.329,61	31,60%
		0 sampai 7 m	1.378,03	10,06%
		Rawa	75,49	0,55%
Luas Kecamatan Penrang			13.700,57	100,00%
14	Gilireng	100 sampai 500 m	2.983,47	14,64%
		25 sampai 100 m	16.210,20	79,53%
		7 sampai 25 m	1.189,11	5,83%
Luas Kecamatan Gilireng			20.382,78	100,00%
15	Danau Tempe	Danau	6.822,73	48,54%
		Danau1 1 meter	1.261,88	8,98%
		Danau2 2 meter	3.672,14	26,12%
		Danau2 2 meter	2.199,52	15,65%
		Danau2 7 meter	100,67	0,72%
Luas Danau Tempe			14.056,94	100,00%

Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Diolah)

B. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan faktor fisik dalam perencanaan pembukaan suatu wilayah dan berpengaruh langsung pada usaha dan kegiatan penduduk. Dalam menyusun tingkat kemampuan dan kesesuaian tanah, kemiringan lereng dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu:

1. Wilayah datar, yaitu wilayah yang berlereng antara 0 - 2%.
2. Wilayah landai, yaitu wilayah yang berlereng antara 2 - 15%.
3. Wilayah agak curam, yaitu wilayah yang berlereng antara 15 - 40%.
4. Wilayah curam, yaitu wilayah yang berlereng lebih dari 40%.

Penyebaran luas wilayah menurut kelas kemiringan lereng di setiap kecamatan Kabupaten Wajo disajikan pada Tabel 2.3, yang menunjukkan bahwa proporsi wilayah datar sebesar 74,46% dari luas wilayah Kabupaten Wajo. Kelas kemiringan ini merupakan wilayah terluas untuk masing-masing kecamatan jika dibandingkan dengan kemiringan lereng yang lainnya. Adapun wilayah curam sebagian besar berada di Kecamatan Keera dengan luas 2.113,91 hektar atau 7,33% terhadap luas kecamatan.

Tabel 2. 3
Luas Wilayah Menurut Kemiringan Lereng di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
1	Sabbangparu	0-2%	9.677,68	77,91%
		2-15%	1.418,98	11,42%
		15-40%	293,99	2,37%
		Rawa	1.031,25	8,30%
Luas Kecamatan Sabangparu			12.421,90	100,00%
2	Tempe	0-2%	2.266,50	53,11%
		2-15%	901,38	21,12%
		15-40%	139,07	3,26%
		Danau	543,68	12,74%
		Rawa	416,74	9,77%
Luas Kecamatan Tempe			4.267,37	100,00%
3	Pammana	0-2%	11.942,52	79,66%
		2-15%	1.217,95	8,12%
		15-40%	267,40	1,78%
		Danau	212,80	1,42%
		Rawa	1.350,56	9,01%
Luas Kecamatan Pammana			14.991,23	100,00%
4	Bola	0-2%	14.060,21	79,38%
		2-15%	233,39	1,32%
		Rawa	3.418,27	19,30%
Luas Kecamatan Bola			17.711,87	100,00%
5	Takkalalla	0-2%	16.728,31	99,64%
		2-15%	60,94	0,36%
Luas Kecamatan Takkalalla			16.789,25	100,00%
6	Sajoanging	0-2%	16.377,62	94,59%

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
		2-15%	936,91	5,41%
Luas Kecamatan Sajoanging			17.314,53	100,00%
7	Majauleng	0-2%	19.311,90	87,63%
		2-15%	1.316,96	5,98%
		15-40%	555,92	2,52%
		Danau	31,85	0,14%
		Rawa	822,40	3,73%
Luas Kecamatan Majauleng			22.039,03	100,00%
8	Tanasitolo	0-2%	8.242,47	54,15%
		2-15%	4.466,21	29,34%
		15-40%	627,55	4,12%
		Danau	349,61	2,30%
		Rawa	1.536,50	10,09%
Luas Kecamatan Tanasitolo			15.222,34	100,00%
9	Belawa	0-2%	12.323,64	76,03%
		Danau	456,66	2,82%
		Rawa	3.429,42	21,16%
Luas Kecamatan Belawa			16.209,72	100,00%
10	Maniangpajo	0-2%	13.392,81	78,00%
		2-15%	1.738,83	10,13%
		15-40%	1.580,82	9,21%
		> 40%	70,83	0,41%
10	Maniangpajo	Rawa	387,38	2,26%
Luas Kecamatan Maniangpajo			17.170,67	100,00%
11	Keera	0-2%	20.030,98	69,44%
		2-15%	2.052,10	7,11%
		15-40%	4.651,11	16,12%
		> 40%	2.113,91	7,33%
Luas Kecamatan Keera			28.848,10	100,00%
12	Pitumpanua	0-2%	16.963,02	91,97%
		2-15%	638,83	3,46%
		15-40%	575,40	3,12%
		> 40%	266,33	1,44%
Luas Kecamatan Pitumpanua			18.443,58	100,00%
13	Penrang	0-2%	13.625,08	99,45%
		Rawa	75,49	0,55%
Luas Kecamatan Penrang			13.700,57	100,00%
14	Gilireng	0-2%	10.897,22	53,46%
		2-15%	5.115,28	25,10%
		15-40%	4.323,04	21,21%
		> 40%	47,09	0,23%

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
Luas Kecamatan Gilireng			20.382,63	100,00%
15	Danau Tempe	Danau	14.056,94	100,00%
Luas Danau Tempe			14.056,94	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

C. Jenis Tanah

Jenis tanah merupakan aspek yang dapat menentukan potensi peruntukan suatu lahan, karena jenis tanah menentukan jenis tanaman apa saja yang sesuai dengan jenis tanah tersebut. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wajo antara lain aluvial, latosol, podsolik dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut mengenai sebaran geologi berikut ini.

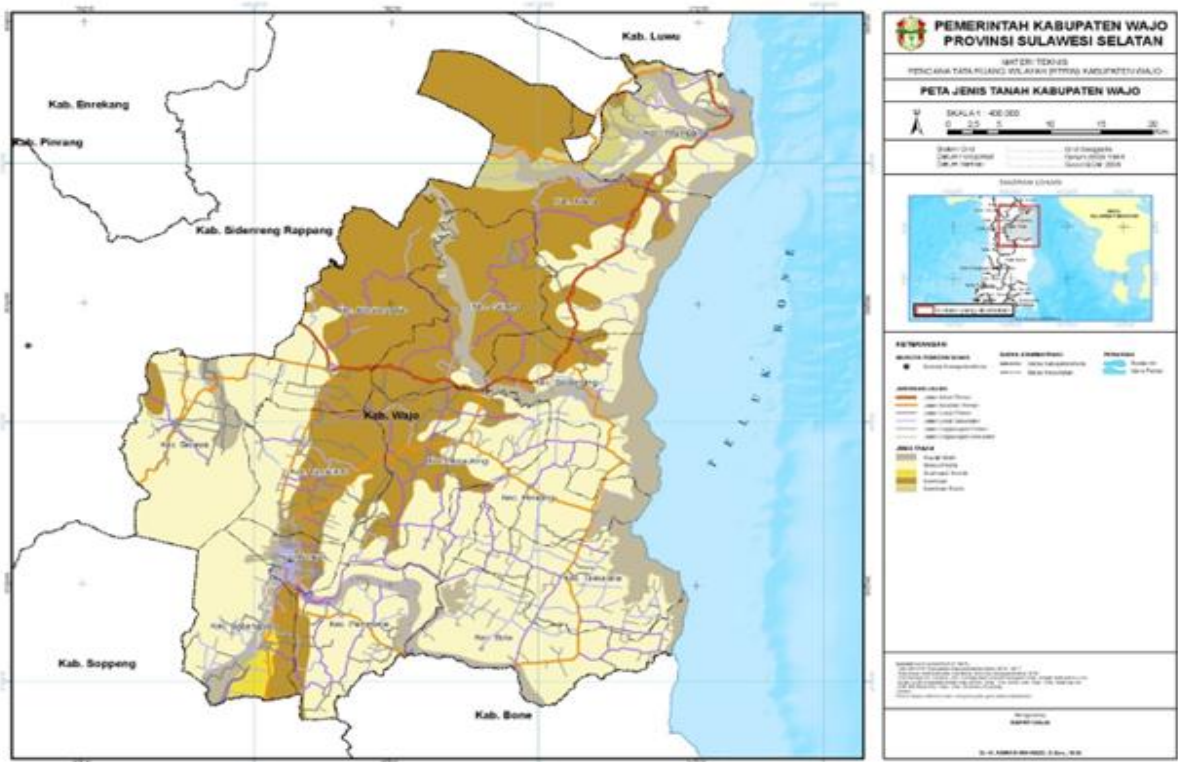
Tabel 2. 4
Jenis Tanah di Kabupaten Wajo

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Typic Fluvaquents	18.695,75
2	Fluvaquentic Endoaquepts	14.232,07
3	Typic Endoaquepts	70.265,86
4	Typic Hapluderts	1.749,57
5	Typic Endoaquepts	19.497,81
6	Typic Endoaquepts	11.943,62
7	Typic Endoaquepts	13.993,05
8	Typic Eutrudepts	4.418,35
9	Typic Eutrudepts	1.471,18
10	Typic Dystrudepts	51.616,35
11	Typic Dystrudepts	18.302,48
12	Typic Dystrudepts	3.235,32
13	Typic Dystrudepts	1.984,07
14	Lain-Lain	19.296,50
15	Lain-Lain	658,70
Total		251.360,68

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Berdasarkan Tabel 2.4, sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Wajo adalah jenis *Typic Endoaquepts* seluas 70.265,86 Ha atau sebesar 27,95%. Ciri khas tanah jenis tersebut umumnya memiliki horison permukaan yang kaya bahan organik dan bersaturasi air serta mampu mengakumulasi bahan lepas atau liat yang terbawa oleh air. Umumnya tanah jenis *Endoaquepts* bersifat lembab dan cenderung memiliki kesuburan yang baik karena kaya akan kandungan bahan organik di horison permukaan.

Gambar 2. 3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

D. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Wajo diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi serta tinjauan stratigrafi dan struktur geologi. Tinjauan morfologi menguraikan tentang bentuk dan evolusi permukaan wilayah, sedangkan tinjauan stratigrafi dan struktur geologi menguraikan tentang lapisan batuan yang berada di bawah lapisan bumi.

Secara geomorfologis, wilayah Kabupaten Wajo dibedakan menjadi 5 (lima) satuan morfologi sebagai berikut:

1. Satuan dataran, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut antara 0-7 m dan terdapat hampir di seluruh wilayah yang membentang dari utara ke selatan dengan luasan mencapai 57,263 Ha atau sekitar 22,85%. Dominasi jenis batuan di wilayah dataran ini adalah jenis *alluvium* yang merupakan batuan hasil dari proses endapan tanah permukaan. Dalam klasifikasi sistem terbentuknya batuan tergolong jenis batuan termuda.
2. Satuan dataran bergelombang, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 8-25 m, terdapat di sekitar danau, rawa dan tepian sungai dengan luasan mencapai 94.539 Ha atau sekitar

37,72%. Jenis batuan di wilayah dataran bergelombang tersebut yaitu batuan lempung biru kehitaman, kenyal, pejal, keras serta merekah jika dalam keadaan kering, agak labil karena terdapat antiklin. Oleh karena itu perlu ada penguatan apabila akan dibangun pondasi bangunan gedung.

3. Satuan wilayah bergelombang hingga berbukit, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 25-100 m. Satuan wilayah ini terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Wajo yang luasnya 87.419 Ha atau sekitar 33,68%. Di wilayah ini ada beberapa jenis batuan diantaranya batuan lempung, lanau, pasir, kerikil dan sedikit batu gamping.
4. Satuan wilayah berbukit hingga bergunung, dengan ketinggian 100-500 m, terdapat di bagian utara dan sebagian kecil terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Wajo yang luasnya hanya 11.231 Ha atau sekitar 4,50%. Jenis batuan berstruktur konglomerasi batu pasir *glaukonit* dengan serpih *kaquina* dan *moluska*.
5. Satuan wilayah bergunung, dengan ketinggian di atas permukaan laut mencapai lebih dari 500 m, terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Wajo tepatnya di Kecamatan Pitumpanua yang memiliki luas sangat terbatas yaitu 167 Ha atau hanya sekitar 0,70 %. Jenis batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan pasir vulkanik.

Kondisi wilayah Kabupaten Wajo akan menentukan struktur batuan yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Peta Geologi Indonesia, Kabupaten Wajo mempunyai 3 (tiga) struktur batuan yaitu:

1. Daerah berstruktur batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik. Struktur batuan ini terdapat di bagian utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gunung Rantekombola dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah dengan struktur batuan Napal dan batu Gamping terdapat di daerah bawah yang berstruktur batuan aliran lava atau tepatnya berada di Kecamatan Pitumpanua.

- 2. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir Glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang mempunyai ketebalan 100-500 m. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di wilayah Kabupaten Wajo, dan mempunyai luasan paling besar.
- 3. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi air laut dan tersebar di sepanjang pantai juga yang berasal dari endapan air sungai/danau yang mempunyai ketinggian kurang dari 25 meter di atas permukaan laut.

Adapun penjelasan mengenai sebaran kondisi geologi Kabupaten Wajo dapat dilihat dalam Tabel 2.5 dan Gambar 2. 4

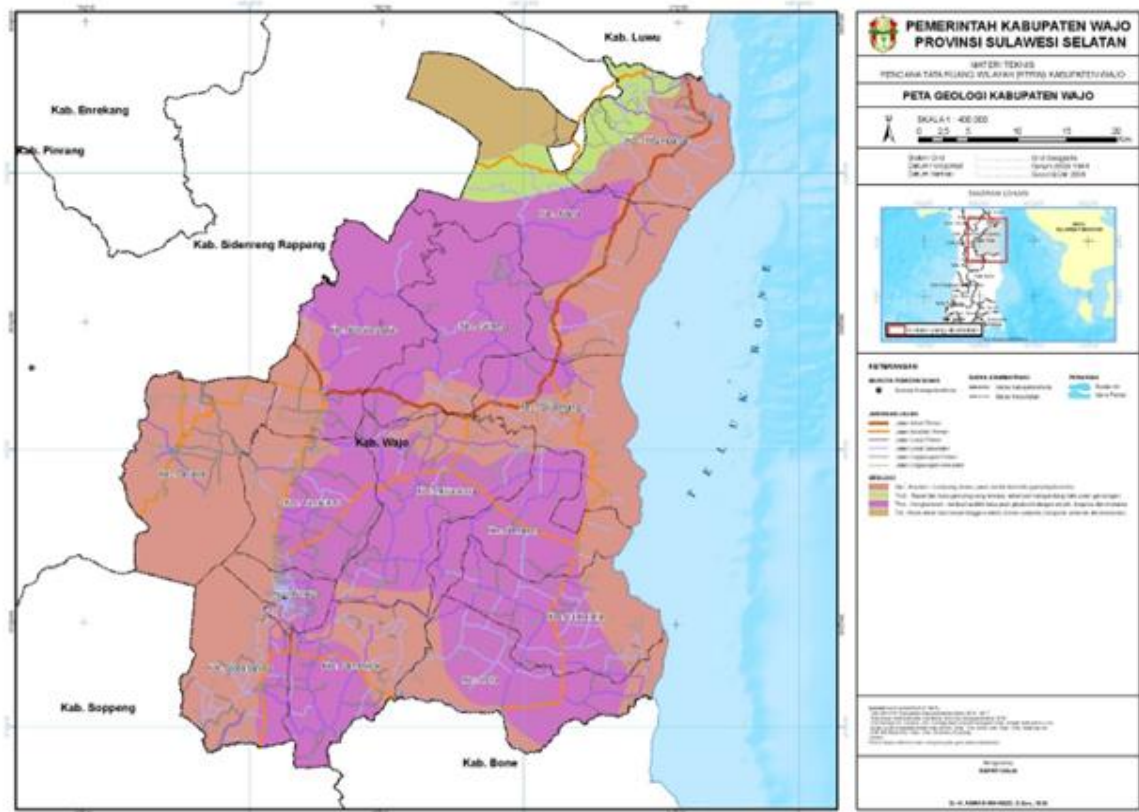
Gambar 2. 4
Kondisi Geologi Kabupaten Wajo

No	Uraian	Ketinggian	Lokasi	Luasan	Persentase	Jenis Batuan
Geomorfologi						
1	Satuan dataran	antara 0 -7 mdpl	hampir diseluruh wilayah yang membentang dari Utara ke Selatan	57.263 Ha	22,85%	alluvium
2	Satuan Dataran Bergelombang	antara 8 - 25 mdpl	disekitar danau, rawa dan tepian sungai	94.539 Ha	7,72%	batuan lempung biru kehitaman, kenyal, pejal, keras serta merekah jika dalam keadaan kering, agak labil karena terdapat antiklin
3	Satuan Wilayah Bergelombang hingga Berbukit	antara 25 - 100 mdpl	dibagian tengah wilayah Kabupaten Wajo	87.419 Ha	33,68 %.	batuan lempung, lanau, pasir, kerikil dan sedikit batu gamping
4	Satuan Wilayah Berbukit hingga Bergunung	ketinggian 100 - 500 mdpl	dibagian Utara dan sebagian kecil terdapat di bagian Tengah wilayah Kabupaten Wajo	11.231 Ha	4,50 %.	batuan berstruktur konglomerasi batu pasir galukonit dengan serpih Kaquina dan moluska

No	Uraian	Ketinggian	Lokasi	Luasan	Persentase	Jenis Batuan
5	Satuan Wilayah Bergunung	lebih dari 500 mdpl	Dibagian Utara tepatnya di Kecamatan Pitumpanua	167 Ha	0,70 %	batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan pasir vulkanik
Struktur Batuan						
1	Daerah berstruktur batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik	ketinggian 500 mdpl	bagian Utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gn. Rante Kambola			
2	Daerah berstruktur batuan Napal dan batu Gamping	di daerah bawah yang berstruktur batuan lairan lava	Kecamatan Pitumpanua.			
3	Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir Glaukonit dengan, serpih kaquina dan moluska	100 - 500 mdpl	bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo			
4	Daerah Alluvial yang berasal selain dari hasil sedimertasi air laut	kurang dari 25 mdpl	tersebar disepanjang pantai juga yang berasal dari endapan air sungai/danau			

Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Diolah)

Gambar 2. 5
Peta Kondisi Geologi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

E. Iklim

Iklim merupakan unsur lingkungan yang penting dalam memahami potensi suatu daerah, terutama dalam mendukung pengelolaan kawasan sesuai kebutuhan air, baik untuk pertumbuhan tanaman maupun keperluan rumah tangga. Unsur iklim utama meliputi curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Curah hujan dan rata-rata hujan bulanan sering digunakan untuk menilai erosivitas hujan dan klasifikasi iklim, sedangkan suhu dan kelembaban udara digunakan dalam pemilihan jenis tanaman. Studi tentang iklim dalam sektor pertanian dikenal sebagai agroklimatologi.

Berdasarkan metode Oldeman, penentuan tipe iklim sangat dipengaruhi oleh banyaknya bulan basah dan bulan kering. Kriteria bulan basah ditandai dengan banyaknya curah hujan lebih dari 200 mm/bulan dan terjadi pada jumlah bulan secara berturut-turut/berurutan. Sedangkan kriteria bulan kering dapat ditandai pada jumlah bulan secara berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 100 mm/bulan. Keragaman curah hujan menjadi dasar dalam mengelompokkan tipe iklim di sebuah wilayah, termasuk di Kabupaten Wajo.

Menurut peta zona agroklimatologi skala 1:750.000 yang dibuat oleh Balai Informasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Wajo mempunyai tipe iklim C1, D1, D2, E2 dan E3 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Zona Iklim C1 yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut adalah bagian timur laut Kabupaten Wajo meliputi sebagian Kecamatan Pitumpanua yang terletak di pinggir Teluk Bone.
- b. Zona Iklim D1, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah 3-4 bulan dan jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut adalah wilayah bagian Timur Kabupaten Wajo meliputi bagian Kecamatan Takkalalla, Sajoanging, Majauleng, Pitumpanua dan Kecamatan Maniangpajo.
- c. Zona Iklim D2, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah 3-4 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Wajo yang membujur arah utara selatan meliputi Kecamatan Majauleng, Maniangpajo dan Kecamatan Pammana.
- d. Zona Iklim E2, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah kurang dari 3 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Wilayah yang termasuk dalam zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian barat Kabupaten Wajo atau sebagian dari Kecamatan Belawa, Tanasitolo, Tempe dan Kecamatan Sabbangparu.
- e. Zona Iklim E3, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah kurang dari 3 bulan dan jumlah bulan kering 3-5 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut hanya sebagian kecil wilayah pada bagian barat Kabupaten Wajo yang terletak di sebelah utara dan selatan Danau Tempe atau sebagian dari wilayah Kecamatan Belawa dan Kecamatan Sabbangparu.

Kabupaten Wajo, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis dengan suhu berkisar 27°C hingga 30°C. Iklim tersebut ditandai dengan adanya bulan kering/musim hujan dan bulan basah/musim kemarau. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa zona iklim Kabupaten Wajo sebagian besar masuk dalam zona iklim D1 yaitu tipe iklim 3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering. Luas wilayah yang masuk dalam zona iklim D1 mencapai 85.119,58 hektar atau 34,12% meliputi Kecamatan Bola, Gilireng, Keera, Majauleng, Maniangpajo, Penrang, Pitumpanua, Sajoanging dan Takkalalla. Sedangkan

zona iklim terkecil adalah zona iklim E3 dengan luas 18.747,71 hektar atau 7,51% terhadap luas kabupaten.

Tabel 2. 5
Luas Wilayah Tipe Iklim Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Klimatologi	Tipe	Luas (Ha)	(%)
1	Sabbangparu	Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	11.473,18	92,36%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	948,92	7,64%
Luas Kecamatan Sabangparu				12.422,10	100,00%
2	Tempe	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	60,35	1,41%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	4.173,78	97,81%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	33,17	0,78%
Luas Kecamatan Tempe				4.267,30	100,00%
3	Pammana	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	8.877,35	59,22%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	6.113,71	40,78%
Luas Kecamatan Pammana				14.991,06	100,00%
4	Bola	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	7.804,43	44,06%
		3-bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	9.907,43	55,94%
Luas Kecamatan Bola				17.711,86	100,00%
5	Takkalalla	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	2.937,27	17,49%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	13.852,01	82,51%
Luas Kecamatan Takkalalla				16.789,28	100,00%

No	Kecamatan	Klimatologi	Tipe	Luas (Ha)	(%)
6	Sajoanging	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	702,40	4,06%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	16.612,17	95,94%
Luas Kecamatan Sajoanging				17.314,57	100,00%
7	Majauleng	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	19.737,83	89,48%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	2.288,84	10,38%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	32,32	0,15%
Luas Kecamatan Majauleng				22.058,99	100,00%
8	Tanasitolo	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	3.887,32	25,55%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	11.035,05	72,54%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	290,08	1,91%
Luas Kecamatan Tanasitolo				15.212,45	100,00%
9	Belawa	Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	11.788,50	72,73%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	4.421,15	27,27%
Luas Kecamatan Belawa				16.209,65	100,00%
10	Maniangpajo	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	13.572,20	79,05%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	414,34	2,41%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	3.182,17	18,53%

No	Kecamatan	Klimatologi	Tipe	Luas (Ha)	(%)
Luas Kecamatan Maniangpajo				17.168,71	100,00%
11	Keera	3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	22.739,78	78,83%
		5-6 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	C1	6.108,23	21,17%
Luas Kecamatan Keera				28.848,01	100,00%
12	Pitumpanua	3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	520,72	2,84%
		5-6 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	C1	17.822,88	97,16%
Luas Kecamatan Pitumpanua				18.343,60	100,00%
13	Penrang	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	3.728,00	27,21%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	9.972,55	72,79%
Luas Kecamatan Penrang				13.700,55	100,00%
14	Gilireng	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	11.571,07	56,77%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	8.811,64	43,23%
Luas Kecamatan Gilireng				20.382,71	100,00%
15	Danau Tempe	Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	1.002,64	7,13%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	13.054,31	92,87%
Luas Danau Tempe				14.056,95	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Setiap tahun, musim hujan berlangsung relatif lebih singkat yang rata-rata berlangsung pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Akan tetapi di bagian utara yaitu di Kecamatan Pitumpanua terdapat musim hujan yang

serupa dengan musim hujan di Kabupaten Luwu. Adapun kondisi pada bulan-bulan selanjutnya adalah lembab.

Musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Antara bulan November sampai dengan Bulan Maret terdapat curah hujan yang cukup tinggi akibat pengaruh musim hujan di bagian selatan Sulawesi Selatan. Curah hujan untuk 3 (tiga) tahun terakhir mencapai rata.rata 1.510 mm dan 128 hari hujan. Rincian mengenai curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel. 2.6.

Tabel 2. 6
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Stasiun di Kabupaten Wajo Tahun 2022

Bulan	Stasiun Ongkoe/Menge		Stasiun Tingara Posi	
	Curah Hujan (mm ²)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)	Hari Hujan
Januari	110	7	36	5
Februari	180	7	20	0
Maret	182	6	7	1
April	278	12	32	4
Mei	391	14	124	15
Juni	545	13	73	8
Juli	160	7	29	4
Agustus	15	1	0	0
September	62	3	0	0
Oktober	11	1	0	0
November	162	11	3	1
Desember	50	3	7	2

Sumber: BPS. 2023 (Diolah)

F. Keadaan Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh tipe iklim dan kondisi geologi wilayahnya. Hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai di Kabupaten Wajo, yang umumnya memiliki debit sedang hingga kecil. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah ini merupakan daerah tadah hujan dengan sistem sungai yang baik, aliran langsung ke laut, batuan dengan kelulusan sedang, serta curah hujan yang mendukung

Analisis hidrologi memberikan gambaran mengenai distribusi ketersediaan air tanah dan air permukaan di Kabupaten Wajo. Ketersediaan air ini sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang terserap di permukaan maupun di bawah permukaan tanah. Berdasarkan peta potensi air tanah yang dibuat oleh Dinas Pengairan Provinsi Sulawesi Selatan, ketersediaan air baku di Kabupaten Wajo tersebar dalam berbagai akuifer, yaitu:

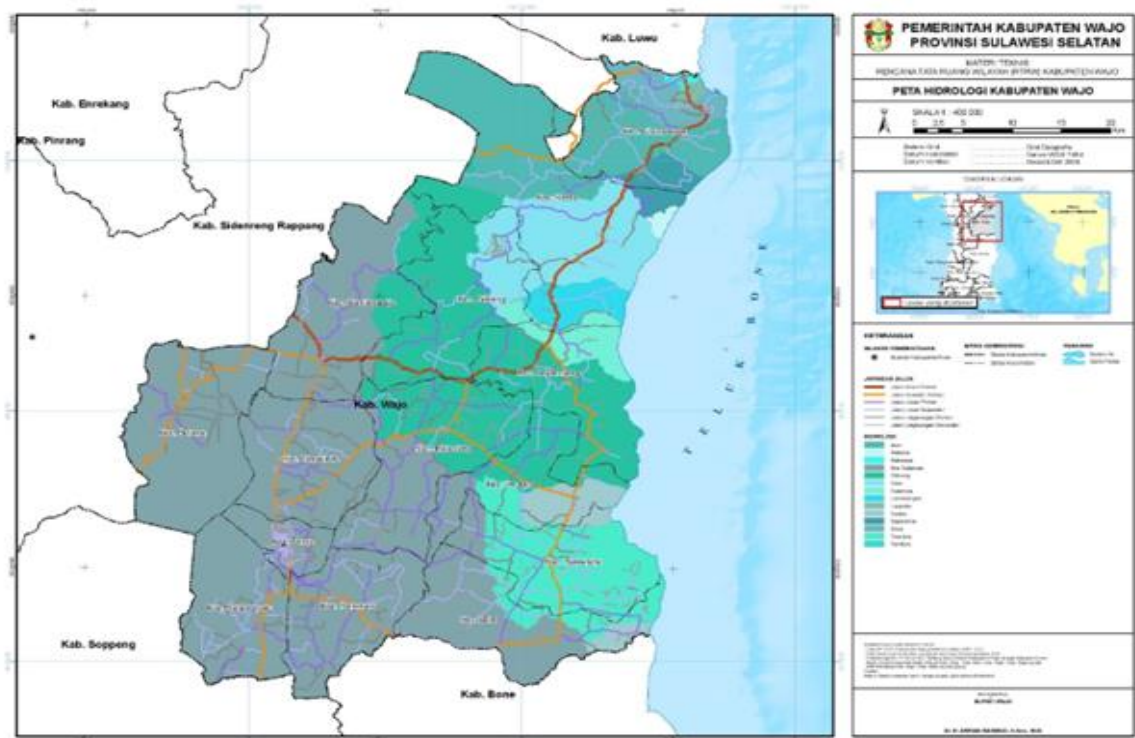
1. Wilayah endapan aluvial sungai dan pantai, sehingga muka air tanah dangkal di berbagai tempat tersusupi air laut. Kedalaman akuifernya kurang dari 15 meter dan cocok untuk pengembangan sumur gali dengan perkiraan debit hanya kurang dari 1 liter/detik.
2. Wilayah dataran endapan aluvial sungai dan pantai hasil gunung api formasi Camba dan formasi Walanae. Kedalaman akuifer 15-30 meter dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dangkal dengan menggunakan mesin pompa kecil atau pompa tangan, dengan perkiraan debit kurang dari 1 liter/detik.
3. Wilayah dataran endapan aluvial dan *endapan hash* gunung api formasi Camba dengan lapisan akuifer cukup dalam antara 1-3 meter lapisan akuifer. Kedalaman akuifer antara 25-150 meter *dart* dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dalam dengan menggunakan mesin pompa jenis rotary, dengan perkiraan debit antara 0,5-3 liter/detik.
4. Wilayah dataran aluvial sungai dan danau yaitu merupakan wilayah cekungan artesis pada formasi Walanae. Kedalaman akuifer antara 80-110 meter dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dalam dengan cara pemboran menggunakan mesin pompa jenis rotary. Perkiraan debit dapat mencapai lebih dari 3 liter/detik.
5. Wilayah dataran aluvial sungai dan danau yang merupakan wilayah cekungan artesis, endapan lapisan akuifernya cukup tua dan sebagai bagian dari formasi Walanae. Kedalaman akuifer antara 60-150 meter dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dalam dengan cara pemboran menggunakan mesin pompa jenis rotary. Perkiraan debit mencapai antara 3-5 liter/detik.
6. Daerah endapan batu gamping sebagai anggota Taccipi dari formasi Walanae dan formasi Tonasa yang merupakan wilayah air tanah daerah karst. Sistem pemanfaatannya bisa diambil dari mata air dan aliran

sungai bawah tanah dengan perkiraan debit cukup bervariasi/tidak menentu.

- 7. Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan air tanah atau biasa disebut sebagai *catchment area*. Sistem pemanfaatannya dapat diambil dari air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gravitasi, perkiraan debit tidak menentu.

Dalam upaya untuk memelihara keseimbangan ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Wajo, maka perlu mencermati sirkulasi air yang masuk (dalam bentuk curah hujan) dan jumlah air yang keluar melalui cara evapotranspirasi, pengisian air tanah (*groundwater recharge*) dan jumlah air yang mengalir sebagai *run off (surface and subsurface)*.

Gambar 2. 6
Peta Hidrologi Kabupaten Wajo

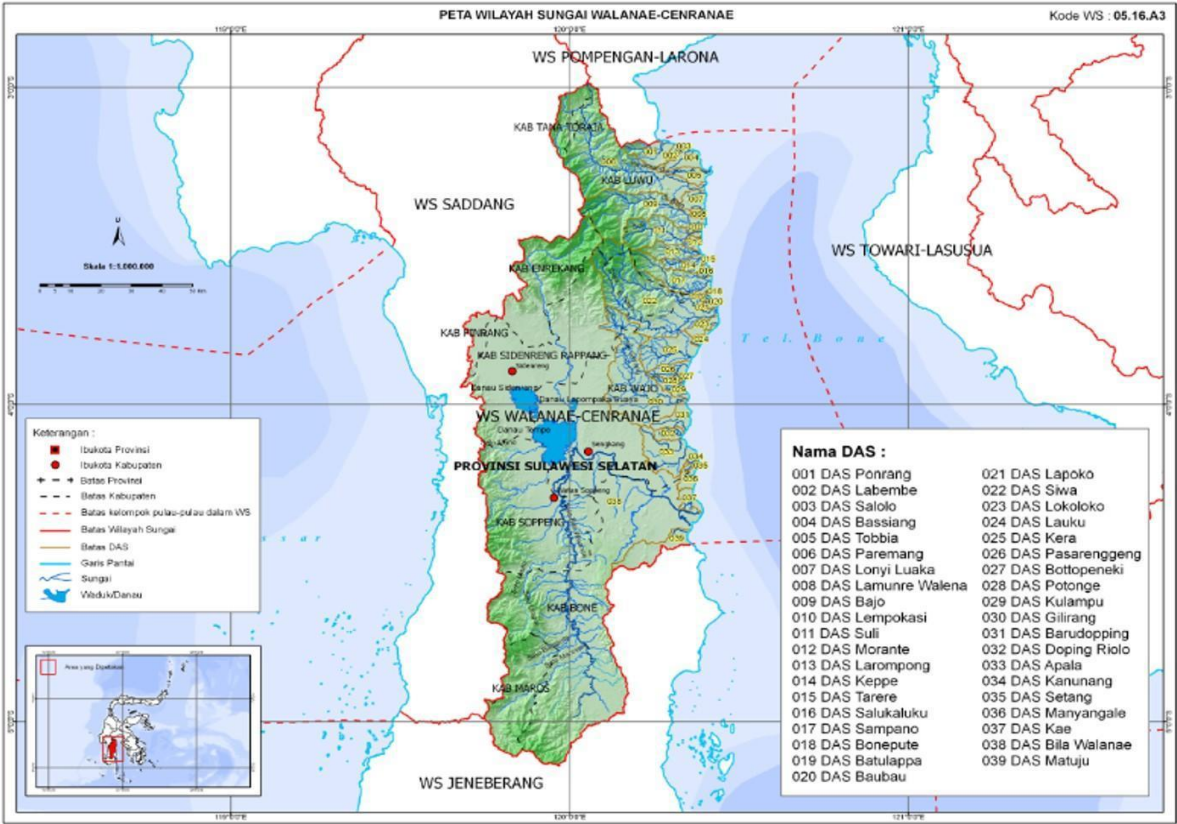


Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

G. Potensi Sumber Daya Air

Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Wajo merupakan bagian dari Wilayah Sungai Walanae-Cenranae yang terletak di 9 (Sembilan) Kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros.

Gambar 2. 7
Peta Wilayah Sungai Walannae Cenranae



Sumber : BBWS Pompengan Jeneberang. *Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walannae-Cenranae Tahun 2018*

Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo merupakan wilayah dengan luas terbesar dalam kawasan Wilayah Sungai Walannae-Cenranae, masing-masing mencakup 22,94% dan 21,37% dari total luas Wilayah Sungai Walannae-Cenranae. Hal ini menunjukkan peran penting kedua kabupaten ini dalam sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Untuk lebih memahami cakupan wilayah dan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sungai Walannae-Cenranae, dapat dilihat pada Peta Administrasi dan pembagian DAS yang ditampilkan pada Gambar 2.7.

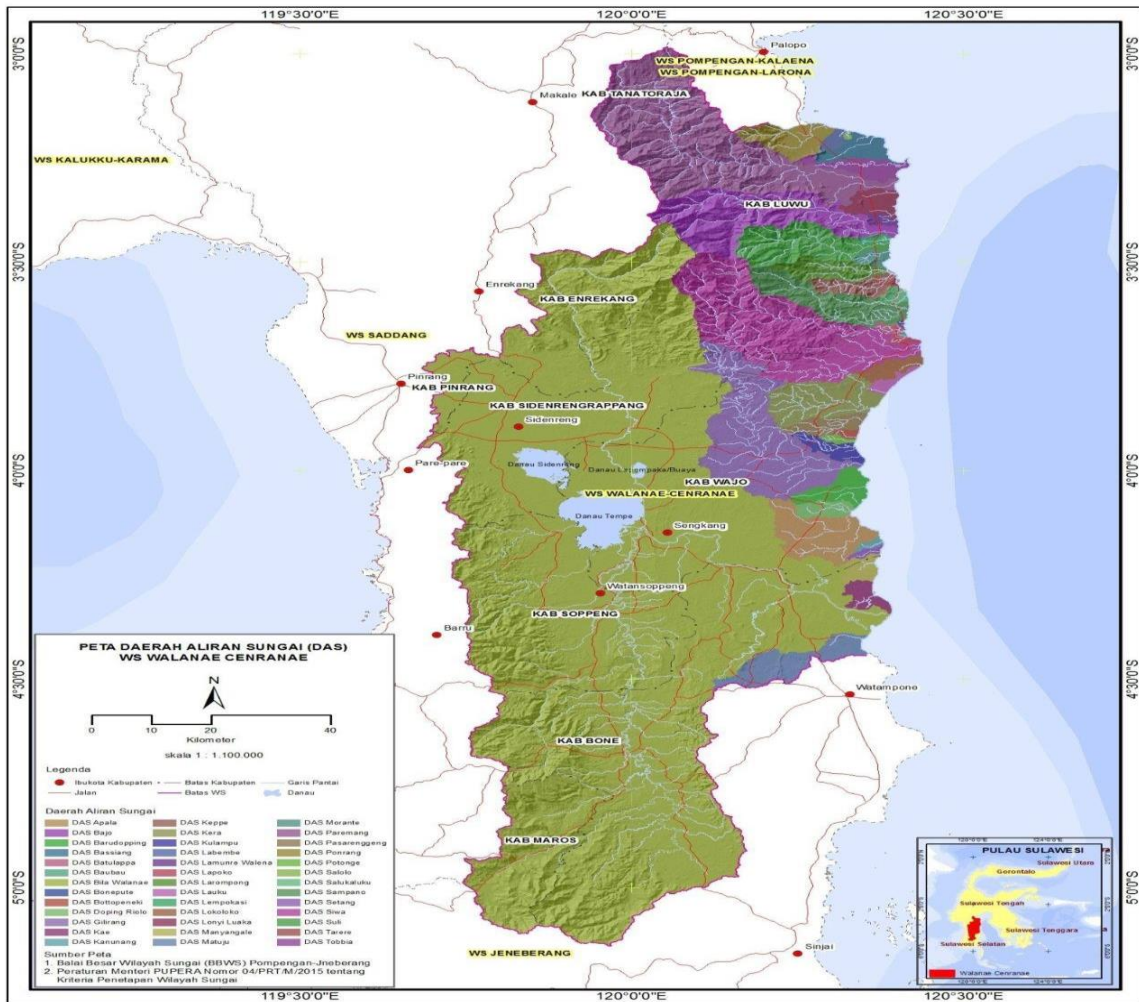
Tabel 2. 7
Sebaran Kabupaten dalam Wilayah Sungai Walanae-Cenranae

No	Kabupaten/Kota	Luas Total Kabupaten (km ²)	Luas Dalam Wilayah Sungai (km ²)	Prosentase terhadap Luas Total Kabupaten (%)	Prosentase terhadap luas Wilayah Sungai Walanae - Cenranae (%)
1	Kabupaten Bone	4559,00	2.735,73	60,01	22,94
2	Kabupaten Enrekang	1.786,01	701,01	39,25	5,88
3	Kabupaten Luwu	3.000,25	1.980,48	66,01	16,61
4	Kabupaten Maros	1.619,12	618,45	31,79	4,32
5	Kabupaten Pinrang	1.961,17	103,74	5,29	0,87
6	Kabupaten Sidenreng Rappang	1.883,25	1.854,29	98,46	15,55
7	Kabupaten Soppeng	1.359,44	1.319,13	97,03	11,06
8	Kabupaten Tana Toraja	2.054,3	166,19	8,09	1,39
9	Kabupaten Wajo	2.506,2	2.548,38	101,68	21,37
	Wilayah Sungai Walanae- Cenranae	20.728,74	11.923,66	43,97	100,00

Sumber: BBWS Pompengan Jeneberang. *Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Walanae-Cenranae ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Wilayah ini mencakup 39 Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan DAS terbesar adalah DAS Bila Walanae, yang memiliki luas 7.777,00 km². Sungai Bila, yang bagian hilirnya berada di Kabupaten Wajo, berhulu di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. Selain Sungai Bila, beberapa sungai lain seperti Sungai Siwa, Sungai Gilireng, Sungai Awo, dan Sungai Walanae juga melintasi wilayah ini, memberikan kontribusi penting terhadap sistem hidrologi Kabupaten Wajo. Pembagian DAS Wilayah Sungai Walanae-Cenranae dapat dilihat secara ilustratif pada gambar 2.8.

Gambar 2. 8
Gambar Peta Pembagian DAS Wilayah Sungai Walanae-
Cenranae



Sumber :BBWS Pompengan Jeneberang; Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018

Wilayah Kabupaten Wajo sendiri terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang beragam, baik besar maupun kecil. Sebagian aliran sungai-sungai ini sepenuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Wajo, sementara sebagian lainnya melintasi batas-batas kabupaten. Di Kabupaten Wajo terdapat 18 DAS, yang terdiri dari satu DAS lintas kabupaten, yaitu DAS Bila Walanae, dan 17 DAS lainnya yang sepenuhnya berada di dalam wilayah Kabupaten Wajo.

Dengan demikian, keberadaan DAS lintas kabupaten dan DAS lokal di Kabupaten Wajo tidak hanya mempengaruhi kondisi hidrologi daerah ini, tetapi juga memerlukan koordinasi pengelolaan lintas wilayah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di seluruh Wilayah Sungai Walanae-Cenranae. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan DAS yang terpadu dan sesuai dengan kriteria nasional untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi tantangan hidrologi yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2. 8
Sebaran DAS di Kabupaten Wajo pada Wilayah Sungai Walanae Cenranae

No.	Nama DAS	Luas (Km ²)	Kabupaten
1	Bonepute	2,10	Wajo
2	Batulappa	10,73	Wajo
3	Baubau	1,22	Wajo
4	Lapoko	9,40	Wajo
5	Lokoloko	39,41	Wajo
6	Lauku	18,58	Wajo
7	Kera	173,93	Wajo
8	Pasarenggeng	50,86	Wajo
9	Bottopeneki	9,69	Wajo
10	Potonge	8,40	Wajo
11	Kulampu	42,22	Wajo
12	Gilirang	513,57	Wajo
13	Barudopping	71,10	Wajo
14	Doping Riolo	37,65	Wajo
15	Apala	179,09	Wajo
16	Kanunang	9,08	Wajo
17	Setang	9,89	Wajo
18	Bila Walanae	1.361,46	Wajo

Sumber :BBWS Pompengan Jeneberang. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018 (Diolah)

Potensi hidrologi daerah aliran sungai ditunjukkan melalui rencana daerah irigasi dengan potensi luas 30.182 m2, di mana pengelolaannya terbagi atas 3 (tiga) kewenangan dan tanggung jawab. Pertama, kewenangan Pemerintah Pusat terhadap daerah irigasi Awo dan Kalola Kalosi, dengan luas irigasi 9.641 m2 dan berada pada wilayah Kecamatan Keera dan Maniangpajo. Kedua, kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap daerah irigasi Cilellang dan Cenranae, dengan luas irigasi 3.037 m2 pada wilayah Kecamatan Sabbangparu. Ketiga, kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap 126 daerah irigasi, dengan total luas 17.504 m2 yang tersebar pada

14 kecamatan. Rincian daerah irigasi di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 9
Daerah Irigasi Luas Rencana Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Wajo

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	Wewenang / Tanggung Jawab Pusat		9756		
	1	Awo	5324	Awo	Keera
	2	Kalola Kalosi	4317	Kalola	Maniangpajo
	Daerah Irigasi Air Tanah		115		
	1	Takkalalla Bola	115		
2	Wewenang / Tanggung Jawab Provinsi		13025		
	Daerah Irigasi		3037		
	1	Cilellang	732	Worongnge	Sabbangparu
	2	Cenranae	2305	Worongnge	Sabbangparu
	Daerah Irigasi Rawa/Daerah Irigasi Tambak		9988		
	1	DI Rawa Pammana	2050		Pammana
	2	DIT Akkotengeng	1000	Akkotengeng	Sajoanging
	3	DIT Doping	1000	Doping	Sajoanging
	4	DIT Putumpanua	1380		Pitumpanua
	5	DIT Sajoanging	2175		Sajoanging
	6	DIT Takkalalla	2383		Takkalalla
3	Wewenang / Tanggung Jawab Kabupaten		17504		
	1	Abbanderange	500	Abbanderangnge	Pitumpanua
	2	Amesangeng I	200	Tosora	Majauleng
	3	Amesangeng II	300	Tosora	Majauleng
	4	Bakke	80	Walanga	Penrang
	5	Bulupatila	240	Patila	Pammana
	6	Labawang	113	Labawang	Keera
	7	Lakatenni	300	Wele	Belawa
	8	Pabbelle	308	Lepangeng	Belawa
	9	Salampi	200	Abbanderangnge	Pitumpanua
3	10	Salo Mapejie	100	Awo	Pitumpanua

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	11	Teppo Balanda	200	Lalliseng	Keera
	12	Ugi I/Manyili	300	Mallusesalo	Sabbangparu
	13	Uraiyang	108	Uraiyang	Majauleng
	14	Wajo Wajo	200	Tosora	Majauleng
	15	Aluppang	100	Aluppang	Takkalalla
	16	Ana Saloe	130	Gilireng	Gilireng
	17	Atapangnge	100	Rumpia	Majauleng
	18	Bali Elo	70	Bali Elo	Bola
	19	Barangmamase	50	Barangmamase	Sajoanging
	20	Botto Tanre	250	Botto Tanre	Majauleng
	21	Botto Benteng	300	Botto Benteng	Majauleng
	22	Bulutekaci	260	Lamata	Gilireng
	23	Callaccu	30	Mattirowalie	Maniangpajo
	24	Cempalagi	70	Cempalagi	Tempe
	25	Cenranae	300	Abbanuangnge	Pammana
	26	Dori.Dori	30	Inalipue	Tanasitolo
	27	Geddongnge	275	Lagosi	Pammana
	28	Ire'E	50	Ire'E	Bola
	29	Jarakania	80	Tonralipue	Tanasitolo
	30	Kalidongnge	200	Macanang	Majauleng
	31	Karamae	100	Raddae	Penrang
	32	Labukkang	100	Uraiyang	Majauleng
	33	Labuangpatu	150	Mappadaelo	Tanasitolo
	34	Laceppung I	40	Inalipue	Tanasitolo
	35	Laceppung II	40	Inalipue	Tanasitolo
	36	Lakadaung	10	Dualimpoe	Maniangpajo
	37	Lamaggarang	60	Anabanua	Maniangpajo
	38	Lamalua	50	Tonralipue	Tanasitolo
	39	Lamara Awotarae	30	Kalola	Maniangpajo
3	40	Lamate	200	Anabanua	Maniangpajo
	41	Manessi	50	Minangatellue	Maniangpajo

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	42	Lapatoleng	500	Macanang	Majauleng
	43	Lapoloaju	40	Sogi	Maniangpajo
	44	Laputeng	100	Mamminasae	Gilireng
	45	Lare'E	200	Pammana	Pammana
	46	Larukkaeto	30	Belawa	Belawa
	47	Limpomajang Lompo Labawi	120	Limpomajang	Majauleng
	48	Masara	80	Abbanderangnge	Pitumpanua
	49	Lompo Labojo	400	Liu	Sabbangparu
	50	Lompo Towesse	500	Walennae	Sabbangparu
	51	Macero	320	Macero	Belawa
	52	Malingmongeng	100	Lapaukke	Pammana
	53	Maminasae	200	Mamminasae	Gilireng
	54	Manri	200	Watang Rumpia	Majauleng
	55	Manurung	20	Manurung	Bola
	56	Maroanging	70	Macanang	Majauleng
	57	Maroanging	130	Cina	Pammana
	58	OngkoE	100	OngkoE	Belawa
	59	Palaguna	50	Lempa	Pammana
	60	Palolloi	350	Wele	Belawa
	61	Pangempangnge	160	Lamata	Gilireng
	62	Parigi	150	Parigi	Takkalalla
	63	Pasa.Pasa	70	Uraiyang	Majauleng
	64	Pasir Putih	60	Pasir Putih	Bola
	65	Patemma	500	Lapaukke	Pammana
	66	Peneki	100	Parigi	Takkalalla
	67	Salo Barue	100	Wage	Sabbangparu
	68	Salotengnga	50	Pallimae	Sabbangparu
	69	Sanreseng Ade	50	Sanreseng Ade	Bola
3	70	Soppae	500	Ongkoe	Belawa
	71	Tancung	50	Tancung	Tanasitolo
	72	Teppo Batue	300	Tua	Majauleng

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	73	Teppo Panasae	70	Uraiyang	Majauleng
	74	Teppo Waji	100	Macanang	Majauleng
	75	Tobatang	30	Tobatang	Pammana
	76	Tocule	250	Bola	Bola
	77	Ujung Tanah	200	Ujung Tanah	Bola
	78	Ujunge / Pajalele	350	Pajalele	Tanasitolo
	79	UkkeE	15	Dualimpoe	Maniangpajo
	80	Weccudai	100	Weccudai	Pammana
	81	Watangteppo	100	Wage	Sabbangparu
	82	Batue	150	Cinnong Tabi	Majauleng
	83	Timpalaja	40	Uraiyang	Majauleng
	84	Mabbucu Ulu Tanre	50	Uraiyang	Majauleng
	85	Lamasewanua	200	Tajo	Majauleng
	86	Labulo, Bulu	200	Cinnong Tabi	Majauleng
	87	Ladusa	40	Tajo	Majauleng
	88	Latappareng	100	Limpomajang	Majauleng
	89	Cingki	100	Watang Rumpia	Maje
	90	Labette	60	Tadangpalie	Penrang
	91	Kading	200	Penrang	Penrang
	92	Lonrae	60	Penrang	Penrang
	93	Amasaloe	150	Temmabarang	Penrang
	94	Mualla	50	Assorajang	Sajoanging
	95	Pappolo Lekko	200	Akkotengeng	Sajoanging
	96	Bulu Mallopie	300	Sakkoli	Sajoanging
	97	Ciromanie	100	Ciromanie	Keera
	98	Toboko	50	Keera	Keera
	99	Salo Pandang	100	Simpellu	Pitumpanua
3	100	Lacinde	125	Marannu	Pitumpanua
	101	Cekke	85	Marannu	Pitumpanua
	102	Lompo Loang	65	Lompo Loang	Pitumpanua
	103	Bunga Jenne	65	Lompo Loang	Pitumpanua

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	104	Tobaralla	70	Tobbarakka	Pitumpanua
	105	Aggattungeng	40	Pallimae	Sabbangparu
	106	Teppo Batue	50	Teppo Batue	Pammana
	107	Ulu Galung	50	Lempa	Pammana
	108	Lawarengnge	50	Taddangpalie	Pammana
	109	Lapao	80	Ujung Tanah	Bola
	110	Lakaluku	50	Lempong	Bola
	111	Ceppaga	150	Ceppaga	Takkalalla
	112	Lagoari	80	Lagoari	Takkalalla
	113	Lebongnge	40	Tancung	Tanasitolo
	114	Abbolongeng Katampue	40	Pincengpute	Tanasitolo
	115	Waroriaja	150	Wajoriaja	Tanasitolo
	116	Lajokka	30	Tonralipue	Tanasitolo
	117	Cirowalie	50	Waetuwo	Tanasitolo
	118	Teppoe	80	Tonralipue	Tanasitolo
	119	Salodua	40	Mattirowalie	Maniangpajo
	120	Ajutalie Appewalie	60	Mattirowalie	Maniangpajo
	121	Langkauttu	15	Mattirowalie	Maniangpajo
	122	Bulu Seppang	20	Abbanuangnge	Maniangpajo
	123	Makkalu	20	Dualimpoe	Maniangpajo
	124	Assorajang	60	Sogi	Maniangpajo
	125	Karamee Salotengnga	350	Ongkoe	Belawa
	126	OngkoE	350	OngkoE	Belawa

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Berdasarkan potensi hidrologi sungai, terdapat 33 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Wajo, memberikan kontribusi penting terhadap ketersediaan air dan kehidupan masyarakat. Sungai terpanjang adalah Sungai Gilireng/Akkotengeng yang mencapai panjang 77 km, melintasi Kecamatan Sajoanging, Majauleng, dan Takkalalla. Di sisi lain, sungai terpendek adalah Sungai Laponggo, dengan panjang hanya 2 km, yang berada di Kecamatan Gilireng. Rincian lengkap mengenai sungai-sungai ini disajikan pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2. 10
Sungai Menurut Panjang Lebar dan Kedalaman di Kabupaten Wajo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Siwa	20,5	70	0,85
2	Awo	43,5	85	0,65
3	Keera	27	65	0,6
4	Gilireng	61,5	40	0,35
5	Bila / Belawa	15	40	0,4
6	Cenranae	47	115	0,7
7	Walanae	28,5	95	0,55

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Tabel 2. 11
Sungai Menurut Panjang, Kecamatan dan Muara di Kabupaten Wajo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Kecamatan	Muara
1	Walanae	28.5	Sabbangparu	Teluk Bone
2	Cenranae, Menraleng – Wajo	74	Tempe, Majauleng, Pammana, Bola	Teluk Bone
3	Cenranae/Labulang	13	Sajoanging	Teluk Bone
4	Bulete / Awo	52	Pitumpanua	Teluk Bone
5	Gilireng/ Akkotengeng	77	Sajoanging, Majauleng, Takkalalla	Teluk Bone
6	Peneki	21	Takkalalla, Penrang	Teluk Bone
7	Campi	5	Takkalalla, Penrang	Teluk Bone
8	Doping	10	Penrang	Teluk Bone
9	Laliseng	16	Keera	Teluk Bone
10	Keera	27	Keera	Teluk Bone
11	Kulampu	18	Keera	Teluk Bone
12	Siwa	20.5	Pitumpanua	Teluk Bone
13	Buila / Kalola	17	Belawa, Tanasitolo	Teluk Bone
14	Laponggo	2	Gilireng	Teluk Bone
15	Batumanuk	6	Bola	Teluk Bone
16	Bila	17	Belawa, Tanasitolo	Danau Tempe
17	Belawa	11	Belawa	Danau Sidenreng
18	Belle	13	Belawa	Danau Sidenreng
19	Bonge	5	Sajoanging	Teluk Bone
20	Laponggo	6	Sajoanging	Teluk Bone

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Kecamatan	Muara
21	Cilelang	9.5	Sabbangparu	Danau Tempe
22	Lapotta		Majauleng	
23	Labette		Penrang	
24	Cellue		Bola, Pammana, Takkalalla	
25	Polla		Majauleng, Sajoanging	
26	Salo Bakka		Sajoanging	
27	Ambo Dongi		Pammana	
28	Worongnge		Sabbangparu	
29	Kading		Penrang	
30	Lompo Lagau		Penrang	
31	Lompo Lajonga		Sabbangparu	
32	Mualla		Penrang	
33	Jangkali		Bola	

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Selain sungai, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi hidrologi berupa danau dan rawa yang berperan penting dalam menjaga ekosistem dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Terdapat 15 danau dan rawa di wilayah ini. Danau terbesar adalah Danau Tempe dengan luas mencapai 9.342 hektare, mencakup wilayah Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, dan Belawa. Sebaliknya, Danau Dorie adalah yang terkecil, dengan luas 6 hektare, terletak di Kecamatan Takkalalla. Informasi detail mengenai danau dan rawa ini dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13.

Tabel 2. 12
Danau Tempe Menurut Kedalaman dan Luas di Kabupaten Wajo

No	Nama Danau	Kedalaman (m)	Luas (Km²)
1	Danau Tempe	0 – 1	35.9
		1 – 2	35.42
		2 . 2.5	20.9
		> 2.5	1.2

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Tabel 2. 13
Danau / Rawa Menurut Luas di Kabupaten Wajo

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Danau Tempe	9.342	Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Belawa

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Kecamatan
2	Danau Buaya	360	Takkalalla
3	Danau Lapongpakka	1.960	Maniangpajo / Belawa
4	Danau Lampulung	1.000	Tempe / Pammana
5	Danau Penrang Riawa	25	Tanasitolo
6	Danau Cenranae	24	Sajoanging
7	Danau Dorie	6	Takkalalla
8	Danau Lapapolo	37	Takkalalla
9	Danau / Rawa Sempangnge	343	Majauleng
10	Danau / Rawa Palisu	767	Bola
11	Danau / Rawa Baleng	620	Pammana
12	Danau / Rawa Bola	1.920	Bola
13	Danau / Rawa Salo	890	Bola
14	Danau / Rawa Penrang	726	Penrang
15	Danau / Rawa Palaguna	420	Pammana
Jumlah		18.543	

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Dengan adanya sungai-sungai dan danau yang tersebar di berbagai kecamatan, potensi hidrologi Kabupaten Wajo menunjukkan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keberadaan sumber daya air ini mendukung beragam kebutuhan mulai dari irigasi pertanian hingga penyediaan air bagi masyarakat. Potensi ini, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi aset berharga bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo.

H. Bencana

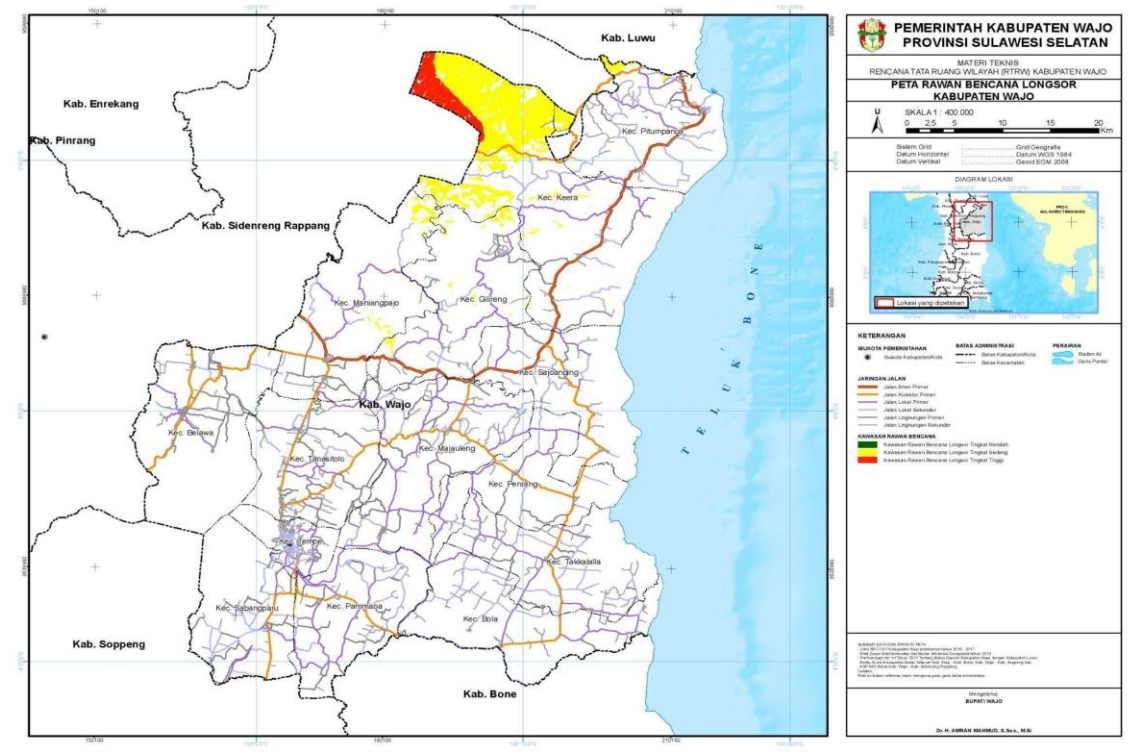
Kabupaten Wajo memiliki beberapa potensi bencana alam, antara lain banjir, longsor, gempa bumi, abrasi, dan tsunami. Bencana banjir di wilayah ini sering terjadi akibat degradasi kawasan lindung di hulu dan hilir sungai. Di kawasan pedesaan, penurunan kualitas lahan sering kali memicu banjir, sedangkan di kawasan perkotaan, masalah banjir lebih disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah.

Selain banjir, Kabupaten Wajo juga berada di wilayah yang rawan gempa bumi. Berdasarkan sejarah geologis terbentuknya Pulau Sulawesi, terdapat garis sesar yang memanjang dari perairan di sekitar Pulau Selayar menuju utara, melintasi Kabupaten Bulukumba, Soppeng, dan Sidrap, hingga bercabang di Kabupaten Enrekang. Sesar ini mempengaruhi wilayah-wilayah yang dilaluinya, dengan pusat kerawanan gempa di Kabupaten Wajo.

Potensi bencana lainnya adalah longsor, terutama di daerah dengan kerentanan gerakan tanah. Berdasarkan peta gerakan tanah Kabupaten Wajo, sebagian besar wilayahnya berada dalam zona kerentanan rendah hingga menengah. Namun, kerentanan ini dapat meningkat akibat aktivitas manusia, khususnya dalam pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pegunungan. Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali di area ini meningkatkan risiko bencana longsor.

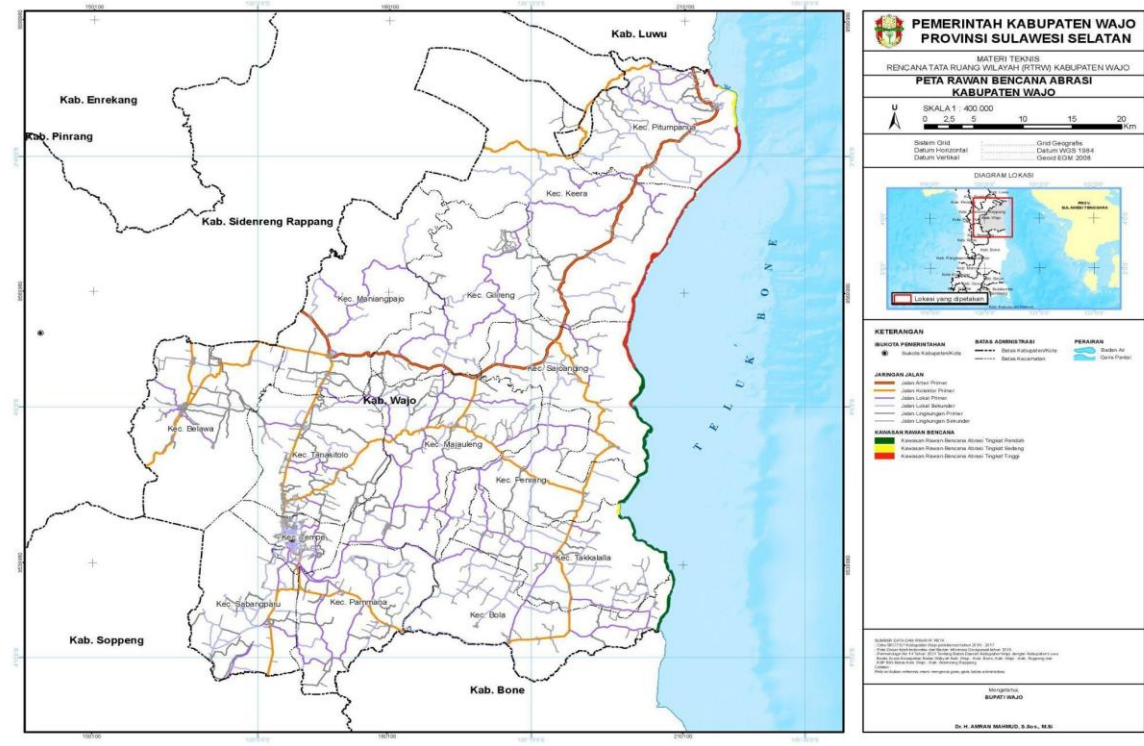
Dengan demikian, potensi bencana di Kabupaten Wajo menunjukkan perlunya upaya mitigasi yang terpadu, baik melalui pelestarian lingkungan di kawasan pedesaan maupun pengelolaan sistem drainase yang lebih baik di kawasan perkotaan. Selain itu, pemahaman mengenai risiko kegempaan dan longsor di area tertentu dapat menjadi dasar penting untuk perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.

Gambar 2. 9
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Wajo



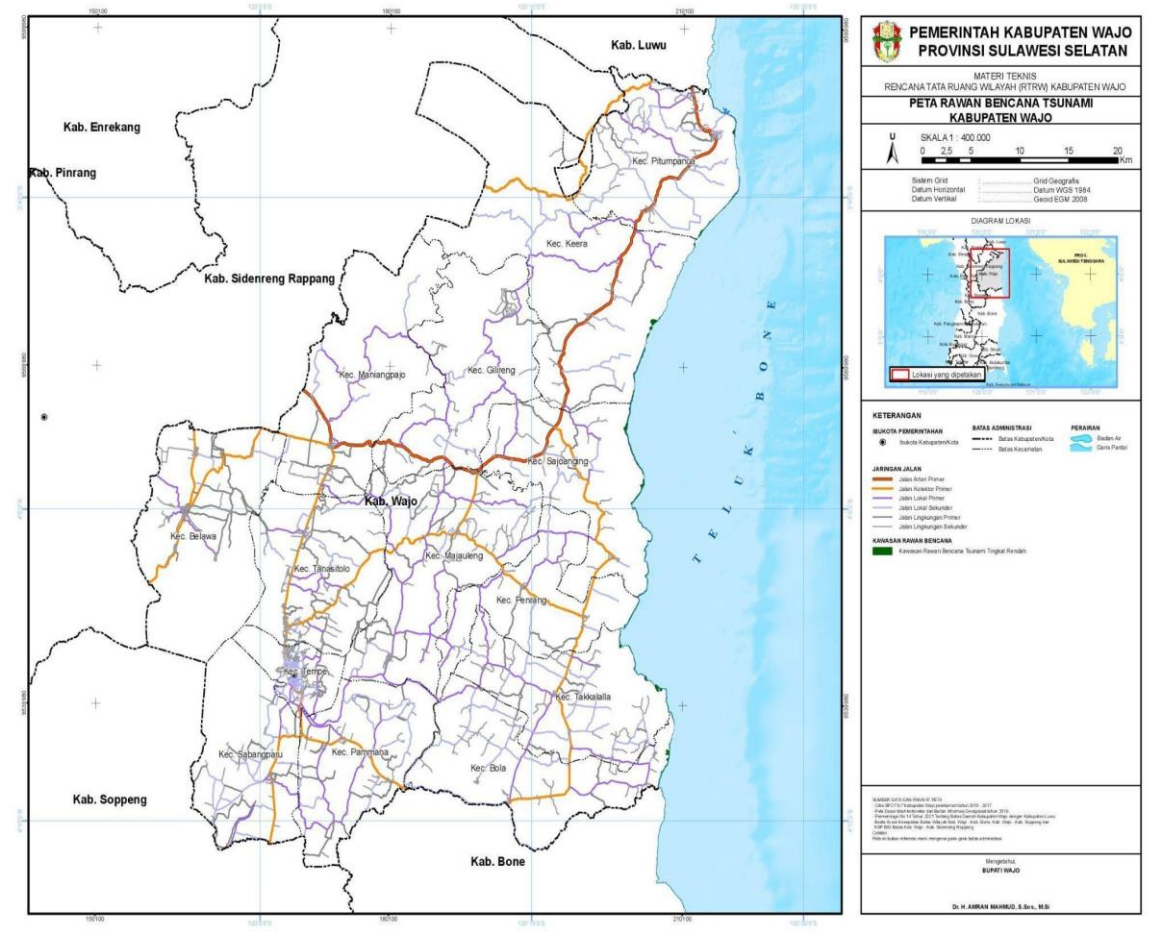
Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Gambar 2. 11
Peta Rawan Bencana Abrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Gambar 2. 12
Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2024

Beberapa aspek geografis diatas perlu diperhatikan dan dilengkapi dengan informasi daya dukung dan daya tampung. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.1.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selama sepuluh tahun terakhir, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Wajo berkisar dari kategori sangat kurang hingga kategori baik. Pada tahun 2023, IKLH Kabupaten Wajo tercatat sebesar 62,60, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 62,68, atau mengalami penurunan sekitar 0,08 poin.

Angka IKLH tahun 2023 ini merupakan hasil komposit dari beberapa indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,44, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,06, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar

89,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas air masih tergolong rendah, sedangkan kualitas udara dan tutupan lahan cukup tinggi.

Secara keseluruhan, nilai IKLH Kabupaten Wajo berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 74,30 dan juga di bawah rata-rata nasional sebesar 72,54. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas udara dan tutupan lahan relatif baik, kualitas lingkungan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati atau melampaui standar provinsi dan nasional.

Tabel 2. 14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2023

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH Provinsi	73,24	74.83	75,12	71.74	73.23	74,17	74,30
IKLH Nasional	66,46	71.67	66,55	70.27	71.43	72,42	72,54
KABUPATEN WAJO							
IKLH	57,8	61.32	55,49	61.03	75	62,68	62,60
IKA	56,67	60,00	40,00	60,00	58.75	53,57	54,44
IKU	80,44	92,03	92,56	90,73	91,48	91,93	89,06
IKT	41.66	41.67	39,30	39.27	23.75	23,75	27,65

Sumber :Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, 2023 (Diolah)

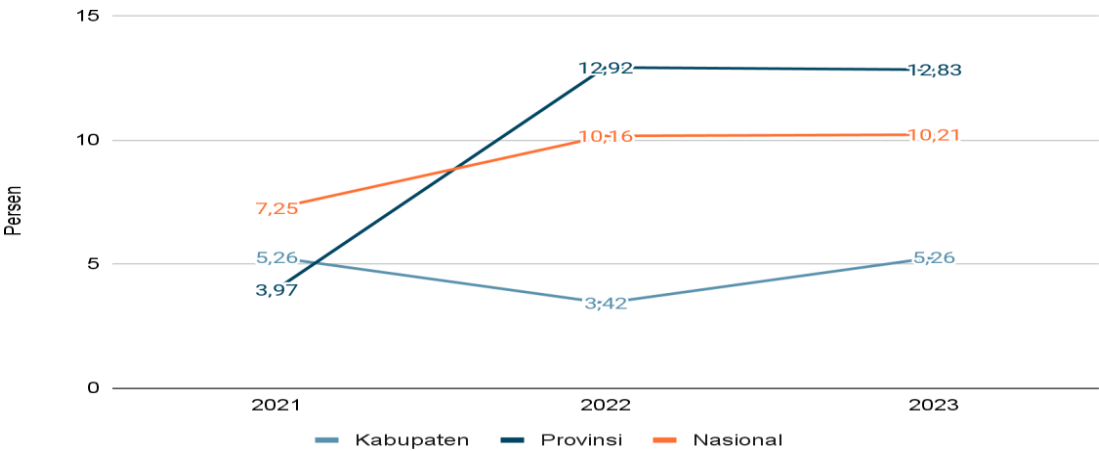
2.1.1.2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Gambaran lebih lanjut mengenai kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Wajo, juga dapat dilihat dari kondisi sanitasi dan persampahan.

Kondisi sanitasi di Kabupaten Wajo dapat diketahui dari Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Akses aman yang dimaksud adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2020 Kabupaten Wajo telah berstatus ODF (*open defecation free*) atau bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarang (BABS). Kini pemerintah daerah tengah mengembangkan strategi percepatan pembangunan sanitasi aman. Capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Wajo pada tahun 2023 berada pada angka 5,26%. Berdasarkan arahan Roadmap Nasional Sanitasi Aman pada tahun 2030 Kabupaten Wajo ditargetkan harus mencapai 7,03% akses sanitasi aman dengan asumsi bahwa semua sarana terbangun berfungsi dengan optimal.

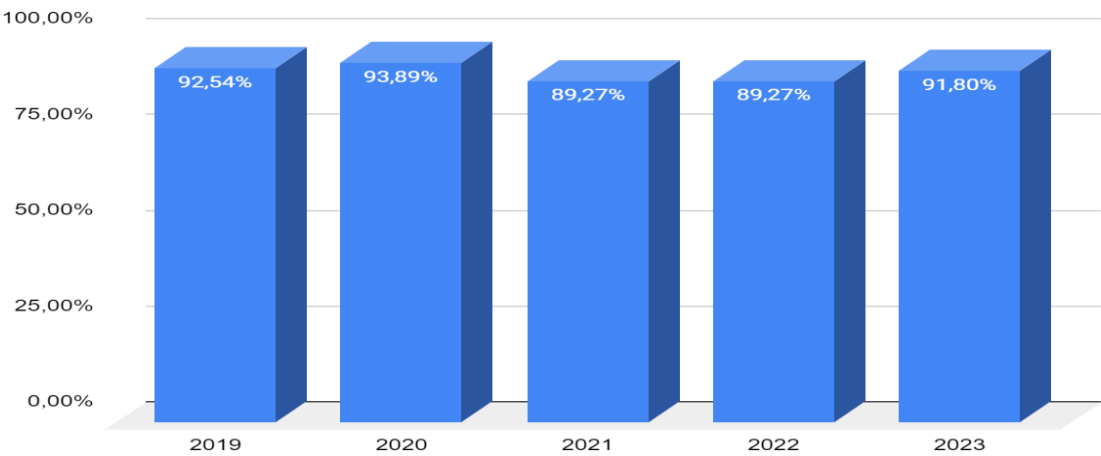
Grafik 2. 1
Akses Sanitasi Aman Rumah Tangga Pada Tahun 2021-2023 Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BAPPENAS

Akses terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Wajo persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan telah mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, terdapat 92,54% rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2020, mencapai 93,89% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam infrastruktur dan layanan sanitasi, namun terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 89,27% dan angka ini tetap bertahan pada level yang sama di tahun selanjutnya, pada tahun 2023 terlihat adanya pemulihan, meningkat menjadi 91,80%, hal ini menunjukkan perbaikan dalam penyediaan layanan tersebut. Adapun untuk jumlah rumah tangga yang telah terlayani penyedotan lumpur tinja tahun 2023 sebanyak 49 rumah tangga yang kemudian diolah di IPLT. Di Kabupaten Wajo terdapat 5 unit IPAL Komunal yang terbangun namun belum dapat difungsikan secara maksimal.

Grafik 2. 2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan



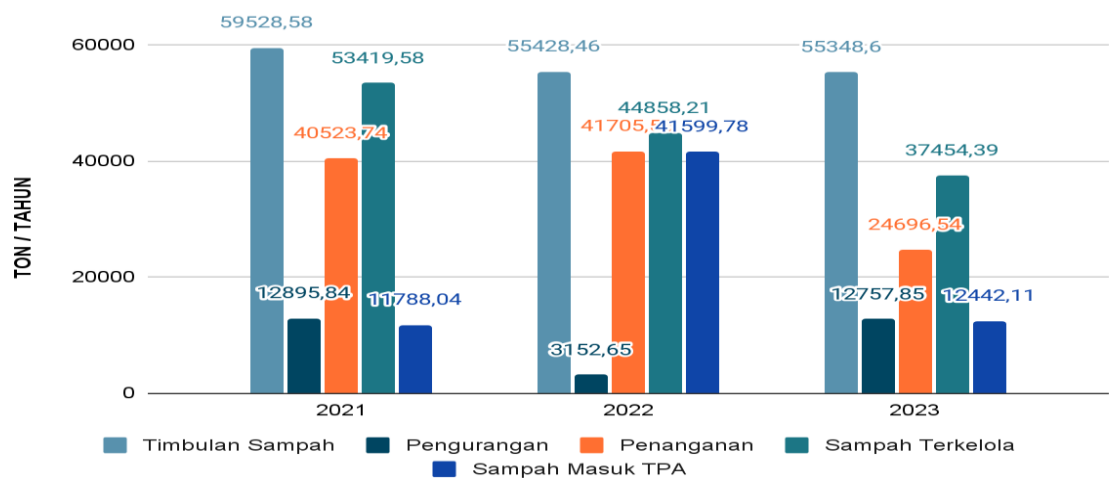
Sumber : Dinas PUPRP Kabupaten Wajo, 2024

2.1.1.3. Persentase Timbunan Sampah Terkelola di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah sampah akibat urbanisasi dan gaya hidup modern, pengelolaan yang tepat dapat mencegah pencemaran tanah, air, dan udara yang membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Sistem pengelolaan yang baik, seperti daur ulang, pengurangan, dan pengolahan sampah, membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA dan meminimalkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pengelolaan sampah yang bijak membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan energi terbarukan, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tahun 2021 hingga 2023, capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah maupun pendaurulangan sampah mengalami tren fluktuatif. Pengelolaan sampah organik dan non organik dari rumah tangga merupakan faktor penting dalam peningkatan akses pengurangan sampah, karena mengurangi jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA. Jumlah timbunan sampah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak didaur ulang.

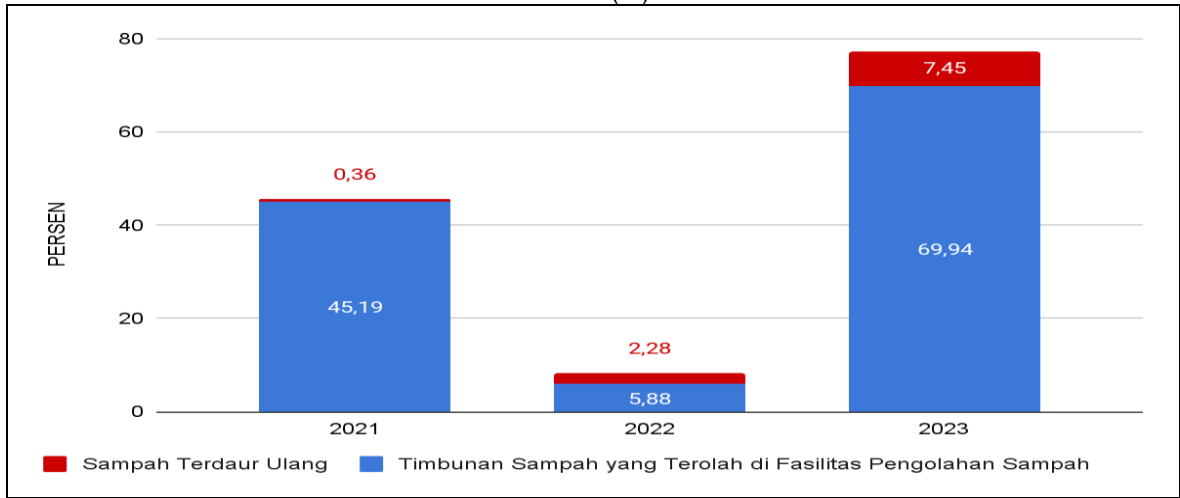
Grafik 2. 3
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Wajo Tahun 2021 - 2023 (ton/tahun)



Sumber : SIPSN data diolah Bappelitbangda

Persentase timbunan sampah terkelola di fasilitas pengelolaan sampah termasuk sampah yang terdaur ulang tahun 2021 hingga 2023 mengalami tren peningkatan, meskipun kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena penanganan sampah menggunakan pendekatan angkut dan buang ke TPA, sehingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Grafik 2. 4
Timbunan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : SIPSN data diolah Bappelitbangda

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah. Indikator ini terdiri dari Rumah Tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang

terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Selain itu juga meliputi rumah tangga memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Tahun 2023 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Wajo sebanyak 91.458 dari total 126.658 jumlah rumah tangga seluruhnya atau sebesar 72,21 persen. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 73,11 persen akibat berkurangnya rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah.

2.1.1.4. Indeks Risiko Bencana

Kondisi geografis seperti letak geografis, topografi, jenis tanah, dan iklim dapat menentukan jenis bencana alam yang mungkin terjadi di suatu wilayah, dan memungkinkan untuk melakukan pemetaan zona-zona rawan bencana. Bencana alam yang terjadi memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Indeks Risiko Bencana merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2015 hingga 2023, indeks risiko bencana Kabupaten Wajo stabil dan hanya mengalami perubahan pada tahun 2023, namun mengindikasikan tingkat bencana dengan risiko tinggi sejak tahun 2015 hingga 2023. Nilai IRB tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang secara periodik terus mengalami penurunan IRB secara signifikan. Wilayah Kabupaten Wajo memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, kekeringan, banjir, longsor, dan likuifaksi. Bencana banjir yang seringkali terjadi di Kabupaten Wajo merupakan banjir kiriman, seperti meluapnya Danau Tempe dan Sungai Siwa.

Tabel 2. 15
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2023

[illegible]

Indeks Risiko Bencana									
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	166,45	166,45	162,59	160,05	159,49	159,49	154,87	150,07	144,5
Nasional	156,43	150,58	148,82	145,85	144,02	141,65	138,81	135,56	132,25

Sumber : <https://inarisk.bnph.go.id/-irbi>

Kabupaten Wajo memiliki risiko bencana tinggi karena berada pada Sesar Walanae, yang merupakan patahan besar yang membentang di sepanjang bagian barat daya Sulawesi. Keberadaan tersebut menempatkan Kabupaten Wajo memiliki risiko terhadap bencana gempa bumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dan likuifaksi akibat aktivitas tektonik dan seismik di Sesar Walanae.

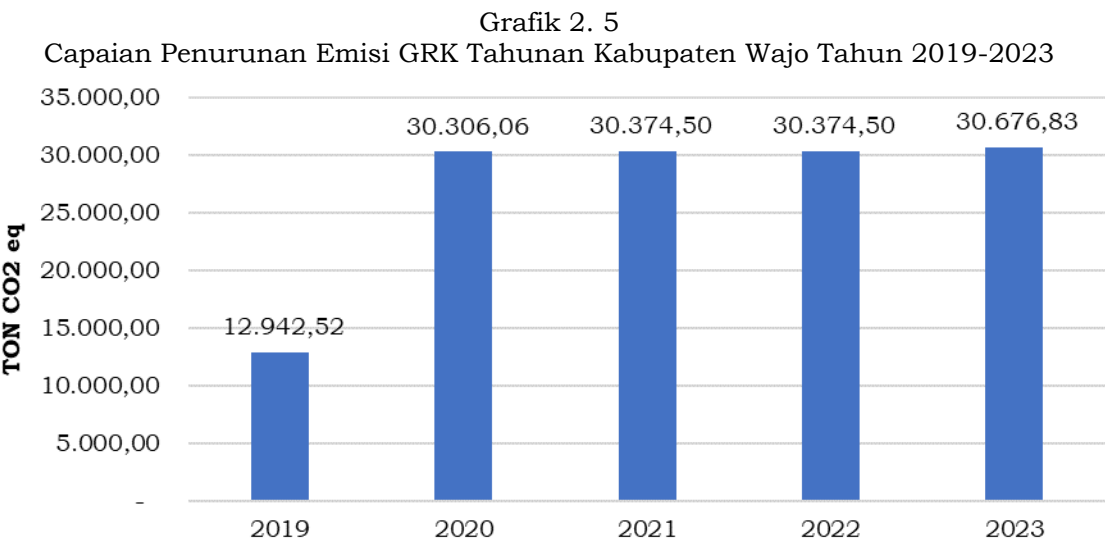
Bencana banjir yang terjadi setiap tahun juga berisiko terhadap penurunan daya dukung lingkungan berupa sedimentasi Danau Tempe. Sedimentasi tersebut terjadi akibat erosi tanah di daerah tangkapan air dan aliran sungai yang membawa lumpur mengurangi kapasitas tampung danau, sehingga lebih mudah meluap saat volume air meningkat. Hal ini diperparah dengan maraknya alih fungsi lahan dan meningkatnya lahan kritis yang disertai dengan kondisi topografi yang cenderung datar di beberapa kawasan sehingga berpotensi terhadap terjadinya genangan air terutama di musim hujan.

2.1.1.5. Penurunan Emisi GRK Tahunan

Selain risiko bencana akibat kondisi geografi dan topografi, Kabupaten Wajo juga rentan terhadap peningkatan intensitas bencana akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu diantaranya adalah aspek kesehatan berupa peningkatan kasus penyakit melalui vektor air, udara dan/atau peningkatan suhu. Selain itu adanya dampak peningkatan air laut di sepanjang garis pantai yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan produktif, kerusakan habitat ekosistem pesisir, dan bahkan mengancam permukiman dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir.

Perubahan iklim tersebut disebabkan oleh Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indikator yang menggambarkan emisi tersebut adalah Penurunan Emisi GRK Tahunan dimana capaian Kabupaten Wajo berdasarkan aplikasi AKSARA

menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 12.942,52 ton CO2 eq, menjadi 30.676,83 ton CO2 eq pada tahun 2023. Penurunan emisi GRK tersebut merupakan hasil laporan aktif Kabupaten Wajo mengenai aksi mitigasi GRK pada sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi, dan sektor blue carbon, dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi yang dilaksanakan sebanyak 25 kegiatan. Gambaran capaian penurunan emisi GRK tahunan Kabupaten Wajo disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Aplikasi AKSARA Tahun 2024

2.1.1.6. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)

Selain beberapa indikator lingkungan di atas, Energi, Air dan Kemandirian Pangan menjadi bagian penting yang terkait dengan pengelolaan potensi geografis Kabupaten Wajo secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan energi di Kabupaten Wajo adalah Konsumsi Listrik Perkapita (kWh), yang memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, yang mencapai 333 kWh per kapita pada tahun 2023. Begitu pula konsumsi listrik rumah tangga yang juga mengalami peningkatan menjadi 112,52 gWh pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya efisiensi energi di sektor rumah tangga, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan edukasi tentang

penghematan energi di rumah tangga. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Tabel 2. 16

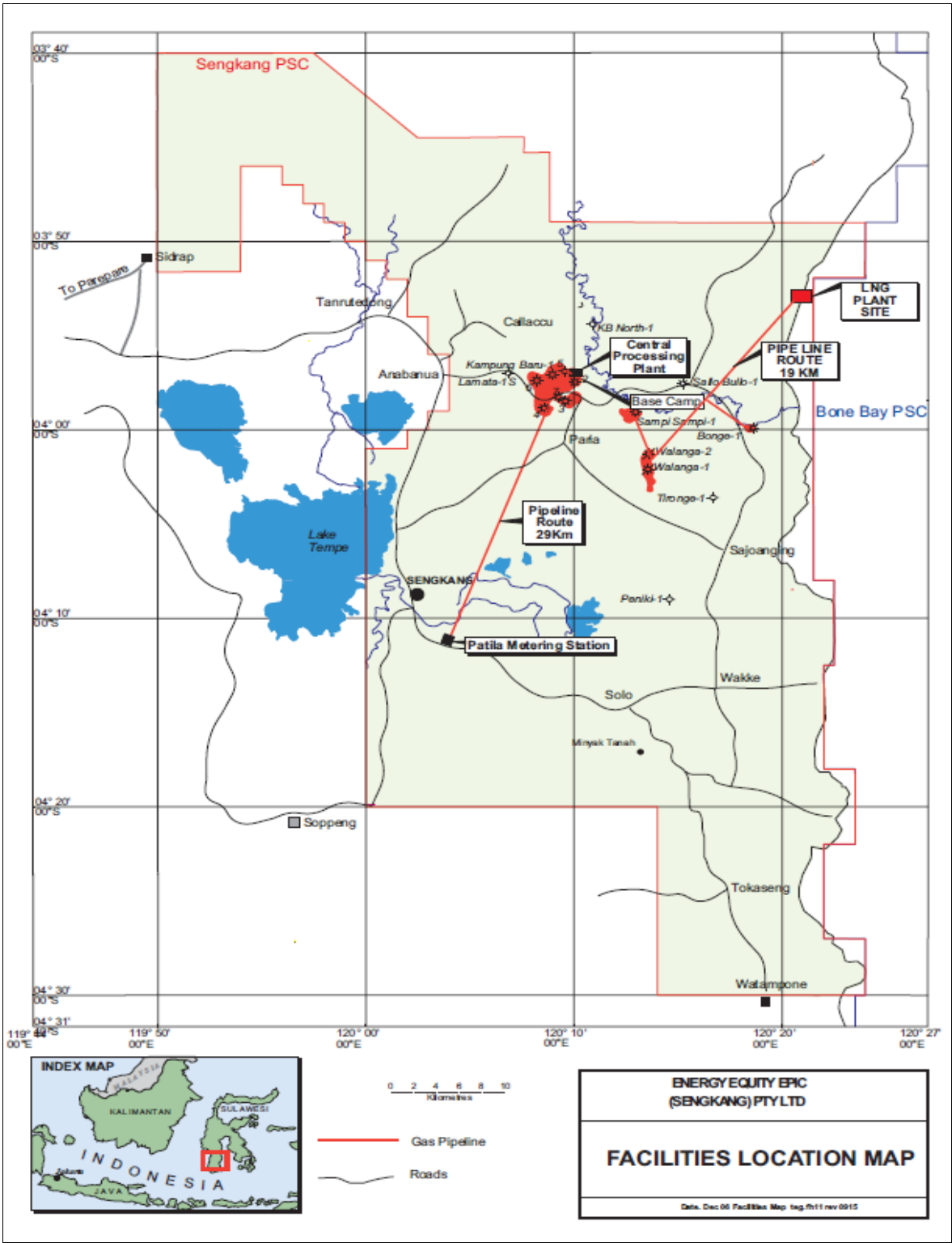
Konsumsi Listrik Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023

Tahun	Konsumsi Listrik Rumah Tangga (gWh)	Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)
2021	103,11	317,40
2022	108,00	325,00
2023	112,52	333,00

Sumber : PLN Ranting Sengkang, PLN Ranting Paria

Cadangan Gas Alam Blok Sengkang sebesar 2 *trillion cubic feet* dapat menjadi potensi energi yang dapat dioptimalkan. Saat ini volume gas alam yang tersertifikasi di Kabupaten Wajo sebesar 381 *billion of standard cubic feet* (BSCF), yang terdiri atas 210,3 BSCF di wilayah Kampung Baru dan 170,8 BSCF di wilayah Walanga, Sampi-sampi, dan Bonge (Wasambo). Gambaran Gas Alam Blok Sengkang disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2. 13
Peta Gas Alam Blok Sengkang



Sumb

er: Energi Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd

2.1.1.6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)

Menyelesaikan masalah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan adalah langkah krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketidacukupan pangan tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi produktivitas kerja, perkembangan anak, serta kemampuan belajar generasi muda. Dengan mengatasi masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya dapat mencegah dampak negatif jangka panjang seperti malnutrisi, peningkatan angka kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Selain itu, penyelesaian masalah ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional, menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendukung kestabilan ekonomi di tingkat nasional.

Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Wajo dapat dilihat melalui capaian indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) dari tahun 2018 hingga 2023, yang berkisar antara 6 hingga 12 persen. Peningkatan ketidacukupan pangan terjadi pada tahun 2020, mencapai 10 persen, dan melonjak hingga 12 persen pada tahun 2022, bahkan melebihi angka rata-rata provinsi dan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan ini termasuk pandemi Covid-19, krisis ekonomi akibat pandemi global, perubahan iklim, fluktuasi harga, serta akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan layanan, terutama bagi penduduk yang rentan secara sosial atau ekonomi.

Tabel 2. 17
Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten	7,63	8,64	10,68	8,81	12,09	6,67
Provinsi	6,22	7,65	10,14	7,93	10,79	7,84
Nasional	7,92	7,63	8,34	8,49	10,21	8,53

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, 2023.

Pada tahun 2023, prevalensi ketidacukupan pangan mengalami penurunan signifikan menjadi 6,67 persen yang menunjukkan perbaikan di atas capaian provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Wajo masih mampu memenuhi kebutuhan penduduk secara memadai. Bahkan, dengan total ketersediaan pangan yang berlimpah, Kabupaten Wajo memiliki kapasitas yang cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduknya.

2.1.1.7. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Wajo adalah capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP diukur berdasarkan tiga aspek utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dari tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Wajo konsisten menunjukkan ketahanan pangan yang baik,

dengan rata-rata nilai IKP sebesar 83,9%. Hal ini menempatkan Kabupaten Wajo sebagai salah satu wilayah dengan ketahanan pangan terbaik.

Selain IKP, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga menjadi indikator penting yang menilai keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan penduduk. Sejak tahun 2019, skor PPH di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan hingga tahun 2021, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok pangan sayur dan buah sebesar 30 persen, serta kelompok buah/biji berminyak sebesar 0,3 persen. Namun, pada tahun 2022, skor PPH mengalami penurunan menjadi 78 persen, yang disebabkan oleh penurunan konsumsi pada kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

Pada tahun 2023, skor PPH kembali meningkat menjadi 85,40 persen. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya kontribusi kelompok pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah, yang menunjukkan perbaikan dalam diversifikasi konsumsi pangan. Kondisi ini menggambarkan upaya Kabupaten Wajo dalam menjaga keseimbangan konsumsi pangan dan memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi penduduk secara lebih beragam.

Tabel 2. 18
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No.	Kelompok Pangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-Padian	24,4	25,0	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-Umbian	0,7	0,7	0,80	0,70	0,60
3	Pangan Hewani	22,9	23,6	24,00	19,40	20,80
4	Minyak dan Lemak	4,4	4,5	4,60	5,00	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,2	0,30	0,50	0,60
6	Kacang-kacangan	6,6	6,9	7,20	3,60	4,90
7	Gula	1,1	1,1	1,10	1,90	2,30
8	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,00	21,90	26,40
9	Lain-Lain	0,0	-	-	-	-
Total Skor PPH		90,30	92,00	93,00	78,00	85,40

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, 2024.

2.1.1.8. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku merujuk pada jumlah maksimum air yang tersedia untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi rumah tangga, pertanian, industri, dan kebutuhan lainnya. Kapasitas ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air di suatu wilayah, kualitas sumber air, dan teknologi pengolahan yang digunakan. Selain itu, faktor iklim, kondisi geografis, dan tingkat pertumbuhan

populasi turut memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas dan ketersediaan air baku. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan sumber air secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kapasitas air baku dapat memenuhi permintaan, mengingat tekanan yang semakin tinggi terhadap sumber daya air akibat perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan di berbagai sektor.

Kondisi ketahanan air di Kabupaten Wajo dapat dilihat melalui capaian indikator Kapasitas Air Baku (m³/detik). Kabupaten Wajo menyediakan air baku untuk kebutuhan air minum penduduk dari delapan sumber air baku yang tersedia, dengan kapasitas total 1.552 liter per detik. Dari kapasitas tersebut, sekitar 250 liter per detik telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada potensi kapasitas air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Perhitungan kebutuhan air di Kabupaten Wajo dibagi menjadi dua kategori utama: kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air untuk lahan didasarkan pada jenis penutupan lahan yang ada, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak, yang masing-masing memiliki kebutuhan air yang berbeda. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan per kapita untuk hidup layak, yaitu sebesar 43,3 m³ per tahun. Pembagian ini membantu dalam memastikan bahwa alokasi air dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap sektor dan mendukung pengelolaan sumber daya air secara efisien di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 19
Kapasitas Air Baku Kabupaten Wajo Tahun 2023

Jenis Air Baku	Kapasitas (L/detik)	Kapasitas Terpakai (L/detik)
Sungai Cenranae 1	184	130
Sungai Walannae	184	10
Sungai Cenranae 2	184	10
Sungai Bila	340	20
Sungai Awo	184	20
Sungai Siwa	108	20
Sungai Cenranae 3	184	20
Sungai Cenranae 4	184	20

Jenis Air Baku	Kapasitas (L/detik)	Kapasitas Terpakai (L/detik)
Total	1.552	250

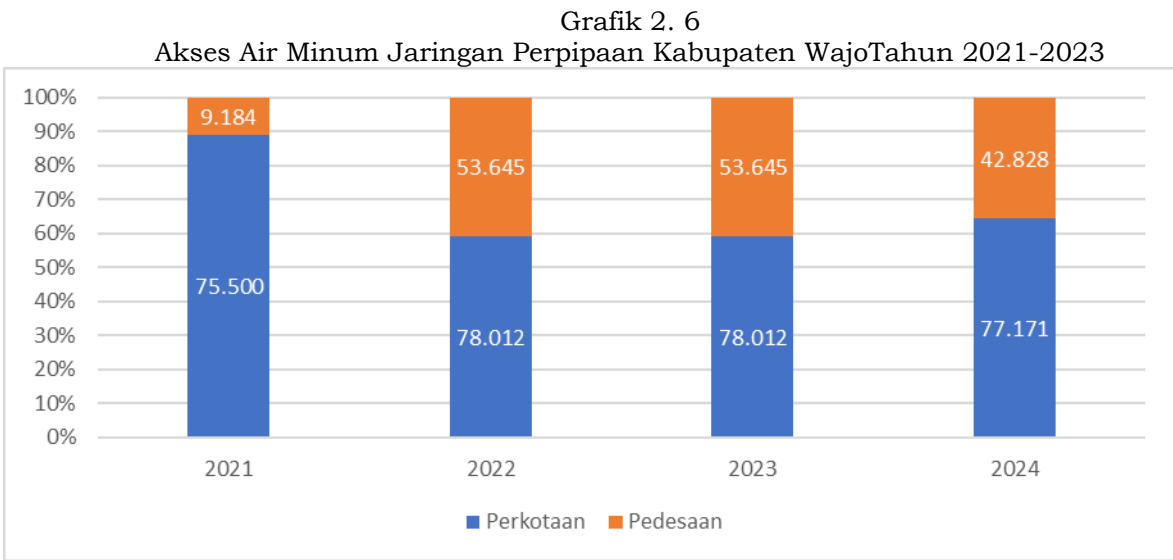
Sumber: Aplikasi SIMSPAM

2.1.1.9. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Pentingnya memastikan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sangat mendasar untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Air yang siap minum dan terdistribusi melalui jaringan perpipaan yang aman tidak hanya mengurangi risiko penyakit menular seperti diare dan kolera, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber air lain yang mungkin tidak terjamin kebersihannya. Selain itu, ketersediaan air siap minum perpipaan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendorong keberlanjutan lingkungan di perkotaan, karena mengurangi kebutuhan akan kemasan plastik dan air dalam botol. Akses ini juga menciptakan kondisi hidup yang lebih layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan air bersih.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan data SIMSPAM jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan di Kabupaten Wajo tahun 2023 sejumlah 29.827 sambungan rumah, sedangkan jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat melalui pengawasan kualitas air minum sejumlah 130 unit dari 134 unit sarana air minum sehingga jumlah Sambungan Rumah Aman sejumlah 28.937 atau 29,94% yang dikategorikan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan. Adapun gambaran akses air minum jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Aplikasi SIMSPAM

2.1.1.10. Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Kondisi keberlanjutan keanekaragaman hayati digambarkan melalui sektor pertanian dan perikanan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 20
Capaian Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks pertanaman (IP) padi (kali)	2	2	2	2	2
Proporsi sawah irigasi (%)	30,64	30,72	29,69	29,98	29,92
Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	500.517,81	500.590,99	505.573,38	509.656,93	514.033,59
Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	N/A	71,08	68,96	67,43	66,48

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Dinas Perikanan Kabupaten Wajo Tahun 2024 (Diolah)

Indeks Pertanaman Padi adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Selama 5 tahun terakhir indeks pertanaman padi di Kabupaten Wajo yakni sebanyak 2 kali dalam rentang 1 tahun. Upaya peningkatan indeks pertanaman padi terus dilakukan pemerintah daerah dengan optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu melalui perbaikan pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainnya.

Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Wajo berada di kisaran 29,9 persen hingga 30 persen dari luas lahan sawah irigasi seluas 30.453 Ha. Di tahun 2019 proporsi sawah irigasi sebesar 30,64 persen, 2020 sebesar 30,72 persen namun di tahun 2021 hingga tahun 2023 proporsi sawah irigasi mengalami penurunan menjadi 29,92 persen.

Produksi Perikanan Budidaya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023. Produksi perikanan budidaya berasal dari produksi tambak, produksi kolam dan mina padi serta produksi dari budidaya laut (rumput laut). Produksi tambak cenderung mengalami peningkatan hal ini terutama adanya peningkatan produksi udang vaname. Produksi budidaya air tawar yakni kolam dan mina padi juga mengalami peningkatan hal ini disebabkan budidaya air tawar mulai dikembangkan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Wajo. Produksi budidaya rumput laut juga cenderung meningkat hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang mendukung serta harga rumput laut yang cukup tinggi. Produksi perikanan tangkap berasal dari produksi di laut dan produksi di perairan umum (danau, sungai, rawa). Produksi penangkapan di perairan umum pada tahun 2023 mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau yang mengakibatkan volume air berkurang bahkan kering yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup biota di dalamnya.

Konsumsi Ikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan oleh harga ikan yang terus naik dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih makanan cepat saji dan praktis daripada ikan segar.

2.1.2. Aspek Demografi

Kondisi demografi atau kependudukan di Kabupaten Wajo ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 21
Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kabupaten Wajo
Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk*)	372.512	377.465	378.024	392.437	402.066	407.873
LPP	0,34	0,33	-0,15	0,75	0,73	0,71

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepadatan Penduduk per Km2	160,00	161,00	151,00	152,00	146,00	148,00
Rasio Jenis Kelamin	91,71	91,76	94,37	94,52	94,62	94,70

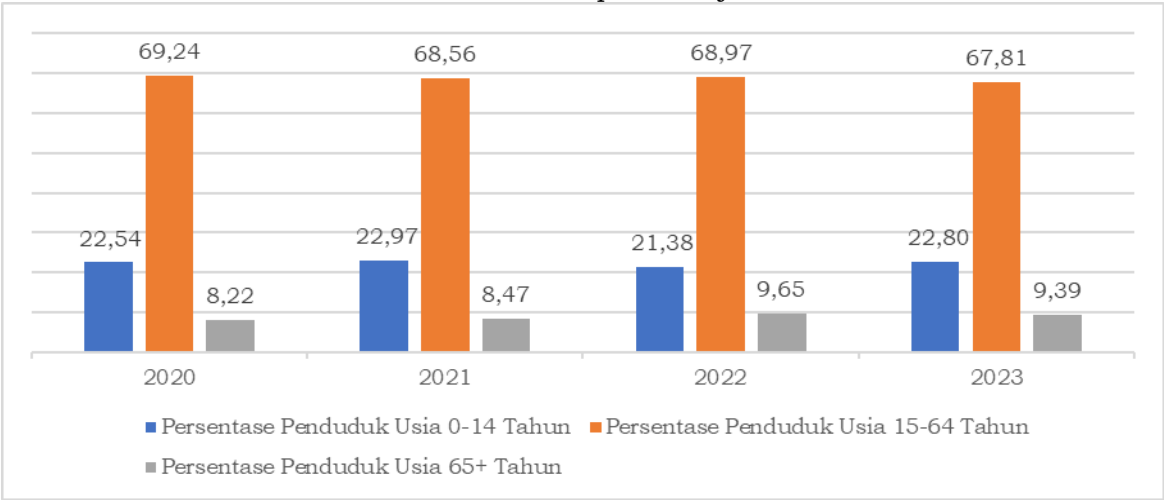
Sumber : *) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah
BPS Kabupaten Wajo 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2023, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mencapai 407.873 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,71 persen per tahun dari 2018 hingga 2023. Kepadatan penduduk di tahun 2023 tercatat sebesar 148 jiwa per km². Rasio jenis kelamin menunjukkan angka 94,70, yang berarti terdapat 94,70 pria untuk setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 198.382 jiwa, sedangkan penduduk perempuan mencapai 209.491 jiwa.

Perubahan dalam struktur penduduk Kabupaten Wajo juga berdampak pada rasio ketergantungan penduduk. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan berada pada angka 44,49, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 47 penduduk usia nonproduktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Berdasarkan proyeksi penduduk, rasio ketergantungan ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2045, menjadi 77,14, seiring dengan bertambahnya persentase penduduk usia lanjut.

Rasio ketergantungan yang semakin tinggi ini mengindikasikan bahwa beban bagi penduduk usia produktif akan semakin besar, karena mereka harus mendukung populasi nonproduktif yang semakin besar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi perencanaan ekonomi dan sosial untuk mempersiapkan dukungan yang memadai bagi penduduk usia lanjut dan populasi yang tidak produktif secara ekonomi. Gambaran demografi Kabupaten Wajo selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 7
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023



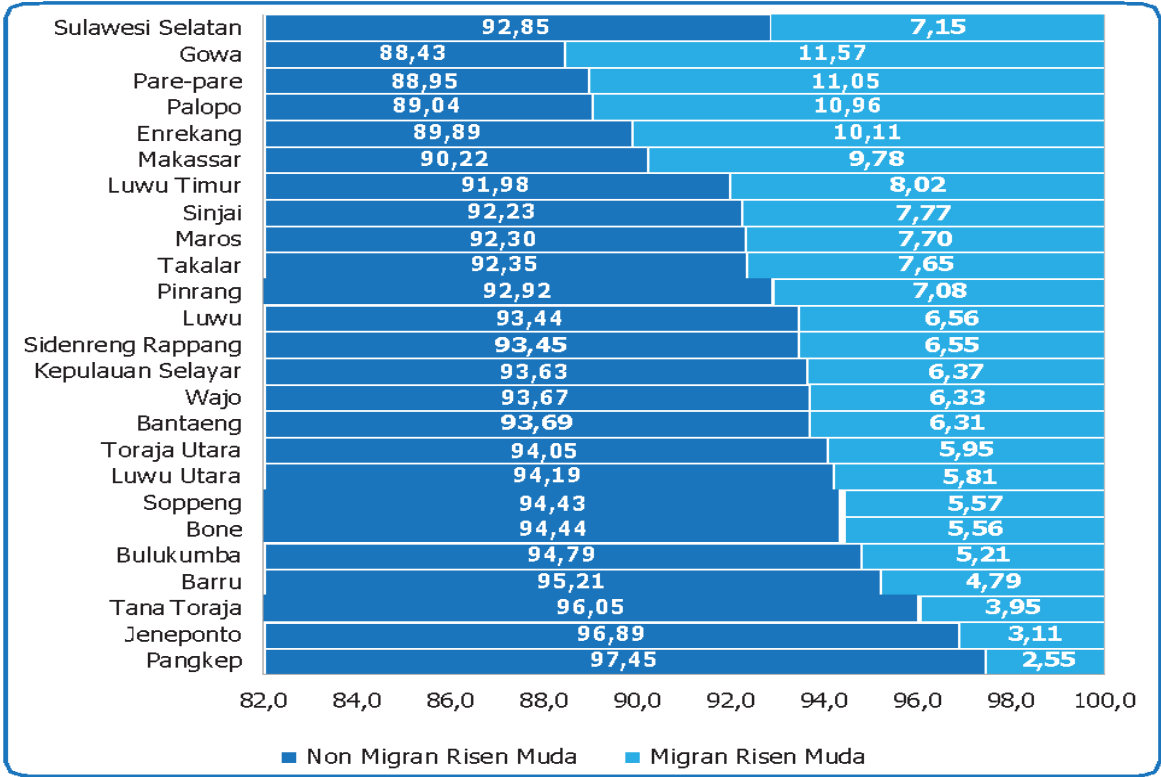
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

Kondisi kependudukan di Kabupaten Wajo juga dapat dilihat dari pola migrasi penduduknya. Pada tahun 2023, tercatat bahwa 93,67% penduduk usia 15-29 tahun berstatus sebagai non-migran risen, yaitu penduduk yang telah tinggal di Kabupaten Wajo selama lima tahun terakhir. Sementara itu, 6,33% sisanya berstatus sebagai migran risen, yang berarti mereka adalah pendatang baru dalam kurun waktu tersebut.

Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pola migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah menciptakan keunggulan ekonomi yang menarik mobilitas penduduk. Banyak orang memilih pindah ke wilayah lain untuk mencari peluang atau sumber daya yang tidak tersedia di daerah asal mereka, umumnya dengan alasan ekonomi. Biasanya, penduduk akan melakukan migrasi ke wilayah yang lebih dekat dengan pusat-pusat ekonomi yang unggul.

Di Sulawesi Selatan, fenomena migrasi penduduk berdasarkan usia produktif dapat dilihat dengan jelas pada grafik berikut, yang menunjukkan pola perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Fenomena ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana daya tarik ekonomi suatu wilayah dapat memengaruhi pola migrasi, terutama di kalangan penduduk usia produktif.

Grafik 2. 8
Persentase Penduduk Usia 15-29 Tahun Menurut Status Migran



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi Kabupaten Wajo dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, produktivitas padi, dan jumlah produksi perikanan.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2013 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9,67 persen. Saat itu, pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,98 persen, disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,68 persen, Real Estate sebesar 10,18 persen, dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,17 persen.

Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020, yang berada pada angka -1,17 persen. Angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,22 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang diakibatkan oleh pertumbuhan negatif pada beberapa lapangan usaha. Pertumbuhan negatif

tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai angka -8,12 persen, sementara pertumbuhan positif tertinggi dialami oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang dengan capaian 10,47 persen.

Di sisi lain, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 0,57 persen. Situasi ini diakibatkan oleh tumbuhnya produksi perikanan dan peternakan meskipun terjadi penurunan produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Tahun 2020, Kabupaten Wajo mengalami masa sulit dengan adanya dua bencana sekaligus, yaitu banjir yang terjadi pada bulan Juni-Juli serta kemarau yang terjadi pada bulan Januari-Februari. Faktor iklim dan bencana tersebut menyebabkan produksi tanaman pangan khususnya padi mengalami penurunan. Menurunnya produksi tanaman pangan dan perkebunan secara tidak langsung berdampak negatif pada beberapa lapangan usaha lain yang terkait, seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran. Selain itu, kontraksi pada kedua lapangan usaha tersebut juga diakibatkan dari Pandemi Covid-19. Pasar ditutup dan pembatasan pada jumlah penjual mengakibatkan berkurangnya aktivitas Perdagangan dan Industri Pengolahan. Bukan hanya Kabupaten Wajo, kabupaten lain yang berbatasan juga mengalami kontraksi akibat dampak pandemi. Gambaran pertumbuhan ekonomi selengkapnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (%)

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2013	6,92	6,3	7,23	7,62	5,78
2014	9,67	9,53	6,89	7,54	5,01
2015	7,07	8,3	5,11	7,19	4,88
2016	4,96	9,01	8,11	7,42	5,03
2017	5,21	8,41	8,29	7,21	5,07
2018	1,08	8,91	8,11	7,04	5,17
2019	4,06	7,01	7,69	6,91	5,02
2020	-1,17	-0,25	2,19	-0,71	-2,07
2021	6,77	5,53	6,15	4,64	3,7

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2022	2,38	5,23	6,18	5,09	5,31
2023	1,43	3,77	3,33	4,51	5,05

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2023 turun menjadi 1,43 persen, dimana pada tahun sebelumnya mencapai 2,38 persen. Pertumbuhan negatif terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Penurunan ini terjadi akibat dampak El Nino yang menahan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang selama ini menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian daerah. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya yang memberikan kontribusi sebesar 10,28 persen, disusul lapangan usaha real estate sebesar 8,75 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 7,42 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,12 persen.

Terdapat tiga sektor yang banyak menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Pertambangan dan Penggalian. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didukung oleh beberapa komoditas unggulan Kabupaten Wajo yang mendorong perekonomian daerah, antara lain padi, jagung, dan rumput laut.

Tabel 2. 23
Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Wajo Tahun 2014-2023

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	10.17	4.79	8.58	6.02	1.68	-1.76	0.57	6	8.4	-4.52
Pertambangan dan Penggalian	15.98	9.27	-4.55	-0.07	-15.33	8.3	-7.37	11.44	-12.4	2.47
Industri Pengolahan	5.2	6.86	7.79	6.3	5.57	4.64	-1.06	4.97	7.24	6.01
Pengadaan Listrik dan Gas	6.58	10.96	6.04	5.36	6.98	7.9	5.65	4.69	4.75	5.37
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4.01	0.82	3.37	6.96	8.08	5.36	10.47	9.12	3.86	5.25
Konstruksi	5.7	7.75	6.34	6.09	5.94	5.67	-0.63	3.06	-2.3	2.15

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8	7.03	8.18	7.93	8.18	5.64	-1.05	5.74	5.9	7.42
Transportasi dan Pergudangan	8.37	6.64	5.03	7.21	9.6	9.16	-8.12	7.25	8.08	3.11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.48	6.93	7.69	8.31	10.64	6.4	-3.08	12.42	11.45	7.12
Informasi dan Komunikasi	4.44	9.96	9.36	10.87	11.74	10.99	13.1	9.9	5	4.77
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.79	7.86	15.41	2.25	1.69	0.6	5.98	13.75	0.34	-4.27
Real Estate	10.18	8.53	6.57	6.12	5.32	5.9	-1.36	9.1	3.8	8.75
Jasa Perusahaan	6.5	5.46	7.76	7.89	10.84	10.44	-5.76	10.02	-6.9	6.21
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.41	7.69	-1.25	4.68	5.91	14.68	-0.73	1.22	-2.06	1.39
Jasa Pendidikan	4.79	8.14	7.62	8.71	9.51	6.14	2.69	4.7	5.45	3.44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.68	7.66	7.8	8.65	9.22	8.51	4.83	7.52	3.36	4.1
Jasa lainnya	7.34	7.11	8.63	11.56	12.95	7.78	-3.33	6.85	9.06	10.28
PDRB	9.67	7.06	4.96	5.21	1.08	4.06	-1.17	6.77	2.38	1.43

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir, dan mencapai Rp 63,61 juta pada tahun 2023. Jumlah pendapatan yang diperoleh setiap penduduk di Kabupaten Wajo tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi, dan berada pada urutan kelima tertinggi setelah Makassar, Luwu Timur, Pangkep dan Maros. Adapun perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Wajo dan perbandingannya dengan kabupaten tetangga dan nasional dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 24
Pendapatan Per kapita
Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, dan Provinsi Sulawesi Selatan
(Juta Rupiah/Orang/Tahun)

Tahun	Kabupaten Wajo	Kabupaten Bone	Kabupaten Soppeng	Provinsi Sulawesi Selatan
2013	29,77	22,79	23,95	31,03

Tahun	Kabupaten Wajo	Kabupaten Bone	Kabupaten Soppeng	Provinsi Sulawesi Selatan
2014	34,84	26,90	27,35	35,34
2015	38,45	32,36	30,27	39,95
2016	41,94	35,15	34,89	43,82
2017	45,08	39,04	39,19	47,82
2018	47,15	43,87	44,12	52,64
2019	49,31	47,81	47,83	57,18
2020	52,16	45,68	48,42	55,67
2021	58,55	48,67	52,67	59,65
2022	63,43	53,48	57,95	65,59
2023	63,61	57,02	62,58	69,70

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Peningkatan atau penurunan TPT menjadi pengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka semakin rendah tingkat kesempatan kerja yang tersedia, dan sebaliknya.

TPT Kabupaten Wajo menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun sejak tahun 2013 hingga 2023, dimana TPT tertinggi tercatat pada tahun 2015 sebesar 5,39 persen. Dalam tiga tahun terakhir, TPT Kabupaten Wajo terus menurun, dari tahun 2020 sebesar 4,33 persen turun sebesar 2,23 poin di tahun 2023 menjadi 2,1 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar dua orang penganggur. Capaian TPT tahun 2023 menempatkan Kabupaten Wajo pada posisi kelima TPT terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah berturut-turut Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Sinjai, dan Kepulauan Selayar. Gambaran TPT di Kabupaten Wajo disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 25
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2013	3,72	3,8	6,56	5,1	5,43
2014	4,9	5	2,4	5,08	5,94
2015	5,39	4,36	2,96	5,95	6,18
2016	N/A	N/A	N/A	4,8	5,61
2017	3,06	4,55	2,71	5,61	5,5
2018	3,79	2,82	2,66	4,94	5,3
2019	3	3,01	3,24	4,62	5,23
2020	4,33	3,2	4,42	6,31	7,07
2021	4,32	4,15	3,92	5,72	6,49
2022	2,54	2,27	3,4	4,51	5,86
2023	2,1	2,88	4,34	4,33	5,32

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati. Jika disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja maka TPAK tinggi menunjukkan partisipasi yang baik. Namun jika TPAK tinggi disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. TPAK Kabupaten Wajo menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2018 hingga 2023, yang berada pada kisaran angka 59 hingga 65. Tahun 2023, TPAK mengalami peningkatan menjadi 65,78 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 61,13 persen.

Berita resmi statistik yang dirilis BPS Kabupaten Wajo menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebanyak 199.077, turun 1.198 orang dibanding tahun 2022. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 195.183 orang, turun sebanyak 94.894 dari tahun sebelumnya. Peningkatan TPAK dipengaruhi oleh kestabilan kondisi ekonomi, peluang kerja dan motivasi untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, serta pendidikan atau keterampilan.

Tabel 2. 26
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Wajo Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK Kabupaten Wajo	59,12	62,82	65,99	64,58	61,13	65,78
TPAK Perempuan	39,16	44,91	47,88	45,78	39,65	47,64
TPAK Laki-Laki	82,87	82,97	86,33	85,69	85,22	85,46

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja perempuan yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dibandingkan penduduk laki-laki. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,46 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya sebesar 47,46 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 7.99 poin. Kondisi ini berbeda di tingkat provinsi, dimana tahun 2023 justru turun menjadi 49,62 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 50,46 persen.

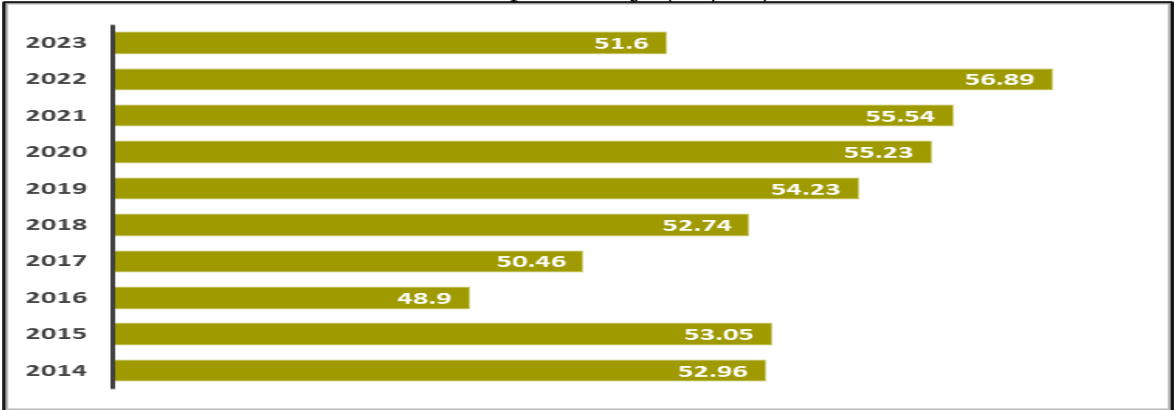
Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Kondisi di Kabupaten Wajo, dari waktu ke waktu TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. TPAK tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, terdapat 85 orang di antaranya yang termasuk angkatan kerja, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 47 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki masih mendominasi dunia kerja.

2.2.1.5. Produktivitas Padi

Indikator aspek kesejahteraan ekonomi lainnya yang perlu diperhatikan adalah Produktivitas Padi yang menunjukkan rata-rata hasil produksi padi per satuan luas dalam satu tahun. Sejak tahun 2014, produktivitas padi Kabupaten Wajo bergerak dari 48,9 kuintal per hektar hingga 56,89 kuintal per hektar. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang meningkat sebanyak 5,29 kuintal per hektar dari tahun 2021. Peningkatan produktivitas tersebut terjadi karena meningkatnya luas areal tanam pada tahun 2022 menjadi 67 hektar, sebagai dampak dari curah hujan yang mendukung, adanya

penambahan bantuan benih padi dari pemerintah provinsi, serta bantuan sarana dan prasarana pertanian baik dari provinsi maupun pusat.

Tabel 2. 27
Produktivitas Padi di Kabupaten Wajo (Ku/Ha) Tahun 2014-2023



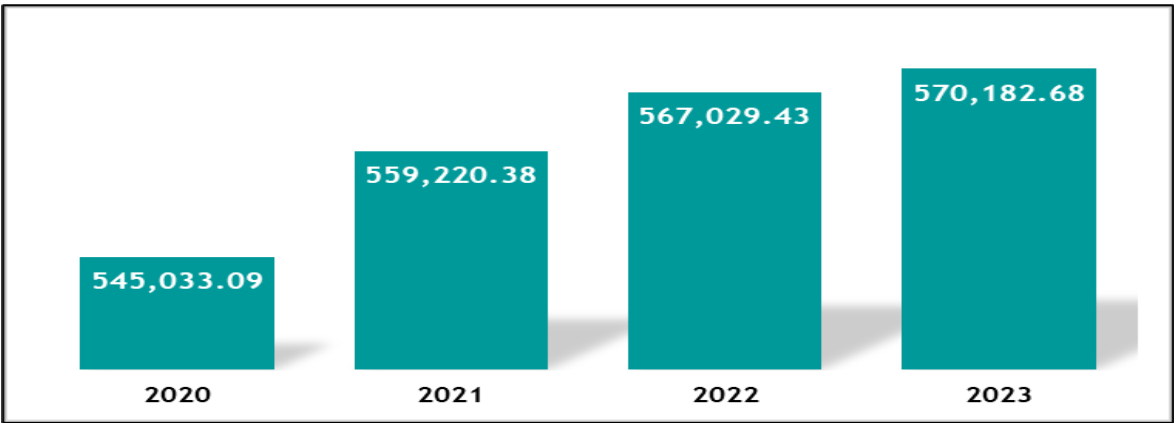
Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.6. Jumlah Produksi Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jumlah produksi perikanan merupakan nilai total produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Produksi perikanan di Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, yaitu dari 545.033,09 ton menjadi 570.182,68 ton atau terjadi bertumbuh sebesar 4,41 persen. Hal ini terjadi karena dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, antara lain pelaksanaan *restocking* atau penebaran benih ikan setiap tahun yang bertujuan untuk menyeimbangkan populasi perikanan, peningkatan produksi udang vaname, peningkatan minat budidaya kolam dan minapadi, pengembangan budidaya sistem bioflok pada lahan yang terbatas, serta tersedianya sarana penangkapan yang memadai.

Tabel 2. 28
Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Wajo (ton)
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

Selain aspek kesejahteraan ekonomi, gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo dapat diketahui dari kesejahteraan sosial budaya yang ditunjukkan oleh beberapa kondisi bidang kesehatan, perlindungan sosial, agama dan kebudayaan, serta keluarga dan kesetaraan gender.

2.2.2.1. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Gambaran kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Wajo dapat diketahui dengan melihat usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak, penanganan Tuberkulosis serta cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesehatan ibu dan anak diwakili oleh beberapa indikator, yaitu persentase persalinan di fasilitas kesehatan, jumlah kematian ibu, dan prevalensi stunting pada balita. Sedangkan penanganan Tuberkulosis diwakili oleh cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, serta angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis. Gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Wajo Tahun 2014-2023

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
UHH (tahun)	65,93	66,23	66,38	66,52	66,79	67,17	72,49	72,62	72,97	73,25
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	77,1	96,1	96,1	95,5	90,9	93	96,9	100	100	99
Prevalensi Stunting pada Balita (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36,6	36,6	22,6	28,6	27,4
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	109,09	93	96,54	53,5	51,32	66,28	44.87	62,29	78.62	71,27

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	86	89	87	89	84,62	86,99	88,64	89,24	93.81	89,07
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82,32	84,85	88,63	81,73

Sumber: BPS, 2023 (Diolah); Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2023

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat, dengan melihat rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Bayi yang lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Wajo memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,25 tahun, meningkat 7,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2014.

Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah indikator untuk melihat kualitas dan akses layanan kesehatan. Kebijakan pemerintah bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bermaksud untuk menjaga kesehatan ibu dan mengurangi jumlah kematian ibu dan bayi. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun di Kabupaten Wajo mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat. Sekitar 90 hingga 100 persen ibu hamil di Kabupaten Wajo melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 2015 hingga 2023, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai angka 77,1 persen. Persalinan ibu di fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan.

Jumlah Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan maternal dalam suatu wilayah, baik saat hamil, persalinan, maupun pascapersalinan. Tingginya jumlah kematian ibu mencerminkan beberapa kondisi atau masalah dalam sistem kesehatan dan masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, kualitas perawatan kesehatan, faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan

ketidaksetaraan gender, kesehatan umum populasi termasuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular serta akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan gizi yang memadai, serta efektivitas pengaturan kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan.

Jumlah kematian ibu dalam kurun waktu 10 tahun di Kabupaten Wajo mengalami tren fluktuatif yang cenderung menurun. Jumlah kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang mencapai 10 kematian ibu, sedangkan jumlah kematian terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai satu orang. Namun kematian ibu mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 6 orang dari 5.787 jumlah kelahiran hidup.

Prevalensi Stunting pada Balita merupakan indikator lain yang digunakan untuk memperoleh gambaran kesejahteraan sosial masyarakat melalui bidang kesehatan. Survei Status Gizi Indonesia memberikan gambaran status gizi balita (*stunting, wasting, underweight, overweight*) yang determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Stunting pada balita merupakan kondisi anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik khususnya tinggi badan, yang terjadi akibat malnutrisi atau kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang.

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Wajo memiliki tren fluktuatif dalam kurun tahun 2019 hingga 2023. Penurunan prevalensi terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2021, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 28,6 persen. Laju penurunan prevalensi yang terjadi cukup lambat bahkan tidak mencapai target SSGI. Seperti tahun 2023, prevalensi stunting pada balita mencapai 27,4 persen, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 1,2 poin, akan tetapi belum mencapai target SSGI yang menetapkan prevalensi sebesar 16 persen. Bahkan seluruh capaian selama tahun 2019 hingga 2023 masih berada di bawah provinsi dan nasional.

Beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata.

Indikator bidang kesehatan lainnya untuk menggambarkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*), yang dilakukan melalui program DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*). Program ini merupakan pendekatan terstandar dalam penemuan dan pengobatan tuberkulosis (TB) yang direkomendasikan oleh WHO, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien TB yang ditemukan menerima pengobatan yang tepat dan diawasi dengan baik. Secara umum, proporsi kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS mengacu pada jumlah kasus TB yang secara aktif diidentifikasi, didiagnosis, dan ditangani melalui program ini dibandingkan dengan total kasus TB yang ada dalam populasi.

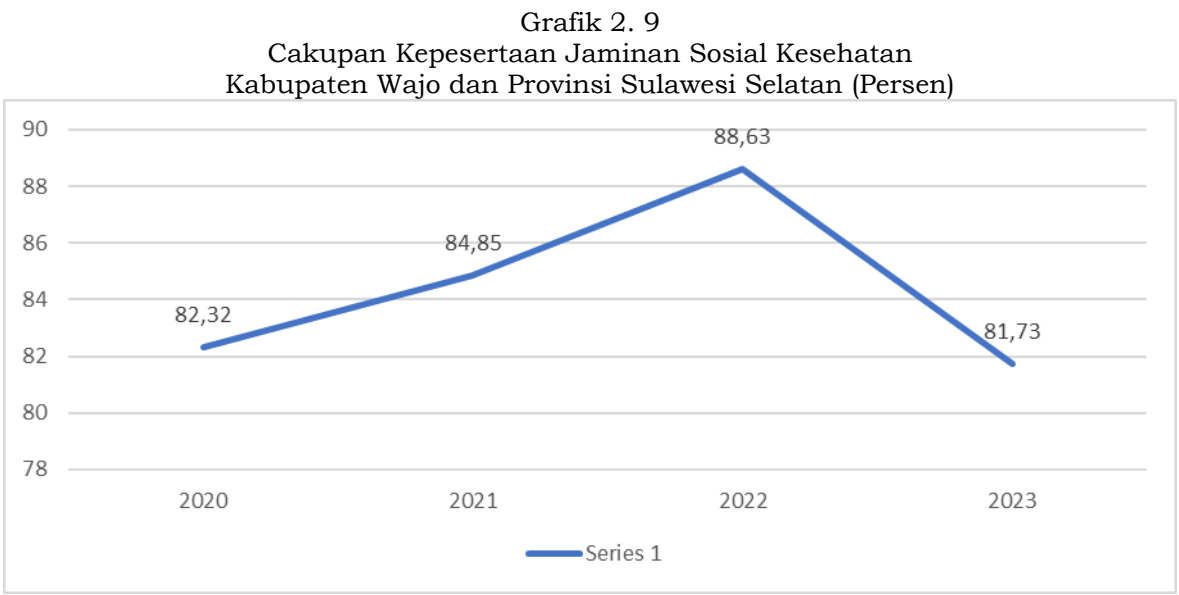
Cakupan jumlah kasus TB yang terdeteksi di Kabupaten Wajo dari tahun 2014 hingga 2023 berfluktuasi, dimana penurunan terendah terjadi di tahun 2020 menjadi 44,87 persen seiring dengan wabah Covid-19. Tahun 2023 juga terjadi penurunan penemuan dan pengobatan kasus menjadi 71,27 persen. Berbagai upaya masih perlu ditingkatkan khususnya dalam penemuan kasus dalam bentuk skrining secara aktif, intensif dan masif pada kelompok masyarakat berisiko terhadap penularan TBC.

Dalam penanganan TB, indikator penting lainnya yang perlu dicermati adalah Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) yaitu jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Indikator ini menggambarkan kualitas pengobatan TB, dengan angka keberhasilan minimal 90 persen (WHO). Capaian Kabupaten Wajo tahun 2014 hingga 2023 fluktuatif dan berkisar 86 hingga 93 persen. Capaian terendah terjadi tahun 2014, yaitu sebesar 86 persen, yang berarti bahwa dari 100 kasus TB yang ditemukan dan ditangani, hanya 86 kasus diantaranya yang berhasil diobati. Capaian tertinggi terjadi tahun 2022, sebesar 93,81 persen.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional juga dapat menjadi indikator untuk menggambarkan aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap penduduk secara menyeluruh, agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Jaminan Kesehatan Nasional diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan

medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Kepesertaan JKN Kabupaten Wajo meningkat dari 82,32 persen di tahun 2020 menjadi 88,63 persen di tahun 2022. Beberapa faktor yang memberikan peluang terjadinya peningkatan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, aksesibilitas terhadap fasilitas pendaftaran dan layanan kesehatan termasuk di wilayah perdesaan, implementasi kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan terhadap perluasan cakupan jaminan kesehatan, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Meskipun demikian, berdasarkan capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2020 hingga 2023, Kabupaten Wajo belum mampu mencapai *universal health coverage*.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, 2023

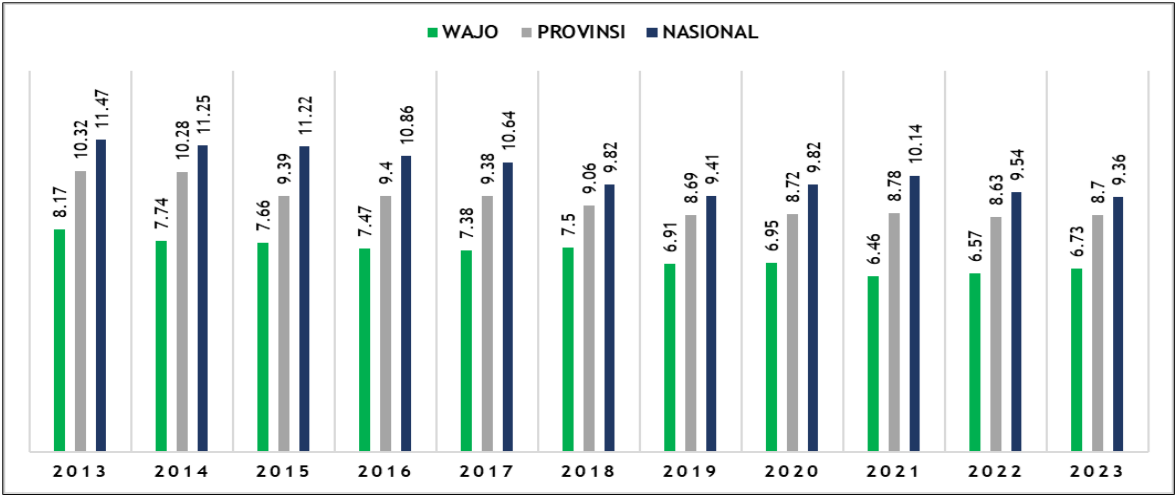
2.2.2.2. Kondisi Perlindungan Sosial

Gambaran aspek kesejahteraan sosial budaya pada lingkup perlindungan sosial di Kabupaten Wajo dicerminkan dari kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Gini, persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, dan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tingkat Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dapat menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan membatasi partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wajo dalam kurun tahun 2013 hingga 2023

mengalami tren penurunan, dari 8,17 persen tahun 2013 menjadi 6,73 persen di tahun 2023 atau turun sebanyak 2,44 persen.

Grafik 2. 10
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)



Sumber: BPS, 2013-2023 (Diolah)

Tabel 2. 30
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (%)

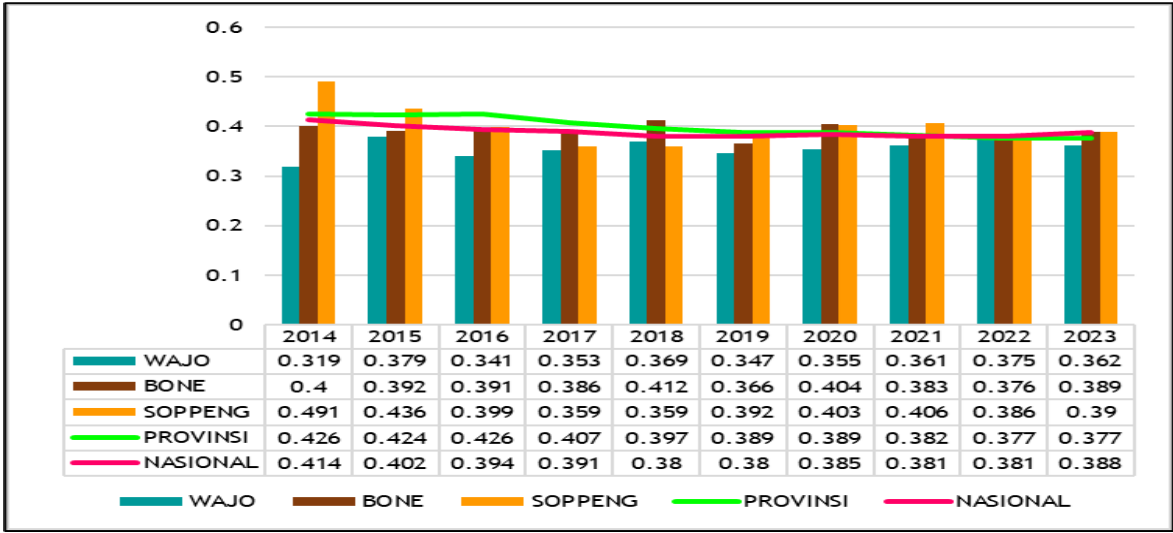
TAHUN	WAJO	PROVINSI	NASIONAL
2013	8,17	10,32	11,47
2014	7,74	10,28	11,25
2015	7,66	9,39	11,22
2016	7,47	9,4	10,86
2017	7,38	9,38	10,64
2018	7,5	9,06	9,82
2019	6,91	8,69	9,41
2020	6,95	8,72	9,82
2021	6,46	8,78	10,14
2022	6,57	8,63	9,54
2023	6,73	8,7	9,36

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Indeks Gini merupakan ukuran ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu wilayah. Indeks Gini Kabupaten Wajo sejak tahun 2014 mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat hingga tahun 2023,

yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Rata-rata indeks gini Kabupaten Wajo berkisar 0,319 hingga 0,379 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam kategori ketimpangan moderat. Capaian tertinggi terjadi tahun 2015 sebesar 0,379, yang merupakan angka indeks gini tertinggi dalam kurun 10 tahun. Meskipun demikian, rata-rata indeks gini Kabupaten Wajo masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, begitu pula dengan provinsi dan nasional.

Grafik 2. 11
Indeks Gini Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2013-2023 (Diolah

Tabel 2. 31
Indeks Gini Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

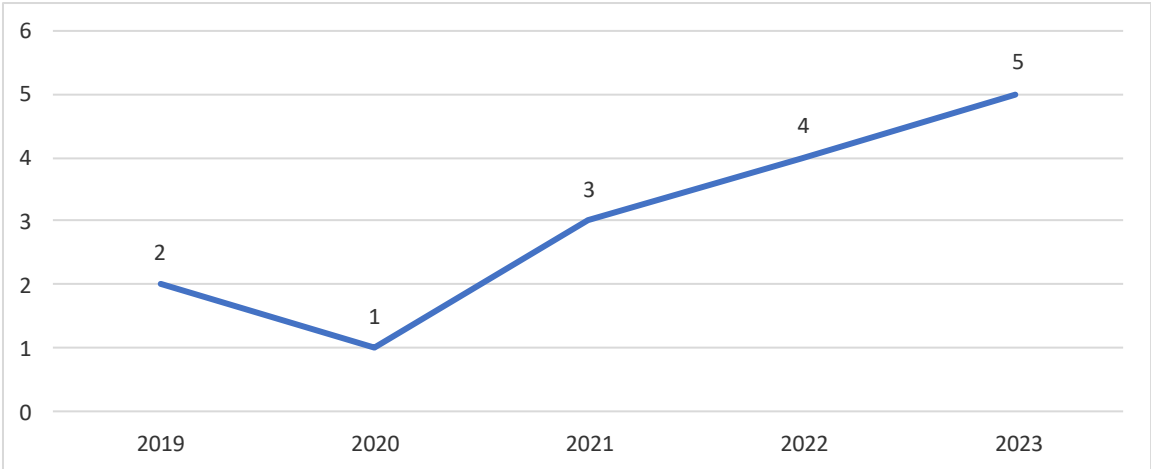
TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2014	0,319	0,400	0,491	0,426	0,414
2015	0,379	0,392	0,436	0,424	0,402
2016	0,341	0,391	0,399	0,426	0,394
2017	0,353	0,386	0,359	0,407	0,391
2018	0,369	0,412	0,359	0,397	0,380
2019	0,347	0,366	0,392	0,389	0,380
2020	0,355	0,404	0,403	0,389	0,385
2021	0,361	0,383	0,406	0,382	0,381
2022	0,375	0,376	0,386	0,377	0,381

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2023	0,362	0,389	0,390	0,377	0,388

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal penting untuk diketahui, karena hal ini mencerminkan inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia kerja. Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan implementasi dari hak asasi manusia dan kesetaraan, sekaligus membantu mengurangi stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas, sekaligus mendorong perubahan budaya organisasi menuju lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu, keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi dan kontribusi mereka dalam pasar kerja. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Wajo tahun 2020 hanya satu persen, yang selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai angka 5 persen.

Grafik 2. 12
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023



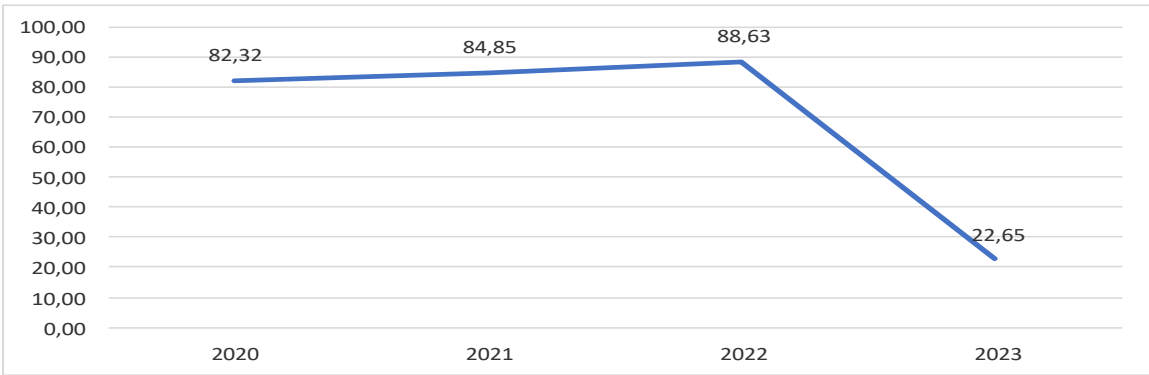
Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di suatu negara atau wilayah terlindungi oleh program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual dan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja adalah

suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah program jaminan sosial yang menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja atau buruh. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial, tingkat formalitas pekerjaan, serta dukungan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2022 terdapat sekitar 23.419 peserta Jamsostek yang mencakup beberapa pekerjaan diantaranya yaitu sektor industri, sektor jasa, sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor lainnya. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Wajo mengalami tren peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Tahun 2020, peserta program Jamsostek sebesar 82,32 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 88,63 persen. Akan tetapi pada tahun 2023, peserta program BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan menjadi 22,65 persen akibat bertambahnya pekerja atau buruh yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek pada sektor formal tempat mereka bekerja.

Grafik 2. 13
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.2.3. Kondisi Bidang Keagamaan dan Kebudayaan

Kondisi bidang keagamaan dan kebudayaan menjadi gambaran aspek kesejahteraan bidang sosial budaya, yang diukur melalui persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap

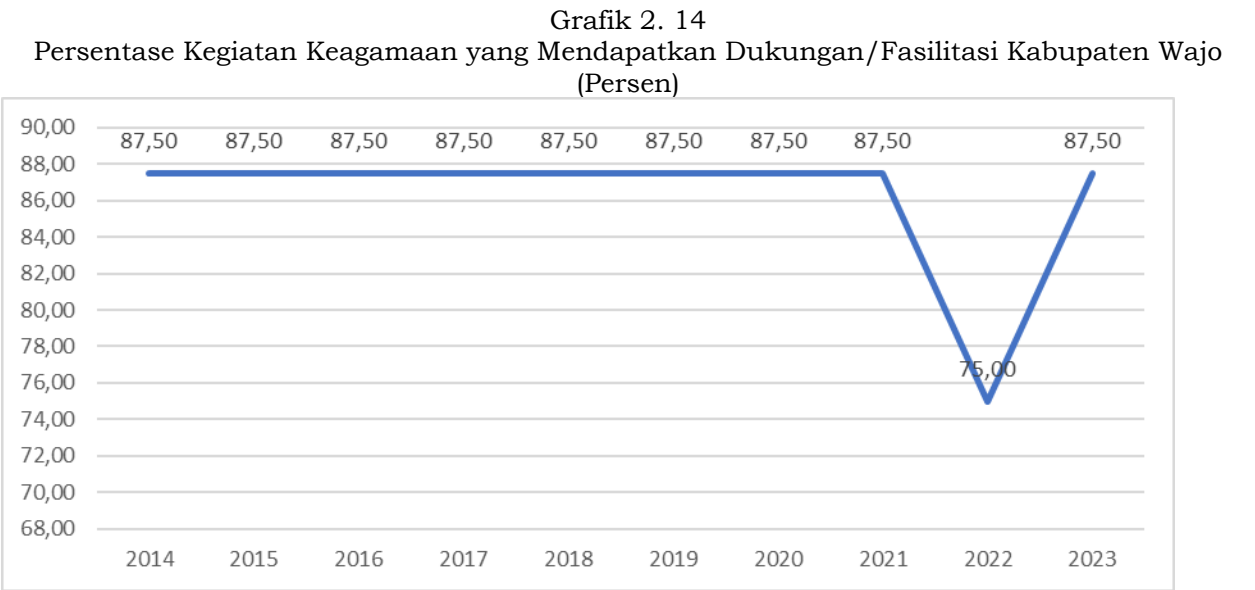
total registrasi, serta persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah.

Cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang berada di darat dan/atau di air.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat kepribadian bangsa. Saat ini di Kabupaten Wajo persentase benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan sudah 21 persen terhadap total yang sudah diregistrasi.

Adapun untuk kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi sebagai berikut:

- Kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Kegiatan Hari Raya Idul Fitri
- Kegiatan Hari Raya Idul Adha
- Pawai Tahun Baru Islam
- Maulid Nabi Muhammad SAW
- STQH (Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits)
- MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran)
- Penataran Mubaligh



Sumber: Pemerintah Kabupaten Wajo, 2023 (Diolah)

2.2.2.4. Kondisi Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender

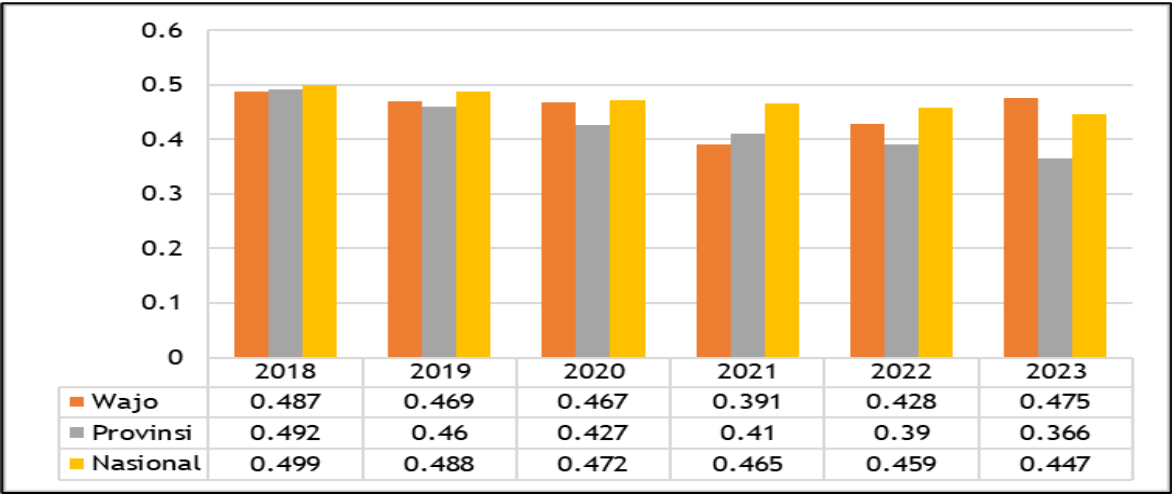
Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Wajo dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, dan indeks ketimpangan gender.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dipengaruhi oleh dimensi kualitas legalisasi dan struktur, dimensi kualitas ketahanan fisik, dimensi kualitas ketahanan ekonomi, dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya. Selama ini, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengukuran IKK terhadap provinsi, namun tidak untuk kabupaten/kota, sehingga tidak terdapat data terkait indikator ini.

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator untuk mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Indikator ini dibentuk dari indeks perlindungan khusus anak dan indeks perlindungan hak anak. Indeks perlindungan anak Kabupaten Wajo tahun 2023 berada di angka 57,2, namun angka tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 60,37.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Wajo pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan, dari 0,487 tahun 2018 turun sebesar 0,096 poin menjadi 0,391 tahun 2021. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut, terjadi perbaikan terhadap dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan gender. Misalnya, perbaikan dimensi kesehatan reproduksi yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan hingga tahun 2021. Akan tetapi, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kembali meningkat menjadi 0,428 tahun 2022 dan naik menjadi 0,475 di tahun 2023. Bahkan IKG tahun 2023 tersebut melebihi capaian IKG provinsi yang hanya mencapai 0,366 dan nasional sebesar 0,447.

Grafik 2. 15
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2023



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Tabel 2. 32
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Tahun	Wajo	Sulawesi Selatan	Nasional
2018	0,487	0,492	0,499
2019	0,469	0,46	0,488
2020	0,467	0,427	0,472
2021	0,391	0,41	0,465
2022	0,428	0,39	0,459
2023	0,475	0,366	0,447

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.3. Aspek Daya Saing

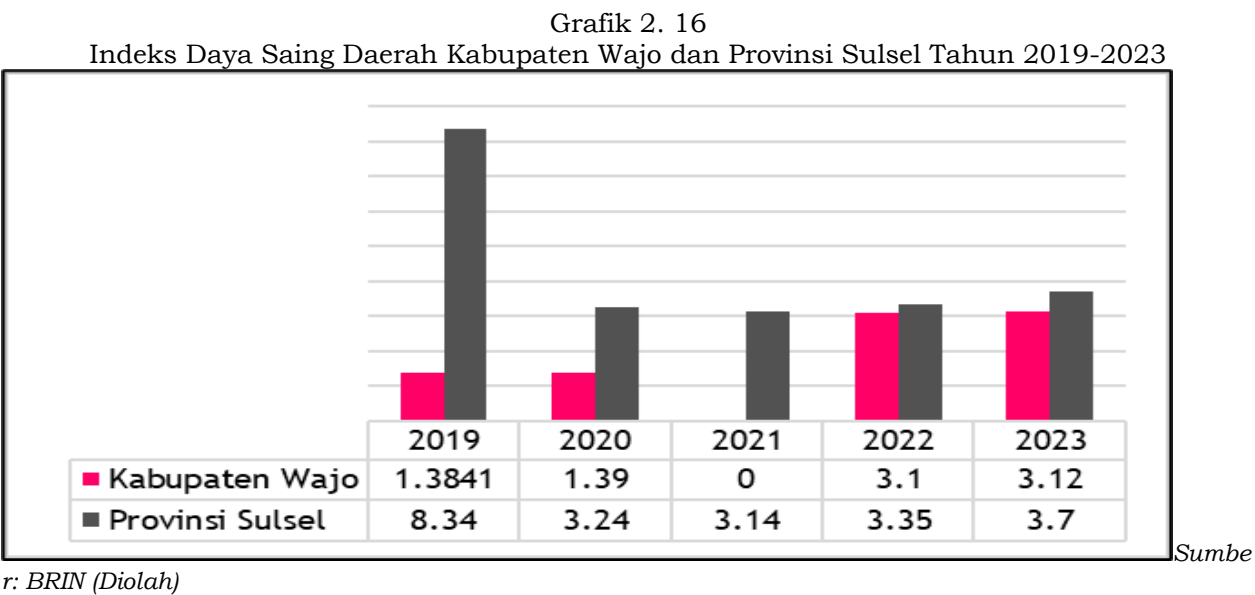
2.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Indikator untuk mengukur daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah, dimana pengukurannya dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wajo sejak 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan namun belum setara dengan daya saing provinsi. IDSD terendah dicapai pada tahun 2019 sebesar 1,3814 sementara indeks tertinggi sebesar 3,12 yang diperoleh tahun 2023.

IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi. Keempat komponen tersebut diterjemahkan menjadi 12 pilar daya saing, meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Berdasarkan skor 12 pilar pembangun daya saing daerah, capaian pilar terendah tahun 2023 adalah pilar ke-9 (sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian) yang hanya mencapai skor 1,77, diikuti pilar ke-12 (kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah) dengan skor 2,22, dan pilar ke-2 (infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah) dengan skor 2,31. Adapun capaian tertinggi pada pilar ke-3 (adopsi TIK) yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0) dengan skor 4,69.



2.3.2. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu daerah dapat bersaing dalam konteks ekonomi regional, nasional, maupun global. Daya saing ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi, yang diindikasikan melalui kondisi PDRB industri pengolahan, pariwisata, kewirausahaan dan koperasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, ekspor barang dan jasa, pajak dan retribusi, serta inflasi.

Tabel 2. 33
Kondisi Capaian Indikator Produktivitas Ekonomi Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,04	4.02	3,83	3,90	4,15
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,36	0,36	0,36	0,38	0,40
Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	83.006	26.975	29.222	39.392	347.416
Jumlah industri kecil dan menengah (industri)	12.465	13.009	13.877	15.175	15.928
Persentase koperasi sehat (%)	N/A	3.36	4,69	6,00	6,21
Return on Asset (ROA) BUMD (%)	3,18	9,41	15,12	19,32	16,73

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan mencerminkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah ekonomi pada suatu wilayah, yang berasal dari kegiatan pengolahan barang, konstruksi dan sektor-sektor manufaktur lainnya. Pengembangan sektor industri pengolahan dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi sekaligus membuka lapangan kerja. Perkembangan industri pengolahan Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung meningkat. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan rasio

PDRB industri pengolahan dari 0,04 persen di tahun 2019 menjadi 4,15 persen pada tahun 2023.

2.3.2.2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum merupakan indikator sektor pariwisata yang menggambarkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Jasa akomodasi makan dan minum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari objek wisata dan wisatawan. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Wajo menunjukkan tren peningkatan selama 2019 hingga tahun 2023, yaitu dari 0,36 persen di tahun 2019 menjadi 0,40 di tahun 2023. Akan tetapi pertumbuhannya tidak signifikan, karena rasio PDRB tersebut konsisten pada angka 0,36 persen sejak tahun 2019 sampai 2021.

2.3.2.3. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Indikator lain yang menggambarkan kondisi sektor pariwisata adalah Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara. Sejak tahun 2019, terjadi penurunan jumlah tamu wisatawan dari 83.006 orang menjadi 26.975 orang di tahun 2020, atau berkurang sebesar 67,5 persen. Penurunan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara tersebut terjadi akibat pandemi Covid-19, sebagai dampak pemberlakuan pembatasan penerbangan, larangan perjalanan, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun peningkatan signifikan terjadi tahun 2023, dari 39.392 orang wisatawan di tahun sebelumnya menjadi 347.416 orang di tahun 2023 atau bertumbuh sebesar 88,66 persen.

2.3.2.4. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Persentase Koperasi Sehat

Kondisi sektor kewirausahaan dan koperasi diindikasikan melalui jumlah industri kecil dan menengah, serta persentase koperasi sehat. Gambaran kewirausahaan di Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Sektor ini diindikasikan oleh Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun 2021 yang mencapai 13.877 IKM, lalu meningkat menjadi 15.928 IKM di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah IKM sebanyak 1.298 IKM atau pertumbuhan industri sebesar 8,55 persen. Adapun kondisi koperasi di Kabupaten Wajo juga terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh Persentase Koperasi Sehat yang bertumbuh dari 3,36 persen di tahun 2019 menjadi 6,21 persen di tahun

2023. Koperasi sehat merupakan koperasi yang mampu memenuhi aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

2.3.2.5. *Return on Asset (ROA) BUMD*

Return on Asset (ROA) BUMD merupakan alat ukur seberapa efektif BUMD dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. RoA yang tinggi menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, sementara capaian RoA yang rendah mengindikasikan bahwa BUMD perlu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. RoA BUMD Kabupaten Wajo pada tahun 2019 sebesar 3,18 persen, meningkat menjadi 19,32 persen di tahun 2022, namun menurun di tahun 2023 menjadi 16,73 persen. Daya saing ekonomi yang telah diuraikan dalam beberapa indikator tersebut perlu dibangun dalam kerangka keberlanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau.

2.3.2.6. Indeks Ekonomi Hijau

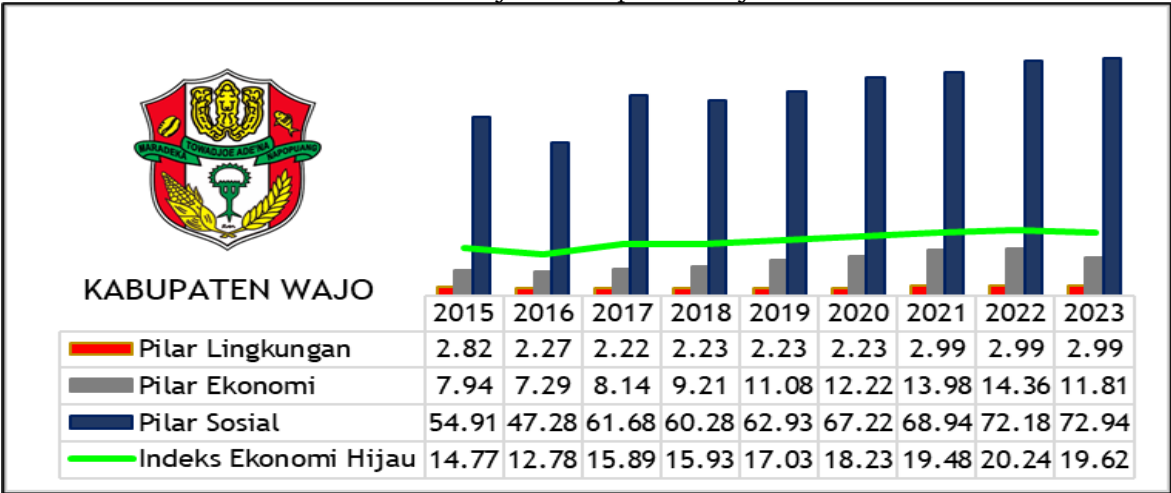
Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks komposit ini terdiri dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, dengan skala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Indeks ekonomi hijau Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2015 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat. Meskipun pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat di tahun 2017 bahkan melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2018, Indeks Ekonomi Hijau terus meningkat hingga tahun 2022 dengan capaian 20,24, lalu kembali menurun menjadi 19,62 di tahun 2023.

Capaian indeks ini selama kurun waktu 9 tahun berada pada kisaran 12,78 hingga 20,24 dan sangat dipengaruhi oleh pilar sosial. Akan tetapi,

capaian tersebut masih berada di bawah angka 25 atau level kurang, yang berarti bahwa Kabupaten Wajo belum bertransformasi menuju ekonomi hijau.

Grafik 2. 17
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Wajo Tahun 2015-2023

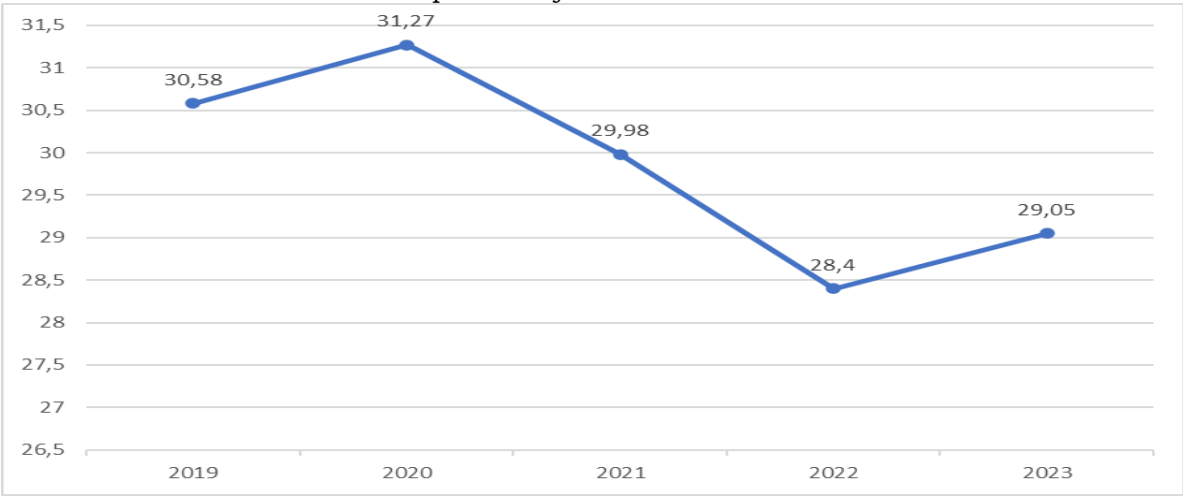


Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulsel

2.3.2.7. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen dalam PDRB dari sisi pengeluaran yang memberikan indikator untuk mengetahui pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Datam menunjukkan PMTB Kabupaten Wajo mengalami fluktuasi dengan tren yang menurun dari 30,58 persen di tahun 2019 menjadi 29,05 persen di tahun 2023. Meskipun sedikit menurun, peran PMTB di Kabupaten Wajo masih tetap signifikan karena hampir sepertiga dari PDRB berasal dari komponen tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan investasi punya daya ungkit yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2. 18
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2019-2023 (Diolah)

2.3.2.8. Net Ekspor Barang dan Jasa

Daya saing ekonomi daerah juga dapat ditunjukkan melalui Net Ekspor Barang dan Jasa melalui kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu daerah sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Wajo sejak tahun 2014 hingga 2021

Hal ini dapat terlihat pada data tahun 2014-2021 yang masih di angka minus, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yang sebelumnya pada tahun 2021 di angka -0,7 persen meningkat menjadi 1,93 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi yang berada di angka -0,5 persen di tahun 2022. Namun capaian ini masih jauh di bawah rata-rata nasional pada tahun yang sama, dengan ekspor barang dan jasa sebesar 20,9 persen. Berikut data yang dimaksud.

Tabel 2. 34
Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (% PDRB)

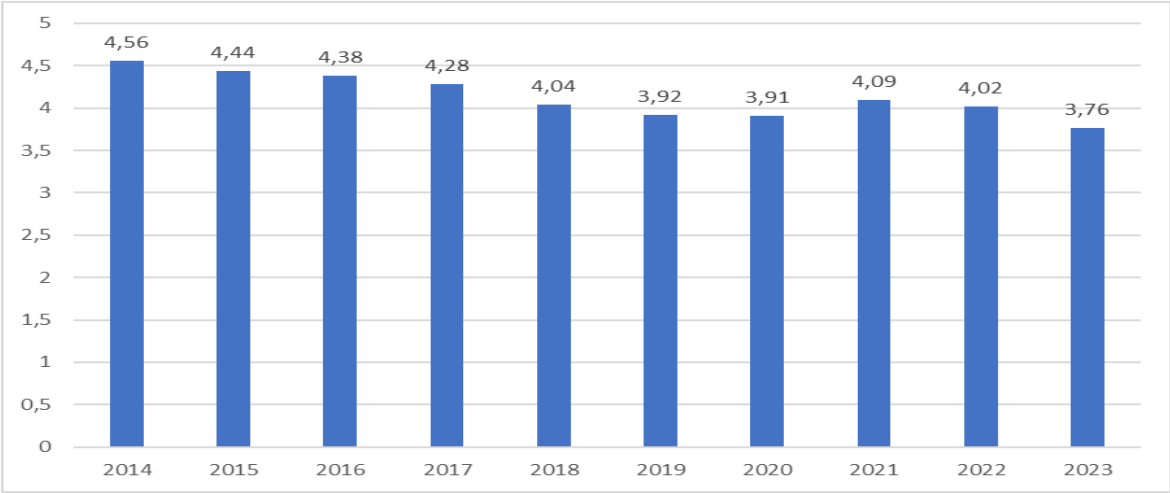
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten	-0,6	-2,96	-2,5	-0,58	-4	-2,49	-3,26	-0,7	1,93	-1,14
Provinsi	-4	-5,41	-4,12	-3,22	-2,97	-3,3	16,09	-3,05	-0,35	
Nasional	24,41	20,78	18,33	19,18	22,07	19,04	15,64	18,79	20,9	

Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

2.3.2.9. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi

Hal penting lainnya yang perlu dicermati untuk menggambarkan daya saing daerah adalah Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi. Data menunjukkan Kontribusi PDRB Kabupaten Wajo terhadap terhadap provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,76 persen di tahun 2023. Angka ini turun dari posisi 4,56 persen di tahun 2014, sekaligus mencerminkan bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Wajo masih relatif lambat dibanding rata-rata peningkatan PDRB kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2. 19
Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Wajo terhadap Provinsi
Tahun 2014-2023



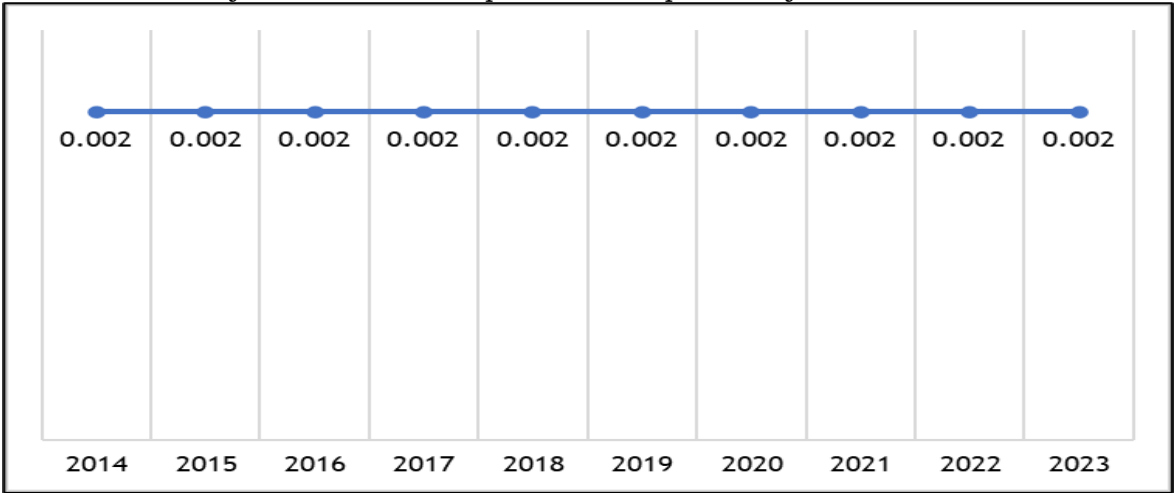
Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

Daya saing ekonomi daerah terkait erat dan dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro daerah. Daya saing ekonomi daerah yang baik dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ini, jika berkelanjutan dan stabil, dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi makro di tingkat daerah. Stabilitas ekonomi makro berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, seperti inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang konsisten, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan daya saing ekonomi daerah. Gambaran stabilitas ekonomi makro daerah di Kabupaten Wajo dapat dilihat dari kondisi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Tingkat Inflasi.

2.3.2.10. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan kinerja penerimaan pajak daerah untuk membiayai keperluan daerah melalui sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka ketergantungan terhadap pembiayaan melalui hutang akan semakin berkurang. Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Wajo sejak tahun 2014 hingga 2023 konsisten di angka 0,002.

Grafik 2. 20
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Wajo Tahun 2014-2023



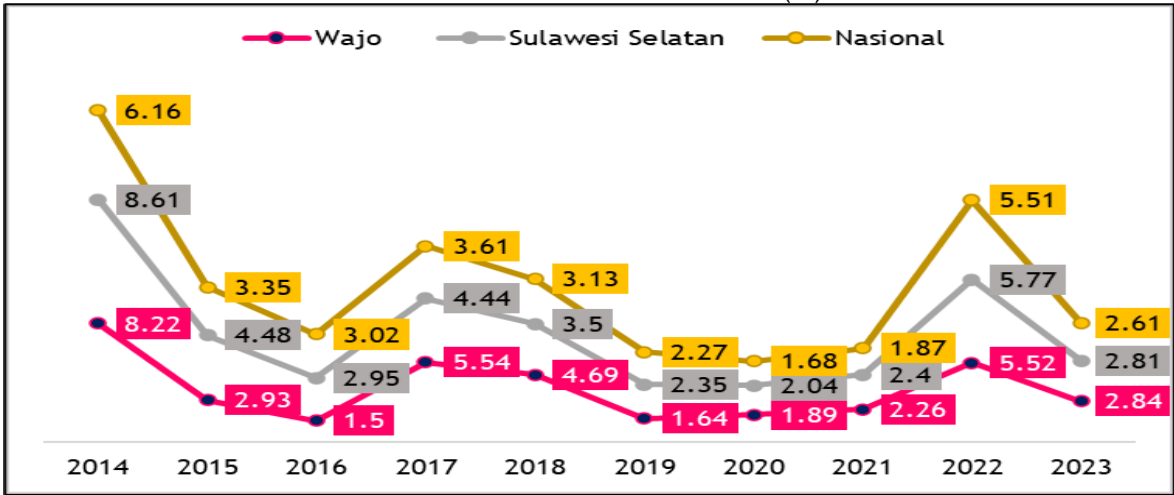
Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

2.3.2.11. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi adalah ukuran yang penting untuk memahami tingkat perubahan daya beli uang dan stabilitas ekonomi yang mengacu pada tingkat pertumbuhan harga-harga umum barang dan jasa di suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu. Tingkat inflasi di Kabupaten Wajo menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2023. Laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,27 persen namun dapat terkendali hingga mengalami penurunan menjadi 2,93 persen di tahun 2015. Tingkat inflasi yang fluktuatif di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional di beberapa tahun selanjutnya cenderung memiliki pergerakan yang hampir sama.

Pencatatan indeks harga konsumen (IHK) Kabupaten Wajo merujuk pada wilayah Watampone. Berdasarkan BPS, tahun 2023 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) sebesar 2,81 persen dengan IHK sebesar 117,35. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi *(y-on-y)* tertinggi terjadi di Makassar sebesar 2,89 persen dengan IHK sebesar 117,49. Sedangkan inflasi *(y-on-y)* terendah terjadi di Palopo sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 115,60. Komoditas utama penyumbang inflasi *(y-on-y)* pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang.

Grafik 2. 21
Tingkat Inflasi Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2014-2023 (%)



Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

Pembangunan perdesaan memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing ekonomi daerah, karena perdesaan merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi suatu daerah. Pembangunan perdesaan yang terarah dan terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi disparitas antara perkotaan dan perdesaan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk.

2.3.2.11. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan perdesaan di Kabupaten Wajo, dengan melakukan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa. Indikator ini ditentukan dengan mengelompokkan desa menjadi 5 klasifikasi status, yaitu status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Desa mandiri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa secara keseluruhan.

Dari hasil verifikasi tingkat kabupaten, hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Wajo Tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

Status Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	22	6	3	0	0
Berkembang	109	119	110	96	82
Maju	11	17	27	40	52
Mandiri	0	0	2	6	8
Jumlah Desa	142	142	142	142	142
Persentase Desa Mandiri (%)	0	0	1,41	4,23	5,63

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, 2023

2.3.3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.3.1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Dalam Literasi Membaca Dan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional

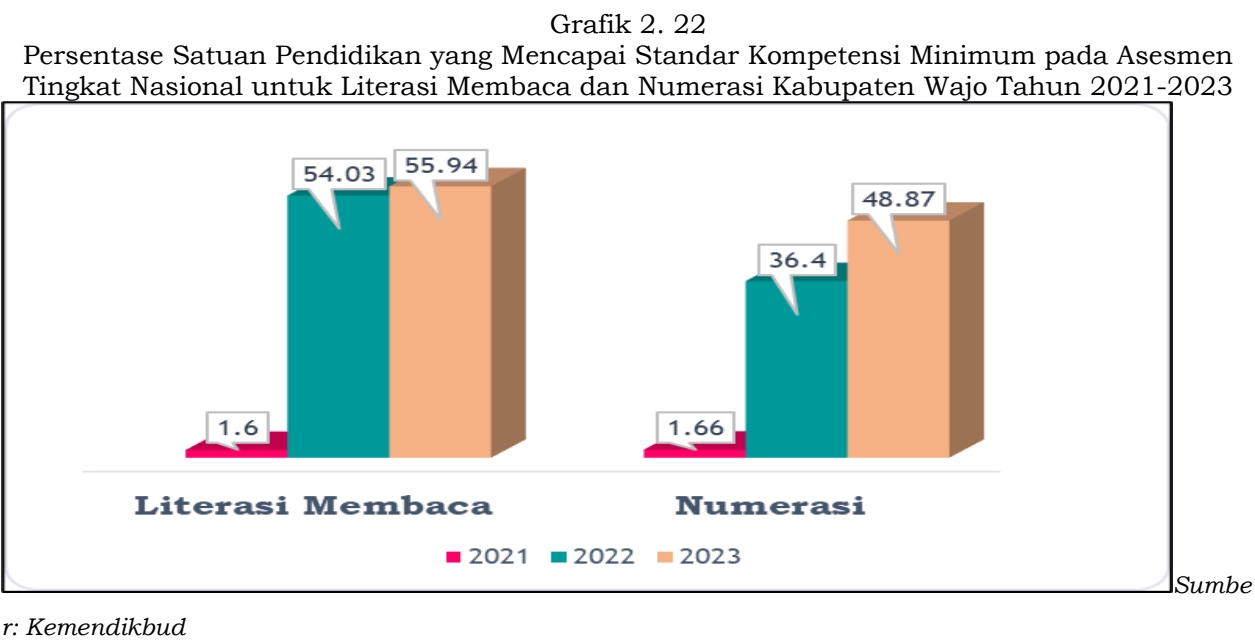
Daya saing sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja dan dalam ekonomi secara keseluruhan. Tingginya daya saing sumber daya manusia berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing ini di tingkat nasional maupun daerah. Di Kabupaten Wajo, gambaran daya saing sumber daya manusia dapat dilihat melalui beberapa indikator pendidikan.

Salah satu indikator utama untuk menilai kemajuan sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan, yang tercermin dari hasil capaian literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuannya dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik informasional maupun fiksi. Sementara itu, kemampuan numerasi mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuannya berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan.

Di Kabupaten Wajo, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca dan numerasi pada asesmen tingkat nasional mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2023. Pada tahun

2021, kemampuan literasi membaca meningkat secara signifikan, dari hanya 1,6 persen menjadi 54,03 persen, atau naik sebesar 52,43 persen. Kemajuan ini berlanjut dari tahun 2022 ke 2023, dengan peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar minimum literasi membaca dari 54,03 persen menjadi 55,94 persen.

Kemajuan serupa terlihat dalam kemampuan numerasi. Pada tahun 2022, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi sebesar 36,4 persen, meningkat menjadi 48,87 persen pada tahun 2023. Namun, meskipun terjadi peningkatan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo masih belum mencapai standar kompetensi minimum nasional yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam aspek literasi dan numerasi, untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia di wilayah ini.



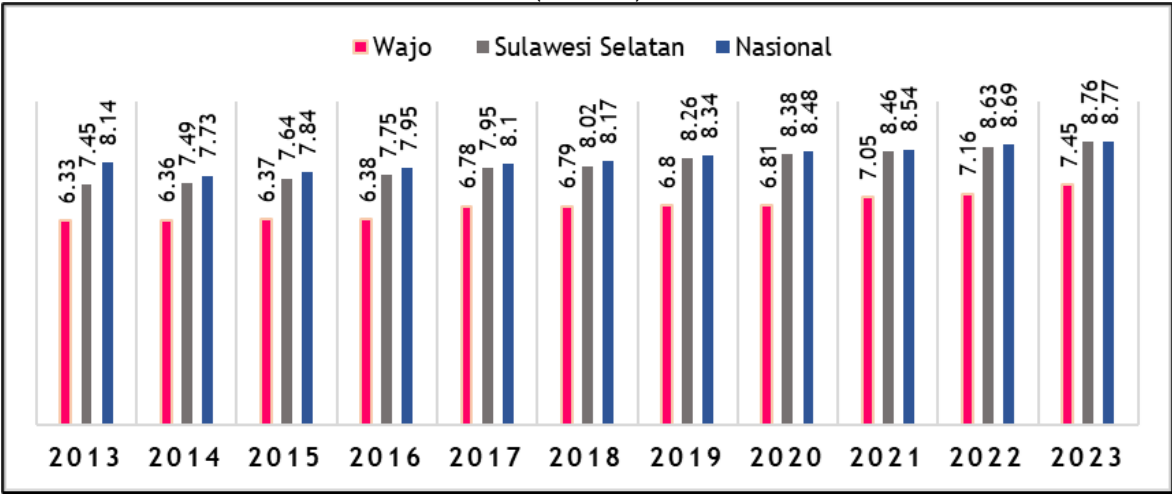
2.3.3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yang mengukur tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Kedua indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa lama individu-individu dalam suatu populasi menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa depan. Angka Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sedangkan angka harapan lama sekolah mengacu pada jumlah

tahun pendidikan yang diharapkan atau diinginkan oleh individu atau populasi tertentu.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 10 tahun mengalami tren peningkatan, dari angka 6,33 tahun pada 2013 menjadi 7,45 tahun di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Wajo yang berusia 25 ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII. Angka tersebut masih berada di bawah provinsi dan nasional tahun 2023, yang telah mencapai angka 8,76 tahun dan 8,77 tahun. Bahkan dalam konteks global, standar pendidikan yang tinggi di beberapa negara maju seperti Jepang atau negara-negara Eropa dapat memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari 12 tahun.

Grafik 2. 23
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Tahun)



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Salah satu indikator yang mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah adalah Anak Tidak Sekolah (ATS). ATS merujuk pada anak-anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang tidak atau belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA sederajat.

Jumlah ATS di suatu daerah dapat berkontribusi pada penurunan rata-rata lama sekolah dalam populasi. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan membagi total tahun sekolah yang ditempuh oleh seluruh individu dalam populasi dengan jumlah total individu. Jika banyak anak yang tidak sekolah, mereka akan memberikan kontribusi nol terhadap total tahun sekolah, yang pada akhirnya menurunkan rata-rata lama sekolah secara keseluruhan.

Data ATS dapat dilihat secara agregat di berbagai sektor berdasarkan kelompok masyarakat, misalnya penerima bantuan sosial. Namun, data ini belum memberikan gambaran menyeluruh karena terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama UNICEF mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID). Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan data oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF untuk memperkenalkan dan memberikan pendampingan kepada kabupaten dalam pengumpulan data ATS melalui aplikasi SIPBM. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah ATS di Kabupaten Wajo pada tahun 2023 tercatat sebanyak 413 anak, yang terdiri atas 40 anak usia 7-12 tahun, 209 anak usia 13-15 tahun, dan 164 anak usia 16-18 tahun. Data ini memberikan pandangan lebih detail mengenai populasi ATS dan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi pendidikan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Tabel 2. 36
Anak Tidak Sekolah Kabupaten Wajo Tahun 2023

No	KECAMATAN	ATS (ANAK TIDAK SEKOLAH)		
		Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
1	PENRANG	0	0	0
2	MANIANGPAJO	5	27	33
3	SAJOANGING	5	36	17
4	KEERA	1	30	4
5	BOLA	2	0	0
6	TAKKALALLA	1	0	0
7	SABBANGPARU	2	3	5
8	BELAWA	4	73	68
9	TANASITOLO	3	4	4
10	PITUMPANUA	9	16	25
11	PAMMANA	6	17	6
12	MAJAULENG	2	3	2
13	GILIRENG	0	0	0
14	TEMPE	0	0	0
	TOTAL	40	209	164

Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

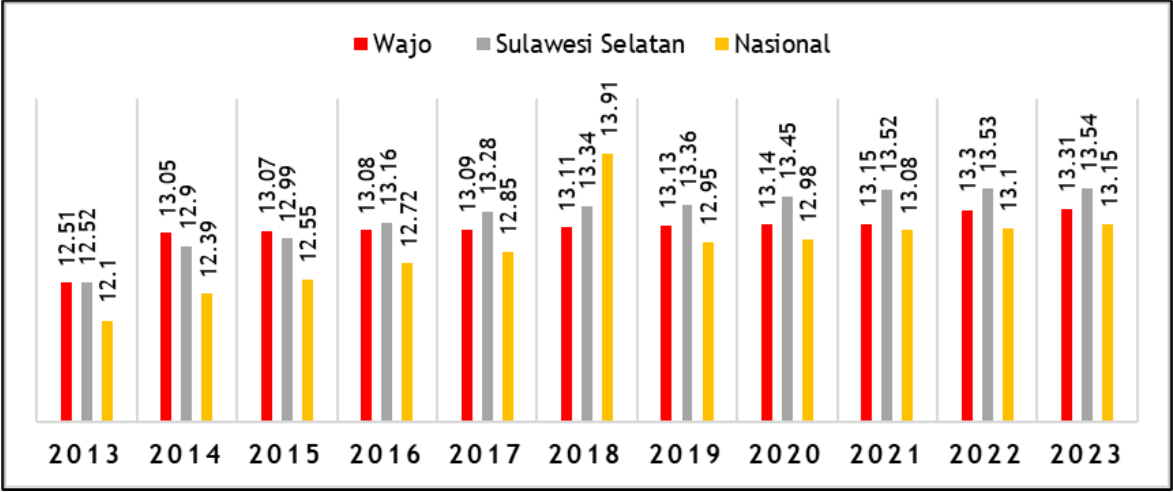
2.3.3.3. Harapan Lama Sekolah

Mendorong harapan lama sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Wajo, karena semakin lama individu mengenyam pendidikan, semakin besar pula pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang mereka miliki. Pendidikan yang berkepanjangan membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi akademik, keterampilan berpikir kritis, serta sikap yang positif terhadap pembelajaran seumur hidup. Hal ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompleks, serta berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Dengan harapan lama sekolah yang tinggi, SDM di Kabupaten Wajo lebih siap menghadapi persaingan, baik secara nasional maupun internasional.

Data harapan lama sekolah di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten. Secara khusus, Kabupaten Wajo mengalami kenaikan dari 12,51 tahun pada tahun 2013 menjadi 13,31 tahun di tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Wajo cenderung berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional. Sulawesi Selatan memulai dengan angka 12,1 taun pada tahun 2013 dan mencapai 13,14 tahun pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan bertahap yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Wajo. Sementara itu, tingkat nasional secara konsisten memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Wajo dan Sulawesi Selatan, mulai dari 12,39 tahun pada tahun 2014 hingga mencapai 13,15 tahun pada tahun 2023.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Wajo dan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, keduanya belum sepenuhnya menyamai tingkat nasional. Peningkatan di Wajo relatif stabil tetapi dengan laju yang sedikit lebih lambat dibandingkan peningkatan rata-rata nasional, yang bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam meningkatkan akses atau kualitas pendidikan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, tren positif ini mengindikasikan adanya kemajuan, namun tetap diperlukan langkah-langkah strategis agar Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih kompetitif dengan standar pendidikan nasional di masa depan.

Grafik 2. 24
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Tahun)



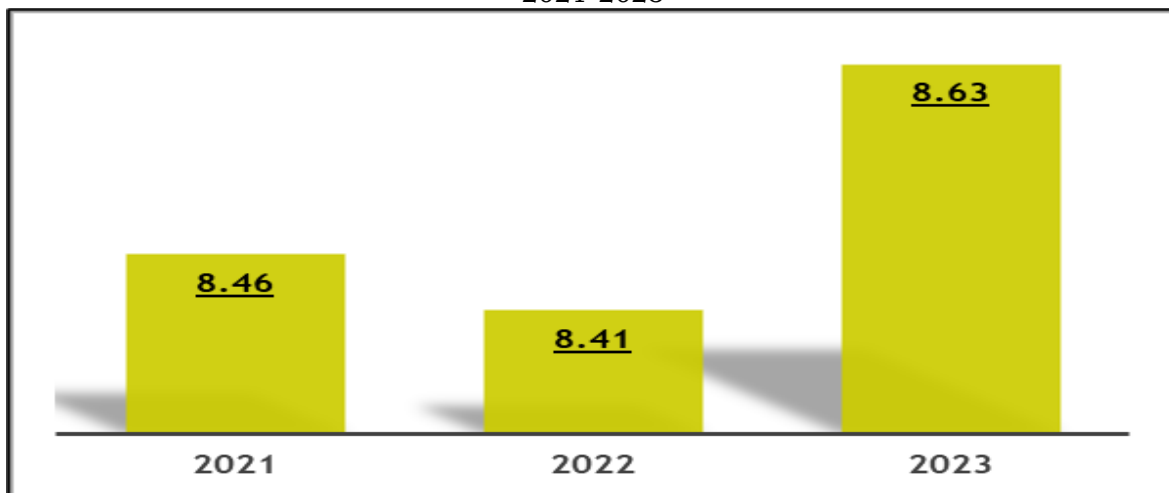
Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.3.3.4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Rendahnya angka rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap indikator proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Meningkatkan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sangat penting untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Wajo. Pendidikan tinggi memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam berbagai sektor, termasuk industri, teknologi, dan layanan publik. Dengan jumlah tenaga kerja berkualifikasi tinggi yang lebih besar, Kabupaten Wajo dapat meningkatkan daya saingnya, mendorong inovasi, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian daerah.

Dalam tiga tahun terakhir, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan. Tahun 2021, dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wajo, 8-9 orang diantaranya berkualifikasi pendidikan tinggi. Meski sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 8,41%, tapi di tahun 2023 bertambah dua kali lipat menjadi 8,63%.

Grafik 2. 25
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2023



Sumber: BPS

Kenaikan tersebut menjadi catatan positif bagi pemerintah daerah, namun angkanya masih terlalu rendah. Walau tak ada standar ideal terkait proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, tapi dalam konteks negara berkembang, angka 20-30% dinilai sebagai kebutuhan standar karena negara butuh lebih banyak penduduk yang punya kualifikasi pendidikan tinggi untuk mendorong pembangunan nasional dan daerah.

Meningkatkan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di sebuah daerah menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah akses terbatas ke perguruan tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, jarak yang jauh ke lembaga pendidikan tinggi, dan terbatasnya lembaga pendidikan berkualitas menjadi kendala besar. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup di kota besar, membuat pendidikan tinggi sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Meski ada program beasiswa atau subsidi, belum semua penduduk mampu mengaksesnya dengan mudah, sehingga banyak yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Selain akses dan biaya, tantangan lain datang dari kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja lokal. Di beberapa daerah, pandangan tradisional dan kondisi ekonomi keluarga membuat generasi muda lebih memilih langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Hal ini juga diperparah dengan keterbatasan tenaga pengajar berkualitas dan fasilitas pendidikan yang minim, yang menurunkan daya tarik pendidikan tinggi. Di beberapa daerah pula, norma budaya dan

kendala gender bisa membatasi akses pendidikan, terutama bagi perempuan. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, serta relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja lokal agar pendidikan tinggi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan daerah.

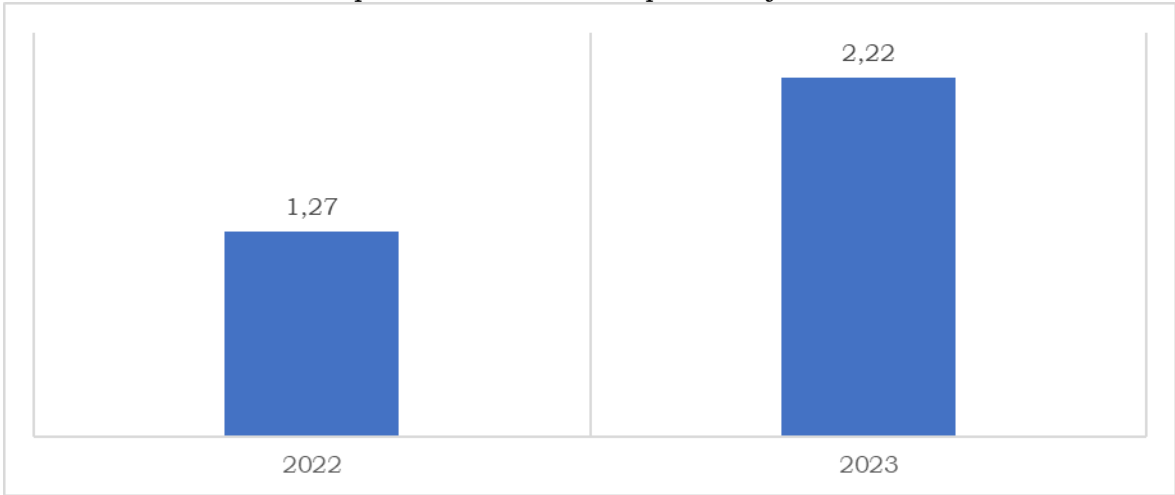
2.3.3.5. Indeks Kapabilitas Inovasi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, satu-satunya instrumen yang dibutuhkan adalah inovasi karena jika hanya mengandalkan sumber daya alam, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat seiring habisnya cadangan sumber daya alam. Inovasi akan terus menghasilkan nilai tambah dalam struktur perekonomian daerah meski sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu penting bagi Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah adalah indeks kapabilitas inovasi. Kapabilitas Inovasi merupakan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi di suatu daerah. Selain itu, menggambarkan ruang lingkup lingkungan lokal dalam mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas dan kemampuan daerah untuk mentransformasikan ide menjadi barang dan jasa baru, serta mengimplementasikan perubahan yang signifikan dan berdampak positif.

Karena nilai indeks kapabilitas inovasi baru tersaji dalam dua tahun terakhir, maka kondisi indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo yang bisa diamati hanya di tahun 2022 dan 2023. Nilai kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo pada tahun 2023 mencapai 2,22, capaian ini meningkat dibandingkan nilai tahun 2022 yang hanya mencapai 1,27. Meski mengalami kenaikan, skor indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo masih tergolong rendah.

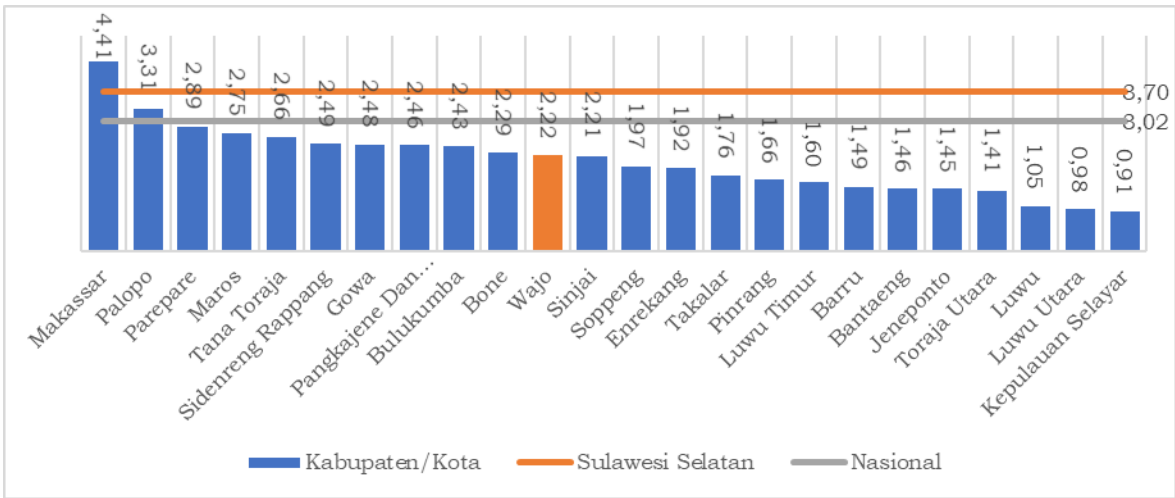
Grafik 2.26
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Wajo Tahun 2022-2023



Sumber: BRIN

Jika Kabupaten Wajo dikomparasi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat angka tersebut masih relatif rendah. Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendapat nilai indeks sebesar 3,70, sementara nasional angkanya 3,02. Nilai indeks Kabupaten Wajo menempati urutan ke-11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, masih cukup rendah. Masih rendahnya indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo disebabkan karena masih ada beberapa variabel pembentuk indeks yang rendah seperti publikasi ilmiah, Aplikasi kekayaan intelektual (KI), Belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dll

Grafik 2.27
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



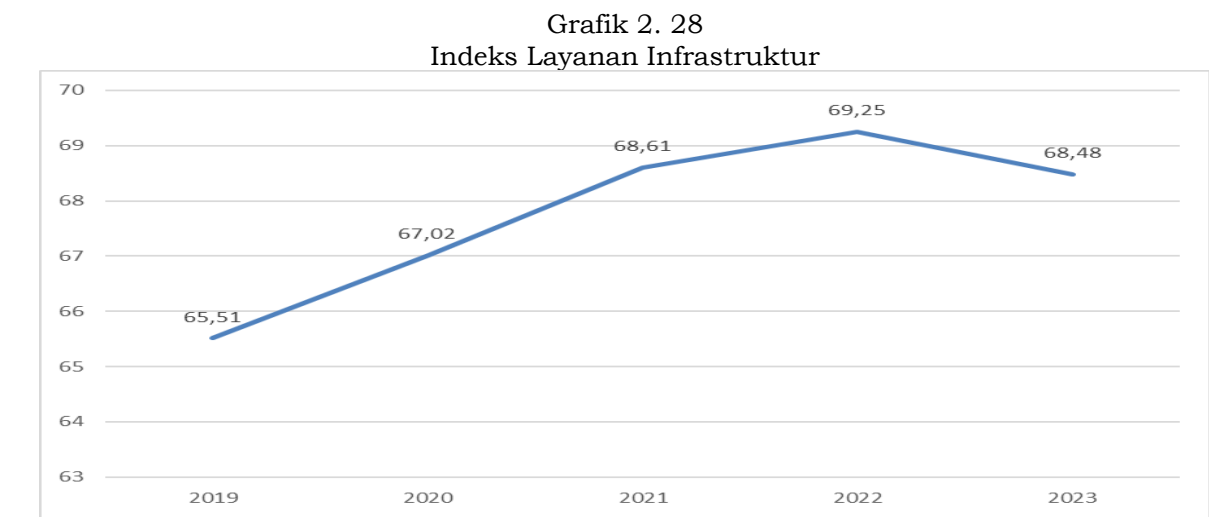
Sumber: BRIN

2.3.4.Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Aspek daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah di wilayah Kabupaten Wajo digambarkan dari capaian indeks infrastruktur dan hunian penduduk.

2.3.4.1. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan alat ukur untuk menilai kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik infrastruktur tersedia dan dimanfaatkan, serta bagaimana hal itu mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Wajo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan nilai indeks yang mencapai 68,48 poin pada tahun 2023.



Sumber: BPS, 2019 – 2023 (diolah)

2.3.4.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Tahun 2018 hingga 2022 capaian akses rumah tangga dengan hunian layak mengalami tren peningkatan serta lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasional. Pemenuhan akses hunian layak hanya terbatas pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap

hunian layak melalui peningkatan RTLH khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan hunian layak dilakukan dengan upaya kemudahan dalam akses pembiayaan (KPR) serta mendorong pengembang perumahan untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai khususnya akses air minum dan sanitasi layak.

Tabel 2. 37
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Wajo,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	60,05	69,88	73,85	75,00	72,68
Provinsi	57,87	60,93	64,24	69,11	69,90
Nasional	54,09	56,51	59,54	60,90	60,66

Sumber: BPS, 2018 – 2022 (diolah)

2.3.5. Daya Saing Iklim Investasi

Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik daerah. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari iklim investasi. Iklim investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan kepastian hukum yang jelas, regulasi yang transparan, stabilitas politik dan ekonomi serta infrastruktur yang memadai.

2.3.5.1. Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022, indeks reformasi hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Wajo sebesar 87,58, dimana angka ini meningkat signifikan dari posisi di tahun 2022, yang hanya sebesar 71,85. Peningkatan ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi yang meningkat dari 80,25 di tahun 2022 menjadi 87,77 di tahun 2023.

Tabel 2.38
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	2022	2023
Kabupaten	71,85	87,58
Provinsi	80,25	87,77

Sumber: Pemerintah Kabupaten Wajo, 2023

2.3.5.2. Kondisi Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan, serta demokrasi substansial bisa berpengaruh terhadap daya saing investasi. Faktor-faktor ini termasuk dalam kategori institusi, dimana faktor ini menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh calon investor dalam melakukan investasi. Beberapa indikator seperti persentase penegakan hukum, persentase tindak kriminal yang ditangani, dan persentase perempuan terhadap total anggota DPRD.

Tabel 2. 39
Kondisi Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penegakan Hukum Peraturan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase tindak kriminal yang ditangani	N/A	78,8%	63,1%	88,8%	72,7%
Persentase Perempuan terhadap total anggota DPRD	17.5	10	10	10	10

Sumber: Pemerintah Kabupaten Wajo dan Kepolisian Resort Wajo, 2023

Indikator Persentase Penegakan Hukum PERDA adalah perbandingan antara jumlah penegakan PERDA yang diselesaikan dengan jumlah pelanggaran yang ada, dimana capaiannya sebesar 100 persen, yang berarti semua pelanggaran Perda dapat diselesaikan. Sementara itu, jumlah pelanggaran juga selalu menurun, dimana pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Sementara itu, persentase tindak kriminal yang ditangani berdasarkan data dari Polres Wajo karena terkait tindak pidana umum yang ditangani oleh pihak kepolisian dan diolah oleh bidang Trantibum Satpol Damkar.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 sampai 2023, tindak kriminalitas yang ditangani mengalami fluktuasi. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2021, tindak kriminal yang ditangani menurun dari 78,8 persen menjadi 63,1 persen, namun di tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 88,8 persen dan di tahun 2023 turun menjadi 72,7 persen.

Lebih lanjut, persentase Perempuan terhadap total anggota DPRD mengukur kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, dimana hal ini bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan. Dengan berkembangnya demokrasi, tuntutan keterlibatan perempuan dalam politik semakin kuat. Persentase keterwakilan perempuan di Kabupaten Wajo dalam periode pemilu 2019-2024 yang duduk di parlemen semakin menurun hingga menjadi sekitar 10 %. Hal ini berarti pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penyebabnya adalah belum maksimalnya pendidikan demokrasi di kalangan perempuan dan juga masih kentatnya budaya patriarki, sehingga kuota 30% perempuan belum tercapai secara maksimal, meskipun pada saat penyusunan Calon Anggota Legislatif Kuota 30% perempuan terpenuhi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya membangun Budaya Politik Perempuan dalam memenuhi Hak-Hak Politik adalah Kaum Perempuan perlu mengetahui mengenai masalah budaya politik di Indonesia. Tingkatkan pengetahuan mengenai konsep memahami diri.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Wajo. Pelayanan umum ini diarahkan untuk melayani berbagai kepentingan publik, yang diwujudkan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengembangan inovasi daerah. Melalui pendekatan-pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan layanan yang lebih responsif, transparan, dan efektif bagi masyarakat.

Namun, dalam perjalanan pelaksanaan reformasi di Indonesia, muncul tantangan yang cukup signifikan, terutama pada gelombang pertama reformasi. Reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Menyadari hal tersebut, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government dan good governance*. Prinsip-prinsip ini diyakini secara universal sebagai fondasi utama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah meluncurkan program utama berupa reformasi birokrasi yang bertujuan membangun aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Reformasi birokrasi tidak hanya berarti perubahan prosedural, tetapi juga mengacu pada perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Program ini menjadi langkah besar dan sebuah pertarungan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global pada abad ke-21.

Perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Wajo menunjukkan hasil yang positif. Selama periode 2019-2023, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Wajo meraih kategori B dengan nilai 60,69. Pada tahun 2023, indeks tersebut meningkat menjadi 65,06, menjadikan Kabupaten Wajo sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil mencapai kategori ini. Capaian ini menggambarkan komitmen Kabupaten Wajo dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 40
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten	60,08	60,02	60,69	60,69	65,06
Provinsi	61,24	60,07	61,18	66,16	

Sumber: Kementerian Menteri Dalam Negeri, 2023 (Diolah).

Selain dari sisi pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerja pemerintah dalam pelayanan umum juga tercermin pada kinerja pemerintah dalam administrasi publik dan pemerintahan yang diukur pada indikator -indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 41
Capaian Indikator Pelayanan Publik, SPBE, Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,11	2,87	2,86	2,67
Indeks Inovasi Daerah	3090	115	32,44	40,79	43,47

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,26	1,41	2,42	2,51	2,67
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62,07	63,76	54,31	78,16	78,16

Sumber: Kementerian Menteri Dalam Negeri, 2023 (Diolah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Pengukuran ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi. Melalui aspek-aspek ini, pemerintah dapat menilai efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Wajo, IPP mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, indeks pelayanan publik berada pada angka 3,11, kemudian menurun menjadi 2,87 pada tahun 2021, dan sedikit menurun lagi menjadi 2,86 pada tahun 2022. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 2,67. Ketika dibandingkan dengan indeks pelayanan publik di tingkat provinsi, terlihat bahwa indeks provinsi berada pada nilai yang lebih tinggi, yaitu 4,34 pada tahun 2023. Perbandingan ini menunjukkan adanya ruang bagi Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya agar setara dengan standar provinsi.

Selain IPP, Indeks Inovasi Daerah juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai kemajuan daerah. Indeks Inovasi Daerah mengukur pembaruan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki. Peningkatan inovasi daerah ini memberikan gambaran mengenai tingkat kreativitas dan adaptasi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan lokal. Selain sebagai alat pemetaan inovasi, peningkatan ini juga menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi signifikan, diantaranya:

- a. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau
- b. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penghargaan pemerintah daerah inovatif, yang didasarkan pada Indeks Inovasi Daerah, diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah berhasil menciptakan inovasi daerah. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan mulai menghitung Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2019 sebagai langkah awal untuk mengukur dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, Indeks Inovasi Kabupaten Wajo pada tahun 2019 hingga 2020 tergolong dalam kategori "kurang inovatif." Namun, pada periode 2021 hingga 2023, Kabupaten Wajo menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai kategori "inovatif" pada tahun 2023, dengan skor 43,47. Capaian ini menandakan kemajuan yang menggembirakan dan menjadi dorongan bagi pemerintah Kabupaten Wajo untuk terus menyosialisasikan serta mendorong pengembangan inovasi di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain Indeks Inovasi, Kabupaten Wajo juga berfokus pada peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2019, capaian SPBE Kabupaten Wajo berada di angka 1,26 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,67 pada tahun 2023. Meski demikian, capaian ini masih berada di bawah capaian SPBE tingkat provinsi dan nasional, yang masing-masing mencatatkan angka 3,09 dan 2,79 pada tahun yang sama. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Kabupaten Wajo perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem berbasis elektronik untuk mencapai standar provinsi dan nasional.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menjadi indikator lain yang digunakan untuk menilai tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengukuran IPKD didasarkan pada analisis dokumen perencanaan pembangunan daerah, anggaran, pelaksanaan penyerapan anggaran, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) dari tahun sebelumnya. Kabupaten Wajo mengalami fluktuasi dalam IPKD selama periode 2019 hingga 2023. Pada

tahun 2019, IPKD Kabupaten Wajo tercatat sebesar 62,07, namun mengalami penurunan hingga 54,13 pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022, IPKD kembali meningkat signifikan menjadi 78,16 dan bertahan pada angka tersebut hingga tahun 2023.

Tabel 2. 42
Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas, Nilai MCP KPK dan Indeks Maturitas SPIP
Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Indeks Survey Penilaian Integritas	74.64	79.72	74.60
Nilai MCP KPK	65	78	55
Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Wajo, 2024

Capaian dari ketiga indeks ini—Indeks Inovasi Daerah, Indeks SPBE, dan IPKD—menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Meski terdapat peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek, masih ada tantangan yang harus dihadapi agar Kabupaten Wajo dapat mencapai standar yang setara dengan tingkat provinsi dan nasional.

Selain parameter tata kelola pemerintahan yang telah dibahas sebelumnya, Kabupaten Wajo juga menunjukkan kinerja yang baik pada beberapa indikator lain yang berfokus pada penerapan prinsip clean government. Salah satu indikator tersebut adalah Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini dirancang untuk mengukur risiko korupsi di berbagai lembaga dan pemerintah daerah, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Pada tahun 2023, skor SPI Kabupaten Wajo tercatat sebesar 74,60, namun mengalami penurunan sebesar 5,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan upaya dalam meminimalkan risiko korupsi dan menjaga integritas lembaga.

Indikator lain yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Wajo adalah Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program MCP ini bertujuan mendorong pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang

bersih dan bebas dari korupsi. Pada tahun 2023, nilai MCP Kabupaten Wajo mencapai 55, mengalami penurunan dari nilai 78 pada tahun sebelumnya. Angka ini menandakan perlunya optimalisasi lebih lanjut dalam penerapan program MCP agar kinerja pencegahan korupsi di Kabupaten Wajo dapat kembali meningkat.

Selain SPI dan MCP, indikator penting lainnya adalah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Maturitas SPIP mengukur tingkat kematangan pengelolaan SPIP di suatu organisasi dengan memperhatikan karakteristik dasar yang menunjukkan keberlanjutan dan struktur yang baik. Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Wajo mencapai level 3 dalam maturitas SPIP, yang dikenal sebagai tingkat "terdefinisi." Level ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan dan mengintegrasikan strategi kinerja dengan baik, meskipun pengendalian yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif. Pencapaian ini menunjukkan adanya pondasi yang kuat, tetapi Kabupaten Wajo perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya.

Secara keseluruhan, ketiga indikator—SPI, MCP, dan Maturitas SPIP—menggambarkan upaya Kabupaten Wajo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meskipun terdapat beberapa penurunan pada capaian tertentu, indikator-indikator ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan tata kelola dan mencegah korupsi.

2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan di Kabupaten Wajo dilaksanakan secara berkesinambungan. Olehnya itu evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting untuk menjadi dasar perumusan masalah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode RPJPD 2025-2045. Berdasarkan hasil evaluasi 2005-2025, diperoleh informasi sebagai berikut:

2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Hasil Pelaksanaan P-RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 dilakukan terhadap target indikator kinerja Sasaran Pokok Setiap Tahapan Pembangunan Lima Tahun RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo untuk menilai

keberhasilan pelaksanaan pembangunan setiap periode lima tahun dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja RPJPD Kabupaten Wajo yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wajo per tahapan dalam periode RPJPD Kabupaten Wajo tahun 2005-2025.

Hasil evaluasi terhadap capaian RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- Misi 1 yaitu Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Sejahtera, memuat 14 sasaran pokok dan 14 indikator. Dari seluruh sasaran pokok, 7 (tujuh) indikator berhasil tercapai yaitu:
 1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan dalam suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan (S3) agribisnis yang berkelanjutan (S3) dengan indikator Nilai Produksi Peternakan (Juta Rp);
 2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan dan kehutanan dalam suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan (S4) dengan indikator Nilai Produksi Perkebunan (Rp);
 3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan dalam suatu system agribisnis yang berkelanjutan (S5) dengan indikator Nilai Produksi Perikanan (Rp);
 4. Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi pasar tenaga kerja yang semakin bebas dan terbuka lintas negara (S9) dengan indicator Tingkat Pengangguran Terbuka (%);
 5. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin (S11) dengan indicator Angka Kemiskinan (%);
 6. Terwujudnya pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dan peningkatan pelayanan transportasi (S13) dengan indicator Jumlah penumpang pengguna terminal dan pelabuhan (Orang);
 7. Terpenuhinya rasa aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat (S14) dengan indikator Angka Kriminalitas (%);sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya belum tercapai yaitu:

1. Terpeliharanya ketahanan pangan rumah tangga dan daerah dengan ketersediaan yang kontinyu, distribusi yang terjangkau dan konsumsi yang memenuhi pola pangan harapan (S1) dengan indikator Capaian Pola Pangan Harapan (%);
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan (S2) dengan indikator Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Juta Rp);
3. Terlindunginya luas dan kualitas lahan pertanian pangan dalam menunjang keberlanjutan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan (S6) dengan indikator Luas Lahan pertanian tanaman pangan yang dilindungi (Ha);
4. Terwujudnya kondisi rumah yang memenuhi standar layak huni serta pemukiman yang memenuhi standar sanitasi yang baik pada kawasan perkotaan maupun Kawasan perdesaan(S7) dengan indikator Rumah Layak Huni (%);
5. Terwujudnya pemukiman yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan (S8) dengan indikator Pemukiman Layak Huni (%);
6. Tercapainya tingkat pendapatan Masyarakat yang mencukupi pemenuhan kebutuhan untuk hidup sejahtera (S10) dengan indikator PDRB/kapita (Rp);
7. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam kapasitas dan kualitas baik yang menjangkau seluruh pelosok wilayah (S12) dengan indikator Porsi panjang jalan kualitas baik (%);

Setelah menghitung, diperoleh tingkat capaian misi 1 sebesar 93,02% dengan predikat “sangat tinggi”.

- Misi 2 yaitu Meningkatkan Jiwa Kemandirian Masyarakat memuat 3 (tiga) sasaran pokok dan 3 (tiga) indikator. Dari seluruh sasaran pokok, 2 (dua) indikator tercapai yaitu:
 1. Meningkatnya prestasi generasi muda dalam berbagai aspek pembangunan (S15) dengan indicator Jumlah masyarakat Kabupaten Wajo yang mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Wajo;

2. Meningkatnya kewirausahaan dan aktivitas perdagangan masyarakat (S16) dengan indicator Nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri (Rp);

sedangkan 1 (satu) indikator lainnya satuan target dan data realisasi tidak sesuai yaitu:

- a. Meningkatnya produksi dan daya saing produk unggulan lokal/daerah (S17) dengan indikator Berkembangnya produk unggulan lokal kain sutera (Meter). Capaian realisasi yang diperoleh yaitu Pada tahun 2015 – 2019 sebesar Rp. 169.536.165 dan Pada tahun 2020 – 2025 sebesar Rp. 32.795.900.000

sehingga tingkat capaian misi 2 sebesar 75,00%.

- Misi 3 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Baik memuat 5 (lima) sasaran pokok dan 5 (lima) indikator. Dari seluruh sasaran pokok 4 (empat) indikator tercapai yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan akurasi pengelolaan administrasi dan keuangan daerah (S18) dengan indicator Opini laporan keuangan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam berkembangnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sesuai kalender perencanaan (S19) dengan indikator
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah daerah (S20 dengan indicator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan umum;
4. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan kecamatan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan (S21) dengan indicator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas kinerja pemerintah kecamatan.
5. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan local (S22) dengan indicator Desa Mandiri (%).

sehingga tingkat capaian misi 3 sebesar 100,00%.

- Misi 4 yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan memuat 7 (tujuh) sasaran pokok dengan 10 indikator. Dari seluruh sasaran pokok 2 (dua) indikator tercapai, yaitu:

1. Terpeliharanya ketersediaan dan fungsi sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan social ekonomi dan pertanian (S25) dengan indicator Persentase Rumah tangga dalam memanfaatkan akses air bersih;
2. Terkendalikannya pencemaran lingkungan karena pembangunan maupun aktivitas sehari-hari masyarakat (S27) dengan indicator Indeks pencemaran lingkungan;

Sementara terdapat 2 (dua) indikator belum tercapai, yaitu:

1. Terlindunginya lahan pertanian pangan dari konversi bagi peruntukan non pertanian dan penurunan kesuburan lahan (S24) dengan indicator Luas lahan pertanian pangan yang beririgasi;
2. Berkembangnya usaha pertambangan dan mineral yang berkelanjutan secara ekonomi, social dan ekologi dalam mendukung keterpenuhan energi daerah dan nasional (S26) dengan indikator Persentase peningkatan rasio elektrifikasi; dan 6 (enam) indikator tidak tersedia data realisasi, yaitu
 - 1) Terpeliharanya fungsi Danau Tempe sebagai ekosistem perikanan dan keragaman hayati serta sumber air bagi pertanian dan kehidupan social-ekonomi masyarakat sekitarnya (S23) dengan indikator Persentase luas sawah yang terairi dari pemanfaatan air danau tempe dengan irigasi pompa;
 - 2) Terpeliharanya ketersediaan dan fungsi sumberdaya air dalam mendukung dengan indikator Persentase kecukupan air dalam jaringan irigasi untuk pertanian
 - 3) Terpeliharanya ketersediaan dan fungsi sumberdaya air dalam mendukung dengan indikator Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian;
 - 4) Terwujudnya pengembangan kawasan Peruntukan industri dan Pembangunan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan(S28) dengan indikator Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan industri;

- 5) Terwujudnya pengembangan kawasan Peruntukan industri dan Pembangunan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan(S28) dengan indikator Jumlah sentra-sentra industri yang terbentuk;
- 6) Terkendalikannya pemanfaatan ruang secara konsisten dengan arahan RTRW (S29) dengan indikator % kepatuhan terhadap RTRW;

sehingga tingkat capaian misi 4 sebesar 33,64%.

- Misi 5 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Berbasis Iman dan Takwa memuat 4 (empat) sasaran pokok dengan 4 (empat) indikator. Dari seluruh sasaran pokok 1 (satu) indikator tercapai yaitu:
 - 1. Termanifestasikannya nafas keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (S33) dengan indikator Adanya kerukunan intra dan antar umat beragama;

Sedangkan ada 3 (tiga) indikator lainnya belum tercapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya akses masyarakat secara merata terhadap pelayanan Pendidikan berkualitas (S30) dengan indikator Angka rata-rata lama sekolah (Tahun);
- 2. Terwujudnya pola hidup sehat dalam masyarakat dan terpenuhinya layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau (31) dengan indikator Angka harapan hidup (tahun)
- 3. Berkembangnya system inovasi daerah yang memberdayakan masyarakat dalam merespons secara kreatif perubahan lingkungan strategis (S32) dengan indikator Adanya inovasi dalam pemerintahan/ pembangunan daerah

Setelah menghitung antara sasaran pokok yang tercapai dan tidak tercapai, maka diperoleh tingkat capaian misi 5 sebesar 67,71%.

Selengkapnya rangkuman ketercapaian indikator pada setiap misi pembangunan RPJPD Kabupaten Wajo 2005-2025 adalah diuraikan dalam tabel 2.42

Tabel 2. 43
Ringkasan Ketercapaian Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Wajo 2005-2025

Misi	Jumlah Total Indikator	Kategori Ketercapaian Indikator			Capaian Realisasi Kinerja	Nilai Capaian Realisasi
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada		

				Data		
Misi 1	14	7	7	0	93,02%	Sangat Tinggi
Misi 2	3	2	0	1	75,00%	Sedang
Misi 3	5	5	0	0	100,00%	Sangat Tinggi
Misi 4	10	2	2	6	33,64%	Sangat Rendah
Misi 5	4	1	3	0	67,71%	Sedang
Total	36	17	12	7	73,87%	Sedang

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten Wajo 2005-2025, diolah

2.5.2. Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wajo 2005-2025, maka diuraikan beberapa rekomendasi proses perencanaan dan proses pembangunan ke depannya agar terjadi kesinambungan dan perbaikan. Rekomendasi tersebut yaitu:

2.5.2.1. Rekomendasi untuk Proses Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana pembangunan yang berlaku 20 (dua puluh) tahun. Seluruh rancangan rencana didasarkan pada karakteristik daerah, potensi daerah, permasalahan dan tantangan daerah, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan daerah di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan proses perencanaan yang dapat mengarahkan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan berdasarkan tren yang terus berkembang dan kebutuhan yang akan terus tumbuh.

Adapun rekomendasi untuk proses penyusunan rencana jangka panjang berikutnya, antara lain:

1. Penyusunan visi pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan karakteristik daerah, potensi daerah, permasalahan dan tantangan daerah, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan daerah di masa depan.
2. Pendetailan visi menjadi tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan pertimbangan waktu pencapaian sasaran pokok.
3. Penentuan misi pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional dan masalah dan isu strategis daerah

yang hendak diatasi dengan memprioritas terhadap aspek keberlanjutan.

4. Penjabaran visi dan misi menjadi tujuan pembangunan jangka panjang yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan pertimbangan waktu pencapaian sasaran pokok.
5. Proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak secara partisipatif sehingga dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
6. Pengukuran ketercapaian indikator harus mempertimbangkan ketersediaan data dan relevansi dengan sasaran pokok yang akan diukur. Data yang dibutuhkan perlu disajikan secara time series sehingga dapat menggambarkan dinamika selama 20 tahun pembangunan.

2.5.2.2. Rekomendasi untuk Perencanaan Pembangunan 20 tahun Kabupaten Wajo 2025-2045

Telaah terhadap ketercapaian dan faktor pendorong dan penghambat masing-masing misi pembangunan RPJPD Kabupaten Wajo 2005-2025 menjadi bahan pembelajaran untuk mempertajam perencanaan pembangunan jangka panjang berikutnya. Setiap telaah tersebut berisikan catatan usulan tindaklanjut yang spesifik terhadap muatan setiap sasaran pokok pada masing-masing misi pembangunan. Selain usulan tindaklanjut terhadap proses perencanaan ke depannya, juga dirumuskan secara mendetail berbagai usulan tindaklanjut pembangunan untuk setiap sasaran pokok. Catatan ini dapat menjadi masukan konkrit untuk langkah pembangunan selanjutnya sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan 20 tahun yang lalu.

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wajo 2005-2025 mencatat beberapa hal penting dalam setiap pencapaian misi yang perlu diperkuat untuk keberhasilan pembangunan kedepan, meliputi hal sebagai berikut:

1. Dibutuhkan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan utama, memperluas daerah-daerah yang dapat ditanami berbagai jenis bahan pangan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), termasuk pengendalian alih fungsi lahan;

2. Pemanfaatan Danau Tempe dan Bendungan Paselloreng dalam peningkatan akses air bersih, untuk lahan pertanian dan perkebunan serta pengendali gagal panen saat kemarau
3. Manajemen bendungan dan irigasi dalam mengendalikan elevasi air pada bendung gerak, termasuk optimalisasi saluran irigasi primer dan sekunder serta pemanfaatan irigasi pompa untuk memperluas area sawah yang terairi;
4. Peningkatan pengelolaan produksi peternakan merupakan langkah strategis yang mencakup berbagai aspek penting. Dengan memperbaiki sarana dan prasarana, seperti kandang modern dan fasilitas pengolahan pakan, efisiensi produksi dapat ditingkatkan secara signifikan. Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan memastikan para peternak dan petugas lapangan memiliki pengetahuan terkini dalam praktik peternakan terbaik. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem manajemen ternak berbasis digital dan otomatisasi proses, mengoptimalkan produktivitas dan memudahkan pemantauan kesehatan hewan. Pengendalian penyakit hewan yang ketat melalui program vaksinasi dan keamanan produk peternakan. Sementara itu, perluasan pemasaran melalui kemitraan dengan industri pengolahan dan pemanfaatan platform digital membuka peluang baru bagi peternak untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dan menguntungkan. Integrasi semua aspek ini menciptakan ekosistem peternakan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan;
5. Aksesibilitas dan kemudahan permodalan untuk memulai usaha membuka ruang berkembang dan pelatihan bagi pembudidaya perikanan serta pengendalian harga pakan dan penyakit komoditi budidaya;
6. Perlu pendataan secara menyeluruh terhadap rumah layak huni, yang terintegrasi dengan data nasional;
7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai standar kebersihan dan kesehatan kawasan dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan desa dalam penataan lingkungan pemukiman disertai peningkatan kompetensi SDM;
8. Perlunya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya;

9. Dibutuhkan pengendalian penduduk untuk memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi semua orang
10. Perlu perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
11. Optimalisasi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
12. Pengembangan infrastruktur daerah difokuskan pada peningkatan konektivitas melalui pengelolaan dan peningkatan sarana prasarana pelabuhan/terminal, pembangunan sistem transportasi massal terintegrasi antardaerah, serta penataan trayek angkutan umum;
13. pengembangan jaringan listrik antarwilayah dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum mendapat akses listrik. Keseluruhan proses ini didukung oleh peningkatan pengawasan untuk memastikan implementasi yang efektif dan tepat sasaran.
14. Penguatan penegakan regulasi terkait PEKAT dan peningkatan kompetensi penegak PERDA, selain itu dibutuhkan peningkatan kewaspadaan masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum
15. Melibatkan pemuda pada setiap aspek pembangun, dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi yang didukung dengan kebijakan dan sarana prasarana yang memadai;
16. Pengendalian harga, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas produksi dan promosi produk serta kompetensi SDM pada setiap komoditi;
17. Hilirisasi Persuteraan dengan memperluas lahan pertanian murbei, penyediaan bahan baku, pembinaan kelembagaan usaha, termasuk akses permodalan, kesiapan industri dan perdagangan serta peningkatan pengawasan
18. Peningkatan Kompetensi SDM dan akuntabilitas pejabat pengelola keuangan, bendahara umum daerah serta memaksimalkan system pengendalian internal;
19. Penguatan pengendalian dan evaluasi, peningkatan kompetensi SDM dan perlu ketersediaan data dari Perangkat Daerah yang akurat dan valid dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan peningkatan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi antar pelaku pembangunan serta peningkatan implementasi SPBE;

20. Optimalisasi implementasi SPM OPD Pengampu Pelayanan Dasar dan ketersediaan data potensi daerah yang mendukung peningkatan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan umum;
21. Peningkatan ketahanan lingkungan dan ketahanan social desa dalam mendukung peningkatan desa mandiri serta dibutuhkan intervensi OPD yang sesuai kewenangan;
22. Pemanfaatan Sampah dengan pengelolaan dan manajemen yang tepat yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan;
23. Penguatan pengendalian dan pengawasan tata ruang terhadap bangunan yang lebih awal terbangun dibanding dengan penerbitan perda tentang RTRW, serta optimalisasi pengawasan pemanfaatan ruang;
24. Peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan melibatkan pihak swasta dalam mencegah anak putus sekolah serta melanjutkan program penyetaraan pendidikan;
25. Optimalisasi Penerapan Perilaku Bersih Hidup dan Sehat (PHBS) di tatanan keluarga, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar, dan peningkatan kompetensi SDM dalam mencegah masalah Kesehatan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat;
26. Dibutuhkan Penguatan Implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan didukung dengan pemberian penghargaan kepada innovator.

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan proyeksi jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Nilai proyeksi merupakan nilai jumlah kecenderungan (trend) penduduk pada masa yang akan datang. Perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu. Proyeksi jumlah total penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2025–2045 yang diolah dari hasil perhitungan dengan metode Geometrik. Proyeksi jumlah penduduk diperkirakan meningkat di mana laju pertumbuhan penduduk naik menjadi 0,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat migrasi sementara meningkat pada periode tersebut. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2040 menjadi 0,33

persen, dan pada tahun 2045 laju pertumbuhan penduduk mencapai puncaknya sebesar 0,36 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan bertahap laju pertumbuhan penduduk selama periode 20 tahun tersebut dan berdampak pada rasio ketergantungan yang akan lebih rendah dari 50 persen. Sementara itu, diprediksikan Kabupaten Wajo memasuki periode bonus demografi dari SP 2020 sampai ke periode 2045.

Tabel 2. 44
Proyeksi Jumlah Total Penduduk
Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2045

TAHUN	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk	425.244	478.808	550.961	648.754	782.434

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

Dari hasil proyeksi, jumlah total penduduk Kabupaten Wajo diperkirakan akan meningkat secara signifikan dan berturut-turut dalam kurun waktu tahun 2030 hingga 2045. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Wajo diperkirakan sebanyak 782.434 orang, meningkat dari perkiraan sebesar 425.244 orang di tahun 2025.

Tren data proyeksi pertumbuhan penduduk yang positif diharapkan dapat diwujudkan dalam tujuan pembangunan kependudukan sehingga kedepannya dapat memanfaatkan bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, pembangunan kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan penduduk.

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pembagian penduduk berdasarkan jenis kelamin dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan dalam pembangunan kependudukan dan analisis terkait kependudukan. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada tahun 2025–2045, dimana data yang diolah dipadukan dari sumber data statistik kependudukan dan data pembangunan kependudukan.

Tabel 2. 45
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	207.018	233010	266903	311400,2	370345
Persentase	48,68	48,66	48,44	48,00	47,33

Perempuan	218.226	245798	284058	337353,4	412089
Persentase	51,32	51,34	51,56	52,00	52,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Wajo berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 – 2045 diperkirakan memiliki komposisi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jenis kelamin perempuan memiliki persentase yang lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2025, persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 51,32 persen, lalu diperkirakan sedikit menurun menjadi 52,67 di tahun 2045.

2.6.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang dilakukan dengan membagi 3 (tiga) kelas kelompok besar, diantaranya umur belum produktif yaitu umur 0-14 tahun, umur produktif yaitu umur 15 – 64 tahun, dan umur sudah tidak produktif yaitu umur 65 ke atas. Pendataan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dihitung dari tahun 2025–2045 dengan mengolah data statistik kependudukan dan data pembangunan kependudukan, sebagai berikut:

Tabel 2. 46
Proyeksi Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

KELOMPOK UMUR	2025	2030	2035	2040	2045
0- 4	6,40	7,10	7,70	8,16	8,44
5 - 9	7,87	7,00	6,09	5,18	4,30
10 - 14	8,31	7,78	7,13	6,38	5,57
Belum Produktif	22,59	21,88	20,91	19,72	18,32
15-19	7,78	8,73	9,60	10,33	10,87
20-24	7,69	7,78	7,70	7,45	7,05
25-29	6,32	5,11	4,04	3,13	2,36
30-34	6,65	5,67	4,74	3,87	3,08
35-39	7,07	5,89	4,80	3,83	2,98
40-44	7,39	7,35	7,17	6,85	6,39
45-49	6,34	5,58	4,82	4,06	3,34
50-54	6,64	6,50	6,22	5,83	5,33
55-59	5,82	5,84	5,74	5,51	5,16
60-64	5,32	6,40	7,55	8,74	9,89
Produktif	67,02	64,85	62,38	59,58	56,45
65-69	3,50	4,06	4,62	5,15	5,63
70-75	2,76	3,68	4,82	6,18	7,77
75+	4,13	5,53	7,27	9,37	11,83
Tidak produktif	10,39	13,27	16,71	20,71	25,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

Data proyeksi menunjukkan bahwa perkiraan jumlah penduduk dengan usia yang belum produktif atau usia muda pada tahun 2025 - 2045 akan mengalami penurunan. Namun penurunan jumlah usia muda dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk dengan umur produktif, hal ini disebabkan oleh efek bonus demografi yang akan masih dirasakan hingga tahun 2045. Peningkatan jumlah penduduk dengan usia produktif seiring berjalan waktu juga akan sejalan dengan jumlah penduduk dengan umur yang sudah tidak produktif atau usia tua sehingga jumlahnya juga akan meningkat pada rentang tahun 2025 – 2045.

2.6.1.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk kasar dihitung untuk mengetahui rerata jumlah penduduk dalam setiap kilometer persegi. Proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Wajo pada tahun 2025–2045 mengalami tren fluktuatif. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Wajo pada tahun 2025 – 2045 dapat dilihat bahwa setiap kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Wajo terdapat rata-rata 230 jiwa penduduk. Pada data proyeksi tahun 2025, kepadatan penduduk diperkirakan sebanyak 169 dan pada tahun 2030 menjadi 191 jiwa penduduk setiap kilometer persegi. Tahun 2030 sampai 2045 mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya, perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Wajo tahun 2025-2045 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 47
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo
Tahun 2025 – 2045

Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
	2025	2030	2035	2040	2045
2506.19	169	191	219	258	312

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

2.6.1.5. Penduduk Usia Produktif

Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu kelompok usia muda (<15 tahun), kelompok usia produktif dengan rentang usia (15-64 tahun), dan masyarakat usia non produktif (>65 tahun). Usia produktif merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Pada rentang usia 15-64 tahun tersebut banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya, mencari, membangun karier,

membangun sebuah keluarga, aktif terlibat di dalam pembangunan komunitas dan sebagainya. Proyeksi penduduk usia produktif di Kabupaten Wajo mengalami tren meningkat. Tingginya jumlah penduduk dengan usia produktif tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah. Dalam hal perekonomian, usia produktif dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi yang berbasis digital dan dapat pula menciptakan profesi baru dalam pekerjaan

Tabel 2. 48
Jumlah Penduduk Usia Produktif
Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2045

Kelompok Umur (Tahun)	2025	2030	2035	2040	2045
15 - 19	33.078	41.792	52.881	67.010	85.040
20 - 24	32.701	37.244	42.432	48.358	55.128
25 - 29	26.884	24.472	22.279	20.284	18.470
30 - 34	28.260	27.160	26.102	25.086	24.110
35 - 39	30.080	28.178	26.431	24.825	23.347
40 - 44	31.419	35.213	39.522	44.420	49.995
45 - 49	26.942	26.736	26.533	26.335	26.140
50 - 54	28.241	31.104	34.279	37.801	41.709
55 - 59	24.765	27.982	31.617	35.725	40.369
60 - 64	22.620	30.634	41.608	56.672	77.399
Total	284.991	310.517	343.685	386.516	441.706

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

Tabel 2. 49
Persentase Penduduk Usia Produktif Terhadap Total Penduduk
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

KELOMPOK UMUR	2025	2030	2035	2040	2045
15-19	7,78	8,73	9,60	10,33	10,87
20-24	7,69	7,78	7,70	7,45	7,05
25-29	6,32	5,11	4,04	3,13	2,36
30-34	6,65	5,67	4,74	3,87	3,08
35-39	7,07	5,89	4,80	3,83	2,98
40-44	7,39	7,35	7,17	6,85	6,39
45-49	6,34	5,58	4,82	4,06	3,34
50-54	6,64	6,50	6,22	5,83	5,33
55-59	5,82	5,84	5,74	5,51	5,16
60-64	5,32	6,40	7,55	8,74	9,89

KELOMPOK UMUR	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Usia Produktif Terhadap Total Penduduk	67,02	64,85	62,38	59,58	56,45

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

2.6.1.6. Analisis Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0.14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (disebut dengan angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase Rasio ketergantungan suatu daerah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Wajo tahun 2025 hingga 2045 diprediksikan semakin meningkat, yaitu dari 49,21 persen menjadi 77,14 persen.

Tabel 2. 50
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

No.	Parameter	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	Jiwa	96.058	104.752	115.228	127.906	143.310
2	Jumlah Penduduk Usia >65 Tahun	Jiwa	44.196	63.539	92.048	134.332	197.418
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	Jiwa	140.254	168.291	207.276	262.238	340.728
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	Jiwa	284.991	310.517	343.685	386.516	441.706
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	%	49,21	54,20	60,31	67,85	77,14

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

2.6.1.7. Analisis Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan fenomena dimana jumlah penduduk usia kerja (15 sampai 64 tahun) menjadi lebih besar dibandingkan dengan penduduk bukan usia kerja (di bawah 15 tahun dan 64 tahun ke atas). Saat ini Indonesia sedang mengalami masa bonus demografi, dan situasi ini membawa manfaat ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena rasio ketergantungan yang lebih rendah. Bonus demografi memberikan peluang strategis bagi daerah untuk mempercepat pembangunan melalui penyediaan tenaga kerja produktif. Agar demografi menjadi peluang yang menguntungkan, diperlukan upaya serius oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyiapan tenaga kerja yang berkualitas, dan pengembangan kependudukan. Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia yang belum memiliki pendidikan tinggi serta layanan kesehatan dan gizi yang memadai akan memberikan beban bagi daerah, terutama dengan tingginya tingkat pengangguran. Jika jumlah penduduk meningkat pada periode bonus demografi, maka pasokan tenaga kerja Indonesia pasti akan meningkat. Pemerintah Kabupaten Wajo perlu memanfaatkan peluang ini dan memetakan peta jalan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif untuk memanfaatkan tren demografi.

Tabel 2. 90
Proyeksi Bonus Demografi
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

KELOMPOK UMUR	2025	2030	2035	2040	2045
Usia Produktif	284.991	310.517	343.685	386.516	441.706
Persentase	67,02	64,85	62,38	59,58	56,45
Usia Tidak Produktif	140.254	168.291	207.276	262.238	340.728
Persentase	32,98	35,15	37,62	40,42	43,55
Bonus Demografi	144.737	142.225	136.409	124.278	100.978
Persentase	34,04	29,70	24,76	19,16	12,91

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

Berdasarkan tabel, jumlah penduduk Kabupaten Wajo yang masuk kategori usia produktif tahun 2025 di prediksi sebanyak 270.270 Jiwa atau

69,04 persen dari total populasi di tahun yang sama. Proyeksi sampai pada periode 2045 (Bonus Demografi kedua), Kabupaten Wajo masih berada pada bonus demografi dengan angka 41,79 persen. Kondisi kependudukan ini menandakan perlunya strategi perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi yang dapat membantu mengoptimalkan potensi bonus demografi dan menghindari risiko terjadinya bonus demografi yang tidak termanfaatkan. Ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.6.2. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan dan kebutuhan terhadap rumah semakin meningkat tiap tahunnya. Besarnya kebutuhan tersebut perlu diakomodir oleh pemerintah daerah dalam rencana pembangunan agar setiap keluarga ke depannya mampu dipenuhi kebutuhan rumahnya, baik dari ketersediaan lahan, kelayakan lingkungan, akses terhadap fasilitas publik, serta standar kelayakan huninya. Adapun proyeksi kebutuhan rumah dan luas permukiman Kabupaten Wajo tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2. 51
Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Luas Permukiman
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

Proyeksi Kebutuhan	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Rumah	Unit	97.865	96.709	98.792	101.667	105.391
Standar Luas Ruang	m2	36 meter persegi untuk 4 anggota keluarga				
Luas Permukiman	Ha	352,31	348,15	355,65	366	379,41

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman 2023 (Diolah)

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan rumah dan luas permukiman Kabupaten Wajo tahun 2025–2045, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan rumah dan kebutuhan penyediaan lahan permukiman akan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan rata-rata jumlah jiwa dalam rumah tangga berdasarkan data demografi RKPD 2023 yaitu sebesar 4 jiwa dalam satu rumah tangga, dengan estimasi kebutuhan luas ruang satu orang adalah 9 meter persegi (m2) atau 36 m2 untuk satu rumah tangga, maka besaran jumlah proyeksi kebutuhan rumah dikalikan dengan standar luas ruang

sehingga didapatkan luas permukiman yang dibutuhkan. Pada tahun 2045, diperkirakan kebutuhan rumah sebanyak 105.391 unit, dengan luas permukiman seluas 379,41 ha.

2.6.3. Kebutuhan Air Bersih/Air Minum

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan dalam kehidupan. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan air bersih. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan air bersih akan semakin meningkat setiap tahun seiring meningkatnya jumlah penduduk. Pelayanan pengelolaan sumber daya air merupakan program pemerintah daerah dalam mendapatkan air bersih dan sehat dengan standar mutu air yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat. Dalam mendukung pengelolaan sumber daya air, dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan yang integratif terhadap sistem pengelolaan air di Kabupaten Wajo. Sistem pengelolaan air yang dibangun terdapat 4 komponen utama diantaranya yang pertama bangunan sadap atau intake yaitu struktur yang dibangun pada sumber air untuk mengarahkan air ke suatu kolam di dalamnya agar dapat diteruskan ke komponen lain. Komponen kedua adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA), yaitu suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air layak dikonsumsi. Komponen ketiga adalah Reservoir Air, yaitu tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen jika diperlukan suatu waktu. Komponen keempat adalah Pipa Jaringan Distribusi Utama yang berfungsi untuk mengalirkan air dari Reservoir ke masyarakat. Jaringan distribusi menggunakan pipa dengan aliran yang bertekanan, dimana di sepanjang pipa dihubungkan dengan sambungan masyarakat. Adapun data proyeksi terkait kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Wajo tahun 2025 hingga tahun 2045 sebagai berikut:

Tabel 2. 92
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	425.244	478.808	550.961	648.754	782.434
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M3/Tahun)	13.948.012	15.704.897	18.071.516	21.279.116	25.663.848

Sumber: Dinas PUPR, 2023 (Diolah)

Dalam membangun sarana dan prasarana sistem pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, dibutuhkan 4 komponen utama dengan masing-masing 1 unit bangunan sadap/intake, 1 unit instalasi pengelolaan air dengan kapasitas 50 liter/det, 1 unit reservoir air dengan kapasitas 700 m3 dan 10 km pipa jaringan distribusi utama. Pengalokasian proyeksi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air dilakukan dengan mempertimbangkan target hingga tahun 2045 menjadi 22 unit agar jaringan distribusi air mencapai 100% (persen) di seluruh wilayah Kabupaten Wajo.

2.6.4. Kebutuhan Energi dan Kelistrikan

Salah satu infrastruktur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah energi listrik. Listrik digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Dengan menggunakan asumsi kebutuhan listrik sebesar 1,47 kilo watt per rumah tangga, maka diperkirakan kebutuhan daya listrik di Kabupaten Wajo hingga 2045 mencapai 71.265 kilo watt.

Tabel 2. 52
Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Energi dan Listrik
Kabupaten Wajo 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk	425.244	478.808	550.961	648.754	782.434
Jumlah Rumah	97.865	96.709	98.792	101.667	105.391
Proyeksi Kebutuhan Listrik	66.176	65.394	66.803	68.746	71.265

Sumber: Perusahaan Listrik Negara, 2023 (Diolah), Bappelitbangda, 2023 (Diolah)

2.6.5. Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan

Data menunjukkan bahwa rata-rata volume timbunan sampah 5 tahun terakhir di Kabupaten Wajo sebanyak 73,062.2 Ton. Volume sampah yang tinggi diakibatkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat yang disertai rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah yang asumsi total sampah per orangnya sebanyak 0,1825 ton/tahun. Pola konsumsi masyarakat yang belum berwawasan lingkungan serta belum adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten terhadap pengelolaan persampahan merupakan faktor-faktor yang menjelaskan tingginya volume sampah. Oleh karena itu, penanganan sampah di Kabupaten Wajo memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang sehingga dalam perencanaan jangka panjang

hingga tahun 2045, dilakukan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah sebagai berikut:

Tabel 2. 53
Proyeksi Timbunan Sampah
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	425.244	478.808	550.961	648.754	782.434
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton)	77.607,0	87.382,5	100.550,4	118.397,6	142.794,2
Dibutuhkan Sarana TPA dengan kapasitas 50 Ton / Hari (Lokasi)	4	5	6	6	8
TPST	3	3	3	3	2
TPS 3R	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023 (Diolah)

Berdasarkan data proyeksi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana penanganan sampah mengikuti proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk, peluang terbentuknya keramaian baru serta perluasan pembangunan rumah dan pemukiman yang dapat mempengaruhi volume produksi sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2025 diproyeksikan akan meningkat sehingga kebutuhan sarana penanganan sampah juga diproyeksikan akan meningkat hingga tahun 2045. Dengan asumsi proyeksi timbunan sampah sebanyak 142.794,2 ton per tahun di tahun 2045, maka dibutuhkan sebanyak 8 sarana TPA dengan kapasitas 50 ton/hari, 2 TPST, dan 1 TPS 3R di Kabupaten Wajo.

2.6.6. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan elemen penting bagi manusia. Dengan tubuh yang sehat, maka manusia dapat beraktivitas dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, maka diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan proyeksi jumlah penduduk, maka diproyeksikan kebutuhan terhadap rumah sakit sebanyak 3 unit, puskesmas sebanyak 25 unit, dan puskesmas pembantu sebanyak 60 unit.

Tabel 2. 54
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

No	Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
1.	Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2.	Puskesmas	25	23	24	24	25
3.	Puskesmas Pembantu	56	57	58	59	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo 2023

2.6.7. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang pembangunan prioritas dalam upaya pelayanan dasar serta pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Wajo. Pentingnya pendidikan tentu harus didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai sehingga analisis terkait kebutuhan pembangunan pendidikan sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wajo tahun 2025 hingga tahun 2045 dalam proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2. 55
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

No.	Jumlah Kebutuhan Ruang Sekolah	Satuan	Proyeksi Per Periode				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk <5 Tahun	Jiwa	27.232	33.987	42.419	52.942	66.075
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas PAUD	20	1.362	1.699	2.121	2.647	3.304
2	Jumlah Penduduk 6 S/D 12 Tahun	Jiwa	49.780	53.615	57.746	62.195	66.986
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas SD/Mi	35	1.422	1.532	1.650	1.777	1.914
3	Jumlah Penduduk 13 S/D 15 Tahun	Jiwa	21.342	24.061	27.126	30.581	34.476
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas SMP/Mts	35	610	687	775	874	985

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo 2024 (Diolah)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo 2024 (Diolah)

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan ruang sekolah Kabupaten Wajo tahun 2025 – 2045, maka jumlah ruang sekolah akan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2045 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah. Proyeksi yang digunakan dalam satuan jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan standar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan standar untuk kebutuhan ruang kelas PAUD adalah 20 siswa per ruang, untuk satuan kebutuhan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs adalah 35 siswa per ruang. Berdasarkan satuan tersebut dapat dihitung kebutuhan kelas berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah setiap tahunnya, sehingga didapatkan data proyeksi kebutuhan ruang sekolah secara keseluruhan. Pada tahun 2045, jumlah ruang sekolah PAUD diperkirakan sebanyak 3.304 ruang, SD sebanyak 1.914 ruang, dan SMP sebanyak 985 ruang.

2.6.8. Kebutuhan Fasilitas Teknologi Informasi

Di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, kebutuhan teknologi komunikasi sangat dibutuhkan dalam menunjang berbagai kegiatan sehari-hari. Kehadiran internet memberikan pola kebiasaan baru dalam masyarakat dan hingga hari ini kebutuhannya semakin meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Kominfotik memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kelancaran pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Wajo. Adapun proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi di Kabupaten Wajo tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2. 56
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Teknologi Informasi
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

No	Uraian	Satuan	Proyeksi Fasilitas Teknologi Informasi				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Base Tranceiver Station (BTS)	Unit	25	24	25	26	26
2	Mobil Layanan Telekomunikasi	Unit	5	4	5	5	6

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik,2023 (Diolah)

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informsi di Kabupaten Wajo, kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana penunjang telekomunikasi jaringan nirkabel atau Base Tranceiver Station (BTS) masih sangat dibutuhkan. Berdasarkan data proyeksi tahun 2025 kebutuhan BTS diperkirakan sebanyak 25 unit dan cenderung mengalami

peningkatan bersamaan dengan proyeksi peningkatan jumlah penduduk, kemunculan pusat keramaian baru serta perluasan pembangunan rumah dan pemukiman, dimana pada tahun 2045 diperkirakan sebanyak 26 unit. Lebih lanjut, dalam memasifkan pelayanan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Wajo memproyeksikan kebutuhan dalam pengadaan mobil layanan telekomunikasi dimana pada tahun 2045 sebanyak 6 unit. Tahun 2030 mengalami penurunan sebanyak 3 unit namun meningkat lagi hingga tahun 2045 sebanyak 6 unit.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

2.7.1. Pola ruang

Rencana pola pemanfaatan ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budi daya). Tujuan pengembangan rencana pola pemanfaatan ruang antara lain agar pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja, terciptanya sinkronisasi antara rencana pola pemanfaatan ruang dan rencana struktur tata ruang yang dikembangkan, memperhatikan kesesuaian peruntukan pemanfaatan lahan dan kondisi eksisting, serta mewujudkan aspirasi masyarakat.

Rencana pola ruang wilayah tersebut memiliki nilai strategis kabupaten dan/atau lintas kecamatan dan/atau kota. Kebijakan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari.

Berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kabupaten Wajo terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.14.

secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Penetapan suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu, selain mengacu pada kriteria harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu:

- 1) Lingkungan buatan, sosial, dan interaksi antar wilayah;
- 2) Tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan;
- 3) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- 4) Berdasarkan fungsinya, kawasan budidaya dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan pertahanan dan keamanan.

2.7.3. Kawasan Lindung

Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap peruntukan kawasan budidaya. Rencana peruntukan kawasan lindung di Kabupaten Wajo terdiri dari:

a. Badan air

Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Badan air terdapat di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Wajo.

b. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung). Pemantapan kawasan hutan lindung bertujuan mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Wajo terdapat di Kecamatan Bola, Kecamatan Keera dan Kecamatan Pitumpanua. Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Keera yang

ditetapkan sebagai *holding zone*, mendapatkan usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan ini merupakan kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Wajo terdiri atas sempadan sungai dan sempadan danau, yang meliputi Kecamatan Belawa, Kecamatan Bola, Kecamatan Keera, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Tempe.

d. Kawasan ekosistem *mangrove*

Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau atau *mangrove*, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Kawasan ini meliputi Kecamatan Bola, Kecamatan Keera, Kecamatan Penrang, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Takkalalla.

2.7.4. Kawasan Strategis Daerah

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan hidup. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- Tata ruang di wilayah sekitarnya.
- Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Potensi wilayah beberapa kawasan di Kabupaten Wajo perlu didorong dalam bentuk kawasan strategis, maka perlu dilakukan perencanaan yang

lebih teknis dalam bentuk masterplan/rencana induk, Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas:

1. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Wajo, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
2. Kawasan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. kawasan kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua;
 - b. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Keera;
 - c. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Sajoanging;
 - d. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Penrang dan Kecamatan Takkalalla;
 - e. kawasan strategis pengembangan transmigrasi di Kecamatan Gilireng; dan
 - f. kawasan pengembangan wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe, Belawa, Tanasitolo, Sabbangparu.
3. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, ditetapkan di:
 - a. kawasan rumah adat Atakkae di Kecamatan Tempe; dan
 - b. kawasan pelestarian budaya dan pendidikan syiar agama Islam di Kecamatan Belawa.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, ditetapkan di:
 - a. kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Gilireng di Kecamatan Gilireng;
 - b. kawasan Pelabuhan Khusus LNG Keera di Kecamatan Keera; dan

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, ditetapkan pada kawasan sempadan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, Belawa, Tanasitolo, Sabbangparu.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Wajo terdiri atas:

1. keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan;
2. peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata;
3. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
5. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
6. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
7. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
8. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
9. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
10. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
11. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

2.7.5. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan,

1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan ditetapkan di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wajo;
2. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan seluas kurang lebih 2.326 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam) hektar ditetapkan di;
 - Kecamatan Belawa;
 - Kecamatan Bola;
 - Kecamatan Keera;
 - Kecamatan Majauleng;
 - Kecamatan Maniangpajo;
 - Kecamatan Pammana;
 - Kecamatan Pitumpanua;
 - Kecamatan Sabangparu;
 - Kecamatan Sajoanging;
 - Kecamatan Tanasitolo; dan
 - Kecamatan Tempe.
3. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Gilireng sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 9.046 hektar;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 20,000 hektar;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian

- Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo dan sebagian Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 142 hektar;
- d. kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapas ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 14.947 hektar;
 - e. kawasan peruntukan perkebunan lada pala vanili dan tebu ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 28.599 hektar; dan
 - f. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh jambu mete dan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 8.384 hektar.
4. Kawasan peruntukan peternakan berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo sebagian wilayah Kecamatan Gilireng sebagian wilayah Kecamatan Majauleng sebagian wilayah Kecamatan Pammana sebagian wilayah Kecamatan Bola sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla sebagian wilayah Kecamatan Penrang sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging dan sebagian wilayah Kecamatan Belawa, Untuk peruntukan ternak kecil tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.

Catatan: Pasal 40 ayat 4 RTRW

”Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 70.502 (tujuh puluh ribu lima ratus dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan, Untuk di tahun 2023 kawasan perkebunan sudah mencapai luas sebesar 44,070 hektare”.

5. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di daerah seluas kurang lebih 125.728 (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare, dan ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih 99.043 (sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

2.7.6. Kawasan Perikanan

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bola kawasan pesisir Kecamatan Sabbangparu kawasan pesisir Kecamatan Tempe kawasan pesisir Kecamatan Pammana kawasan pesisir Kecamatan Takkalalla kawasan pesisir Kecamatan Majauleng kawasan pesisir Kecamatan Tanasitolo kawasan pesisir Kecamatan Belawa kawasan pesisir Kecamatan Maniangpajo kawasan pesisir Kecamatan Keera kawasan pesisir Kecamatan Pitumpanua kawasan pesisir Kecamatan Sajoanging dan kawasan pesisir Kecamatan Penrang dengan luasan kurang lebih 40,643 hektar;

Catatan : Pasal 41 ayat 2 RTRW:

“Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1 (satu) hektare terdapat di Kecamatan Sajoanging”

2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari:
Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 15.371 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bola;
 - b. Kecamatan Keera;
 - c. Kecamatan Penrang;

- d. Kecamatan Pitumpanua;
 - e. Kecamatan Sajoanging; dan
 - f. Kecamatan Takkalalla,
3. Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bola sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging sebagian wilayah Kecamatan Penrang sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe;
 4. Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Bola Kecamatan Bola BBI Kalola Kecamatan Maniangpajo BBI Surae Kecamatan Tempe BBI Kecamatan Takkalalla dan BBI Kecamatan Keera; dan
 5. Pelabuhan Pendaratan Ikan ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua dan sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging.

2.7.7. Kawasan Pariwisata

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdiri atas:
 - a. Kawasan Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
 - b. Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe; dan
 - c. Kawasan Wisata Mesjid Belawa di Kecamatan Belawa,
 - d. Kawasan Wisata Situs Tosora di Kecamatan Majauleng;
 - e. Kawasan Wisata Situs Pammana di Kecamatan Pammana;
 - f. Kawasan Wisata Situs Makam Puang Masora di Kecamatan Maniangpajo;
 - g. Kawasan Wisata Situs Istana Datunna Cina di Kecamatan Pammana;
 - h. Di tahun 2023 kawasan rumah adat atakkae di Kecamatan Tempe sudah memiliki Surat Keputusan Bupati Wajo dan untuk kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah lainnya sementara dalam proses.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:
 - a. Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
 - b. Kawasan Wisata Air Terjun Awo di Kecamatan Keera;
 - c. Kawasan Wisata Air Terjun Maniangpajo di Kecamatan Maniangpajo;

- d. Kawasan Wisata Alam Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
 - e. Kawasan Wisata Alam Pantai Pasir Putih di Kecamatan Bola;
 - f. Kawasan Wisata Telaga Biru di Kecamatan Bola;
 - g. Kawasan Wisata Pantai Bangsalae di Kecamatan Pitumpanua;
- 3.** Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas:
- a. Kawasan Wisata Rumah Adat Maniangpajo di Kecamatan Maniangpajo;
 - b. Kawasan Agrowisata Sutera SempangE Desa Pakkanna di Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Sabbangparu.

2.7.8. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi

- 1. Kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- 2. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare terdapat di Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Keera, Dan pengembangan sumur blok Wasambo (Walanga, Sampi-Sampi, Bongi) dan Blok EAST Walanga kurang lebih 3,5 hektare.
- 3. Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Pitumpanua.

2.7.9. Kawasan Peruntukan Industri

- 1. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berskala besar seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, terdapat di Kecamatan Keera.
- 2. kegiatan industri kecil dan menengah diatur pada Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara bersyarat di 14 Kecamatan.

2.7.10. Kawasan Peruntukan Perdagangan

Kawasan peruntukan perdagangan merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa yang terdapat dalam sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan pada Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan yang tersebar di 14 Kecamatan,

2.7.11. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 638/KPTS/Um/8/1981, kriteria fisik wilayah untuk penentuan lokasi tanaman tahunan adalah lokasi yang mempunyai skor/nilai untuk faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan adalah 125 sampai 175.

Kriteria kesesuaian lahan adalah bahwa suatu wilayah pada kawasan penyangga dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai areal tanaman tahunan jika memenuhi syarat kesesuaian lahan untuk tanaman tahun yang bersangkutan. Syarat kesesuaian yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai kesesuaian lahan dari sangat sesuai sampai marginal untuk tanaman tahunan. Dalam penetapan pilihan komoditi tanaman tahunan selain pertimbangan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi.

2.7.12. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pengelolaan kawasan permukiman berupa memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, tersedianya sumber air baku, serta memiliki akses yang tinggi.

Pada umumnya pola atau bentuk permukiman yang terjadi mengikuti bentuk permukaan lahan yang relatif rendah dan datar dengan kemiringan lereng antara 0-15% yang keberadaannya mengikuti pola pembentukan jaringan jalan secara linier. Pola-pola permukiman merupakan bentukan awal dari sekelompok perumahan yang berada dalam satu kesatuan batas tertentu yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas pendukung lingkungan guna mempermudah tingkat pelayanan dan kesejahteraan penduduk yang mendiaminya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Wajo mengacu pada berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi daerah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan masalah tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan, agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Wajo yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam jangka panjang. Permasalahan tersebut diuraikan lebih detail sebagai berikut:

3.1.1 Rendahnya Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Kabupaten Wajo yang diukur melalui PDRB per kapita atas dasar harga berlaku relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di regional Sulawesi Selatan. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia sebagai negara maju. Pendapatan per kapita sebuah negara maju paling rendah US\$ 11.906 per tahun atau sekitar Rp 184,5 juta per tahun per kapita. Dengan demikian, agar dapat berkontribusi terhadap perwujudan cita-cita nasional tersebut, PDRB per kapita Kabupaten Wajo diperkirakan harus mencapai 184,5 juta per kapita per tahun atau tiga kali lebih besar dibandingkan PDRB per kapita Kabupaten Wajo tahun 2022.

Rendahnya PDRB per kapita menunjukkan masih rendahnya produktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang masih rendah, terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, minimnya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam proses produksi, serta rendahnya nilai tambah ekonomi pada sektor-sektor usaha yang ada di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wajo, yang ditunjukkan dengan angka rasio gini yang menempatkan Kabupaten Wajo pada posisi ke 5 tertinggi dari 24

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tingginya rasio gini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi daripada kelompok berpenghasilan rendah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, penurunan rasio gini masih relatif lambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja belum menerima upah yang memadai untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Wajo agar mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah harus dirancang sedemikian rupa agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wajo, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan anggaran berperan efektif dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan menurunkan ketimpangan pendapatan, sehingga masalah ini harus mendapat prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah untuk jangka panjang.

3.1.2 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wajo berada pada posisi ke 4 terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan tersebut juga lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wajo antara lain kurang efektifnya intervensi penanganan akibat perbedaan data kemiskinan dari berbagai sumber yang menggunakan parameter dan metodologi pengukuran yang beragam, penurunan laju kemiskinan yang melambat, serta belum maksimalnya intervensi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan terpadu. Selain itu, penanganan kemiskinan di pedesaan masih kurang optimal, begitu pula dengan akses layanan sosial yang masih terbatas karena kondisi geografis. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, dengan didukung oleh data yang akurat serta melibatkan komitmen dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

3.1.3 Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo ditunjukkan oleh usia harapan hidup (UHH) yang lebih rendah dibandingkan angka nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, yang disertai tingginya tingkat prevalensi stunting pada balita serta peningkatan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis setiap tahun. Kondisi tersebut terjadi akibat masih minim dan belum meratanya akses dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, masih rendahnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif tentang pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi.

Untuk mencapai kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat, maka peningkatan ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk optimalisasi penyebaran tenaga kesehatan terlatih dan layanan kesehatan ke seluruh wilayah, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh penduduk, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk penerapan pola hidup sehat, harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Wajo.

3.1.4 Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan dasar dan lanjutan di Kabupaten Wajo masih relatif lebih rendah. Hal ini diindikasikan dengan angka RLS dan HLS yang masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Hingga tahun 2023, Kabupaten Wajo belum mampu mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca dan numerasi. Capaian literasi tahun 2023 baru mencapai 55,94 persen sementara numerasi hanya mencapai 48,87 persen.

Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Wajo adalah belum meratanya akses pendidikan berkualitas untuk anak usia 5 tahun ke atas, yang disertai dengan tingginya angka putus sekolah (*dropout*) pada kelompok anak berusia 7-18 tahun dari kelas 1 hingga 9. Selain itu, disparitas dalam kualitas sarana prasarana pendidikan, termasuk teknologi pembelajaran antara perkotaan dan pedesaan, serta distribusi tenaga pendidikan yang memenuhi standar kompetensi juga belum merata di seluruh

wilayah, memberikan kontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Wajo.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Program wajib belajar 13 tahun, yang didukung oleh tenaga pendidik kompeten, harus menjadi prioritas utama untuk memastikan anak-anak dalam semua jenjang pendidikan dapat mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wajo. Selain itu, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meminimalisir ketimpangan dan menjamin terlaksananya pendidikan yang inklusif antar wilayah dan antar kelas masyarakat.

3.1.5 Masih Rendahnya Daya Saing Daerah

Pencapaian indeks daya saing daerah Kabupaten Wajo masih rendah dan berada di bawah nasional dan provinsi. Belum optimalnya daya saing Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh masih belum stabilnya institusi, masih rendahnya pasar produk, belum efisiennya pasar tenaga kerja, masih lemahnya sistem keuangan, dan rendahnya dinamisme bisnis di Kabupaten Wajo.

Oleh karena itu, perlu mendorong kebijakan daerah sebagai upaya penguatan iklim sosial, politik, hukum dan keamanan. Penting pula untuk meningkatkan keterbukaan pasar dengan mendorong kemampuan usaha kecil dan menengah untuk bersaing dengan kelompok usaha sedang dan besar, serta menyediakan kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Selain itu, diperlukan upaya untuk memprioritaskan efisiensi pasar tenaga kerja melalui peningkatan fleksibilitas tenaga kerja dan mendorong peningkatan besarnya upah tenaga kerja. Begitu pula dengan melakukan upaya penguatan sistem keuangan yang mampu memediasi alokasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi potensi krisis keuangan, serta meningkatkan kemudahan melakukan bisnis melalui administrasi dan budaya kewirausahaan.

3.1.6 Masih Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca

Tingkat emisi gas rumah kaca di Kabupaten Wajo menunjukkan tren meningkat dan masih jauh di bawah capaian provinsi dan nasional. Salah satu hal yang menyebabkan lambatnya penurunan emisi GRK adalah belum

optimalnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis, terutama lahan yang terdampak oleh aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan. Selain itu, pembukaan dan/atau perluasan lahan dan alih fungsi untuk aktivitas ekonomi, ditambah dengan kurangnya penerapan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, perlu memprioritaskan upaya yang konsisten dan berkelanjutan agar Kabupaten Wajo dapat mencapai penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem, serta memberdayakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan garis pantai sepanjang 103 km. Hal ini mencakup penerapan intensifikasi sektor ekonomi rendah karbon, termasuk transisi penggunaan bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

3.1.7 Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dalam Pembangunan

Konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi penerapan konsep tersebut, khususnya ekonomi hijau di Kabupaten Wajo belum optimal. Komitmen pembangunan ekonomi daerah dengan menerapkan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo belum menjadi sebuah kesadaran bersama dan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya pencapaian dalam pilar lingkungan dikarenakan kualitas air yang masih di bawah standar. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan dan hutan, ketidakseimbangan antara alokasi ruang untuk kegiatan budidaya, serta rendahnya pendanaan alternatif berbasis lingkungan. Selain itu, peluang kerja dan investasi hijau, pengembangan produk-produk hijau, pengembangan potensi lokal, dan akselerasi transisi energi fosil ke energi baru terbarukan, serta implementasi ekonomi sirkular masih terbatas.

Dengan demikian, diperlukan integrasi kebijakan ekonomi hijau pada seluruh sektor pembangunan untuk memperoleh dukungan pendanaan

alternatif berbasis lingkungan. Juga diperlukan upaya yang lebih berfokus pada penggerak ekonomi hijau berupa pengembangan dan hilirisasi komoditas unggulan yang berkelanjutan, rendah emisi, dan resilien terhadap perubahan iklim.

3.1.8 Rendahnya Produktivitas Ekonomi Daerah serta Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas ekonomi Kabupaten Wajo cenderung melambat. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti beberapa sektor yang mengalami stagnasi atau perlambatan pertumbuhan, kondisi tenaga kerja yang tidak selaras antara kompetensi dan kebutuhan dunia kerja, rendahnya capaian rasio kewirausahaan, kondisi UMKM dan Ekraf yang belum diprioritaskan, kondisi UMKM yang belum masuk dalam rantai nilai produksi, kondisi pemanfaatan teknologi promosi dan distribusi hasil yang belum optimal, penerapan pariwisata berkelanjutan yang masih terbatas, lambatnya pengembangan konservasi alam, serta pengelolaan aset BUMD untuk menghasilkan laba bersih yang masih rendah (kaitannya dengan return of asset).

Kabupaten Wajo memiliki banyak potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut, namun belum diolah dengan optimal sehingga mempengaruhi produktivitas perekonomian Kabupaten Wajo yang relatif rendah hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Lambatnya pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi. Selain itu, sektor industri pengolahan yang potensial belum dapat dikembangkan dalam perekonomian Kabupaten Wajo karena kurangnya diversifikasi industri, kurang berkembangnya hilirisasi industri, lambatnya pertumbuhan industri kreatif, serta kurangnya fasilitas sarana pengolahan dan sarana pengembangan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi industri.

Demikian pula dengan produktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh ketidakselarasan antara keahlian dan keterampilan dan pendidikan pencari kerja dengan kebutuhan industri sehingga banyak pekerjaan yang diisi adalah *low paying/low skilled jobs*, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif belum menjadi prioritas, rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi promosi dan distribusi hasil,

belum optimalnya nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (ecotourism), serta belum optimalnya pengelolaan aset BUMD untuk menghasilkan laba bersih yang ditandai dengan menurunnya Return of Asset (RoA) BUMD di Kabupaten Wajo.

Perekonomian daerah Kabupaten Wajo perlu diarahkan untuk memperkuat UMKM dan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam unggulan dan industri kerajinan, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, untuk mendorong hilirisasi, Kabupaten Wajo harus membangun ekosistem industrialisasi, dimana produk yang dihasilkan oleh industri berorientasi ekspor.

Digitalisasi ekonomi juga memiliki peran vital dalam meningkatkan produktivitas ekonomi Kabupaten Wajo, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Dengan adopsi teknologi digital, Kabupaten Wajo bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, mempercepat aliran informasi, serta meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha di Kabupaten Wajo memperluas pasar melalui platform digital, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, dan memperbaiki sistem manajemen bisnis. Dengan demikian, digitalisasi ekonomi bukan hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan inklusif yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

3.1.9 Masih Rendahnya Penerapan IPTEK dan Inovasi

Rendahnya penerapan IPTEK dan inovasi daerah, baik dalam pelayanan publik maupun dalam kegiatan ekonomi masyarakat berkorelasi dengan kegiatan ekonomi unggulan yang berkembang di wilayah Kabupaten Wajo. Industri pengolahan yang belum berkembang secara merata, pertumbuhan industri kreatif dan rantai pasok ekonomi kreatif yang melambat, investasi yang belum merata pada sektor-sektor produktif, menjadi faktor pendorong masih kurangnya penerapan IPTEKIN dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Terbatasnya transformasi digital di Kabupaten Wajo berimplikasi pada melemahnya daya saing digital daerah. Hal ini ditandai dengan menurunnya

peringkat indeks daya saing digital Kabupaten Wajo hingga tahun 2023, bahkan capaian literasi digital Kabupaten Wajo lebih rendah dari nasional dan provinsi. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Masih rendahnya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat, sehingga masih terdapat sejumlah desa tanpa BTS. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

3.1.10 Kesenjangan Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan Kian Melebar

Dalam perspektif ideal pengembangan wilayah Kabupaten Wajo, ekonomi perkotaan dan perdesaan seharusnya terintegrasi secara fungsional dalam kaitan lapangan usaha primer, sekunder dan tersier (jasa-jasa). Berkembangnya sektor industri dan jasa di perkotaan sejatinya akan mampu menarik pertumbuhan sektor perdesaan dalam penyediaan bahan baku dan dukungan input produksi lainnya. Begitupun sebaliknya, berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan akan mendorong pengembangan industri pengolahan dan jasa layanan di perkotaan.

Pengurangan kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dapat dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan pertumbuhan kegiatan ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, agrowisata, serta mengembangkan konsep agropolitan. Akan tetapi, aktivitas utama masyarakat belum terfokus pada seluruh sektor tersebut, padahal ekosistem agropolitan mampu menjembatani kesenjangan ekonomi perkotaan dan perdesaan. Desa-desa juga belum berperan sebagai *hinterland*, yaitu wilayah di sekitar ekonomi atau pusat kota yang mendukung dan berperan sebagai penyedia sumber daya atau barang bagi kawasan tersebut, dan sebaliknya perkotaan belum mampu secara optimal dalam menyediakan pasar dan keterbatasan akses di wilayah *hinterland*. Hal ini disebabkan karena masih ada kesenjangan dalam ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, serta infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

3.1.11 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Wajo belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih rendahnya pencapaian Indeks Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menempatkan Kabupaten Wajo menduduki peringkat 12 di Sulawesi Selatan, dan tertinggal jauh dengan Kota Makassar dan Luwu Timur dengan capaian indeks tertinggi. Pelayanan publik juga belum mencapai kategori pelayanan prima, yang diukur dengan indeks pelayanan publik yang fluktuatif dan cenderung menurun, serta berada jauh dibawah indeks provinsi. Selain itu, reformasi birokrasi masih berjalan lambat, sementara disatu sisi, kemampuan daerah dalam menghasilkan inovasi sangat terbatas, diukur dari peringkat indeks inovasi daerah yang terus mengalami penurunan.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain masih lemahnya kebijakan dan manajemen SPBE, belum optimalnya penggunaan TIK dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kualitas aparatur yang masih rendah dan belum ditunjang oleh manajemen SDM yang efektif, masih lemahnya tata laksana organisasi, masih kentalnya intervensi politik di dalam birokrasi, serta masih rendahnya implementasi inovasi yang ada, baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, perlu dilakukan optimalisasi kebijakan SPBE, termasuk dalam aspek arsitektur kebijakan internal, manajemen data, pusat layanan data, dan kematangan kebijakan pengguna sistem penghubung layanan. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah penerapan manajemen dan audit SPBE, terutama terkait manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen aset TIK, kompetensi sumber daya manusia serta manajemen perubahan. Selain itu, perlu mengoptimalkan penggunaan TIK dalam administrasi pelayanan publik dan pelayanan pemerintah, yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan data dan keamanan informasi, serta pengurangan risiko korupsi pelayanan publik.

3.1.12 Masih Rendahnya Stabilitas dan Ketenteraman Umum

Keamanan dan ketertiban umum yang stabil dan terjaga dengan baik mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah. Stabilitas dan ketenteraman umum dapat menjadi fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Stabilitas ketenteraman akan mengundang pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan membentuk iklim bisnis yang kondusif.

Akan tetapi, kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Wajo belum bisa dikatakan kondusif, yang ditandai dengan angka kriminalitas yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Begitu pula dengan adanya ketimpangan dalam akses terhadap perlindungan dan hak-hak hukum di wilayah Kabupaten Wajo, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat, ketidakpastian dalam penegakan hukum, dan tingginya pelanggaran ketertiban umum masih perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem politik dan proses demokrasi serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak demokratis merupakan refleksi dari rendahnya literasi politik masyarakat, yang diperburuk dengan melimpahnya informasi yang tidak berkualitas terutama melalui media sosial. Hal tersebut diperparah dengan belum diterapkannya kurikulum pendidikan literasi media dan politik, kurang meratanya kampanye publik yang menjangkau semua lapisan masyarakat, pengawasan terhadap konten media sosial, dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang tepat masih kurang memadai.

3.1.13 Ketidakstabilan Ekonomi Makro dan Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah

Ketidakstabilan ekonomi makro pada umumnya dipengaruhi oleh faktor fiskal dan moneter, baik secara terpisah maupun bersamaan. Namun dalam konteks pembangunan daerah, ketidakstabilan tersebut lebih didominasi oleh kebijakan fiskal karena kuatnya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi langsung terhadap kondisi ekonomi daerah. Ketidakstabilan ekonomi makro Kabupaten Wajo terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah, sehingga berdampak terhadap keterbatasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Keterbatasan fiskal daerah tersebut ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pusat, serta rendahnya rasio pajak daerah terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber pendapatan lokal seperti pajak dan retribusi daerah, aset daerah, serta memanfaatkan pembiayaan alternatif. Selain itu, belanja daerah lebih didominasi oleh belanja pegawai yang seharusnya digunakan untuk investasi aset produktif.

Dalam hal perkembangan harga-harga umum, tingkat inflasi Kabupaten Wajo yang lebih tinggi dari provinsi dan nasional, mengindikasikan

ketergantungan ekonomi Kabupaten Wajo pada sejumlah wilayah yang masih cukup tinggi. Ketergantungan terhadap faktor eksternal menyebabkan tingginya biaya produksi, distribusi, dan konsumsi (*high cost economy*). Biaya input yang meningkat akan berdampak pada penurunan produksi, serta biaya transportasi dan logistik yang tinggi, sehingga berdampak terhadap berlanjutnya tekanan inflasi jangka panjang dan ketidakstabilan ekonomi daerah.

Oleh sebab itu perlu melakukan upaya untuk mengurangi keterbatasan fiskal daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dengan memanfaatkan skema pembiayaan alternatif untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan upaya intensif untuk pencegahan dan pengendalian inflasi, antara lain melalui kebijakan fiskal, serta mengupayakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan kerjasama antar daerah.

3.1.14 Kesadaran Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju Masih Lemah

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Wajo mengalami pasang surut. Kurang optimalnya dialog antar masyarakat yang memiliki nilai berbeda, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, serta melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini juga menjadi penyebab lemahnya kesadaran moderasi beragama.

Sejalan dengan itu, pemajuan kebudayaan di Kabupaten Wajo juga belum berjalan dengan optimal. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Wajo, yaitu (1) Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif; (2) Kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya; (3) Melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga; (4) Lemahnya koordinasi, kerja sama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; (4) Lemahnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya;

serta (5) Belum tersedianya informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Wajo perlu memperhatikan optimalisasi tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif; pengembangan inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya; penguatan pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga; penguatan koordinasi kerja sama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; serta pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

3.1.15 Perlindungan Sosial yang Adaptif Belum Diterapkan Secara Menyeluruh

Perlindungan sosial yang adaptif diperlukan untuk menyangga ekonomi masyarakat jika terjadi krisis, guncangan atau perubahan siklus kehidupan. Perlindungan sosial diperuntukkan untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, sehingga perlu penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan sosial.

Penerapan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) di Kabupaten Wajo saat ini masih tergolong rendah. Terkendala oleh sejumlah faktor seperti belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan memerlukan perhatian khusus; peningkatan beban tanggungan bagi usia produktif akibat rasio ketergantungan penduduk meningkat; belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif; lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor berbasis lahan yang belum optimal dilakukan proses peningkatan nilai tambah dan pengembangan kualitas SDM; pengembangan sektor jasa dan industri yang masih bertumpu di perkotaan; ketidaksetaraan dalam akses pembiayaan dan sumberdaya antara perdesaan dan perkotaan; rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal; serta terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di

sektor ekonomi formal dan informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak.

3.1.16 Kualitas Ketahanan keluarga dan Kesenjangan Gender yang Masih Lemah

Masih lemahnya kualitas ketahanan keluarga di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa pembangunan keluarga masih kurang responsif gender dan masih kurang dalam pemenuhan hak anak. Hal tersebut diindikasikan dengan belum berfungsinya keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera. Selain itu, menurunnya kualitas ketahanan keluarga ditandai oleh menurunnya kualitas ketahanan sosial psikologi keluarga; kualitas ketahanan sosial budaya keluarga masih di bawah nasional; Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan relatif kecil penurunannya dari tahun ke tahun; Semakin menurunnya persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya melakukan kegiatan keagamaan; Persentase rumah tangga perkawinan anak yang tinggi, lebih tinggi dari capaian nasional.

Upaya sinergis lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal perlu dioptimalkan. Upaya tersebut harus didukung dengan penyediaan lembaga layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi (baik dari aspek tenaga pemberi layanan), sarana prasarana dan jenis layanannya. Selain itu, peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga menjadi faktor penting yang patut diperhatikan untuk mewujudkan kualitas ketahanan keluarga.

Salah satu fondasi dalam mewujudkan kualitas ketahanan keluarga adalah tercapainya kesetaraan gender. Hal ini penting, mengingat kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia. Kesenjangan gender dianggap prasyarat pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat untuk masyarakat, sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan.

Terdapat tiga dimensi penyebab ketimpangan ini, dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan dipengaruhi

oleh beberapa faktor meliputi keadaan geografis suatu wilayah terutama pada daerah terpencil yang mengakibatkan akses layanan kesehatan terbatas; Biaya persalinan yang tinggi, sementara sebagian masyarakat miskin belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional; Rendahnya akses masyarakat perdesaan terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas; Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak mendukung kualitas hidup ibu dan bayi baru lahir; Dan ketersediaan SDM layanan kesehatan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yang perlu disikapi dengan serius yaitu kesetaraan akses masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terhadap pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas, termasuk pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus hingga jenjang pendidikan tinggi seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya. Selain itu ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan yang berkualitas di seluruh jenjang dan wilayah, perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kesetaraan pada dimensi pemberdayaan.

Pada dimensi pasar tenaga kerja perlu ditingkatkan akses terhadap lima modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan dan peluang kerja terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.

3.1.17 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Wajo belum optimal. Hal ini diindikasikan dari angka Indeks Perlindungan Anak yang berada di bawah nilai indeks provinsi dan nasional, serta pada tingkat regional masih berada di bawah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Soppeng. Selain itu, angka perkawinan anak juga mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir, yang menempatkan Kabupaten Wajo

berada pada peringkat 2 tertinggi setelah Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak adalah ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Salah satu faktor ekonomi yang krusial adalah kemiskinan. Faktor budaya diindikasikan oleh norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya perempuan seharusnya menikah muda), maupun interpretasi agama dan tradisi lokal. Faktor kesehatan diindikasikan oleh ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kondisi geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana.

Upaya dalam penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak antara lain : (1) Memperkuat komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak; (2) mengoptimalkan peran bimbingan dan pengawasan terhadap perwujudan Kabupaten Layak Anak; (3) Memperkuat jejaring antar *stakeholder* dalam penanganan permasalahan perlindungan anak; dan (4) Mengoptimalkan layanan pengaduan terpadu, penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi anak antar sektor dan antar wilayah.

3.1.18 Sinergitas dan Kerjasama Antar Daerah Tidak Berjalan Efektif

Kerangka pengembangan wilayah belum sepenuhnya diterapkan sehingga tidak berjalan efektif hingga saat ini. Kerjasama wilayah substansial (berbasis komoditas) dan kawasan (berbasis letak geografis) tidak berjalan dengan baik, dan banyak melahirkan ketimpangan antar wilayah, baik substansial maupun kawasan. Kesenjangan pembangunan antara kawasan di daerah Kabupaten Wajo, pada umumnya ditandai dengan kesenjangan infrastruktur wilayah, diantaranya kemantapan jalan yang ditunjukkan dengan kemantapan jalan nasional yang masih rendah, apalagi kemantapan jalan-jalan menunjukkan capaian yang lebih rendah. Konektivitas wilayah menjadi hambatan utama sehingga sinergitas dan kerjasama wilayah tidak berjalan efektif. Saat ini pemangku kepentingan tidak boleh mengabaikan fakta bahwa terjadi ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Wajo. Pemerintah Kabupaten Wajo berupaya mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengembangkan

skema kerja sama daerah baik berupa kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

3.1.19 Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam (air, tanah, udara) dengan meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk. Interaksi ketiganya mengakibatkan munculnya permasalahan seperti sampah dan limbah. Masalah persampahan tak hanya menjadi masalah lingkungan hidup di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah kabupaten khususnya Kabupaten Wajo. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan 3 indikator diantaranya indeks lingkungan hidup, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R.

Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi salah satunya oleh kualitas air, yang diukur dengan indeks kualitas air. Indeks Kualitas Air Kabupaten Wajo dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Begitupun dengan kondisi Kualitas Udara dan Tutupan Lahan. Adapun faktor penyebabnya adalah rendahnya kualitas air yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat tentang pembuangan limbah atau sampah pada sungai dan di Danau Tempe yang selama ini menjadi sumber air utama untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, aktivitas penebangan hutan untuk dialih fungsikan sebagai perumahan yang sebagian prosesnya tidak memperhatikan optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, tingginya dampak negatif yang terjadi di Danau Tempe akibat belum mempertimbangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta kurangnya pengawasan kesesuaian terhadap RTRW terutama aspek penyelenggaraan dan aspek pelaksanaan penataan ruang.

Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan bijak, dengan tetap memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup, utamanya pada peningkatan IKU, IKA dan IKLT. Dan juga untuk keberlangsungan fungsi Danau Tempe.

3.1.20 Tingginya Risiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di indikasikan oleh belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air; dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Menurunnya ketahanan energi di Kabupaten Wajo disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan industri dan rumah tangga; belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil.

Penurunan ketahanan air Kabupaten Wajo disebabkan oleh beragam faktor diantaranya terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman.

Permasalahan terkait menurunnya ketahanan pangan disebabkan masih rendahnya akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas. Masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; serta kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan.

3.1.21 Masih Tingginya Risiko Bencana dan Masih Rendahnya Mitigasi Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Wajo yang berada pada kategori tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo memiliki risiko bencana yang besar sehingga harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah ke depan. Tingginya risiko bencana di Kabupaten Wajo disebabkan oleh posisi geografisnya yang berada pada Sesar Walanae. Sesar Walanae merupakan patahan besar yang membentang di sepanjang bagian barat daya Sulawesi dan dikenal sebagai salah satu sumber utama gempa bumi di Pulau Sulawesi. Keberadaan Sesar Walanae menempatkan Kabupaten Wajo memiliki risiko

terhadap bencana gempa bumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dan likuifaksi akibat aktivitas tektonik dan seismik. Kondisi dan jenis tanah di Kabupaten Wajo juga menambah risiko terjadinya bencana yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur serta kerugian ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain itu, keberadaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo, selain memberikan nilai ekologis yang tinggi dan menjadi sumber penghasilan masyarakat, juga merupakan sumber utama banjir, terutama saat musim hujan tiba. Curah hujan yang tinggi, baik di Kabupaten Wajo dan/atau di Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang menyebabkan volume air yang masuk ke Danau Tempe meningkat secara drastis. Bukan hanya volume air yang masuk, tetapi juga terjadinya sedimentasi akibat erosi tanah di daerah tangkapan air dan aliran sungai yang membawa lumpur mengurangi kapasitas tampung danau, sehingga lebih mudah meluap saat volume air meningkat. Hal tersebut diperparah dengan kondisi topografi Kabupaten Wajo yang cenderung datar di beberapa kawasan sehingga berpotensi terhadap terjadinya genangan air terutama di musim hujan. Penyebab lainnya adalah perubahan penggunaan lahan di sekitar Danau Tempe dan hidrologi sungai yang tidak terkelola dengan baik.

Bentuk mitigasi bencana yang diimplementasikan selama ini masih minim. Masih minimnya infrastruktur yang tahan bencana seperti aspek kualitas bangunan ditambah dengan masih kurangnya upaya dalam edukasi dan pelatihan masyarakat terkait mitigasi bencana, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah jalur sesar.

Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana, mulai dari kesiap-siagaan, evakuasi dan penanganan pasca bencana perlu menjadi prioritas dalam formulasi kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo. Dibutuhkan upaya dan komitmen kuat untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dan meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-

isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar dalam Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wajo meliputi:

3.2.1 Penurunan Fungsi Danau Tempe

Danau Tempe merupakan salah satu danau yang mendapat prioritas penanganan oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Danau Tempe sedang mengalami permasalahan ekosistem, antara lain menurunnya volume tampungan air danau yang disebabkan sedimentasi di area tampungan, penurunan kualitas air yang disebabkan rendahnya pengelolaan dan tingginya pencemaran air oleh masyarakat sekitar, berkurangnya jenis tanaman di sekitar danau, dan hilangnya beberapa jenis fauna. Seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan tata guna lahan yang ada di sekitar danau tempe semakin menambah permasalahan yang ada di danau tempe.

Danau tempe diarahkan mampu menjadi kolam regulasi yang dapat melakukan pengaturan air yaitu dengan menampung air disaat terjadi kemarau dan mengurangi resiko bencana disaat terjadi banjir bagi tiga Kabupaten yang mengelilingi danau yaitu Wajo, Soppeng dan Sidrap.

3.2.2 Revolusi Industri dan Digitalisasi Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, pengembangan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Blockchain*, *Artificial Intelligence* (AI). Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat Kabupaten Wajo yang masih belum merata perlu menjadi perhatian agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal yang diiringi dengan penanganan resiko terjadinya disrupsi teknologi. Masyarakat yang berada di desa mayoritas masih memiliki kemampuan literasi dan pola pikir yang rendah terhadap teknologi.

Selain masyarakat, aparat pemerintah daerah juga perlu melakukan penyesuaian dan pengembangan implementasi teknologi kedalam urusan dan kegiatan didalam pemerintahan. Adopsi teknologi tersebut membutuhkan kualitas SDM yang memadai.

Pada aspek transformasi ekonomi, pengembangan kawasan pedesaan diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerintahan sehingga mampu mendorong skala ekonomi dari aspek produksi dan pengembangan pariwisata. Teknologi dan digitalisasi dapat dimanfaatkan dalam mengefisienkan proses adaptasi dalam menunjang tahapan transformasi di desa, khususnya bagi desa yang memiliki potensi yang besar. Namun disisi lain teknologi juga memiliki dampak buruk bagi masyarakat jika tidak digunakan secara bijak, oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir dalam mencegah dampak buruk yang dapat ditimbulkan, mengingat masih banyak masyarakat desa yang masih awam dalam mengenal teknologi.

3.2.3 *Aging Population* dan Bonus Demografi

Berdasarkan data kependudukan, Kabupaten Wajo memasuki era penuaan penduduk dan akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk dengan usia yang sudah tidak produktif. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak produktif tentu dapat mempengaruhi kondisi produktifitas suatu daerah baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, SDM dan fiskal.

Isu ini harus ditanggapi oleh pemerintah daerah secara imperative agar kondisi ini mampu diberikan alternatif yang memberikan keuntungan bagi daerah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh seperti peningkatan usia produktif dengan cara peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi usia yang lebih terbuka serta peningkatan persentase jaminan sosial.

3.2.4 Kesiapan Menunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA

Secara letak geografi, Pulau Sulawesi diapit oleh 3 koridor ekonomi yaitu Maluku selaku hub ekonomi biru, koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara selaku superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf Internasional serta koridor ekonomi Kalimantan yang merupakan superhub ekonomi nusantara. *Hub* merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai pusat kegiatan ekonomi atau perdagangan yang menjadi aktivitas bisnis di suatu wilayah, yang berfungsi sebagai pusat pertukaran barang, jasa dan informasi bagi pelaku ekonomi. Sedangkan *superhub* merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah pusat utama atau titik fokus yang memiliki peran dan fungsi yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan

hub. Superhub merujuk pada wilayah atau kawasan ekonomi yang berperan penting dalam perdagangan dan berfungsi sebagai pusat pertukaran barang, jasa, dan modal yang menggerakkan ekonomi nasional maupun global.

Pulau Sulawesi juga terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Strategisnya letak geografi dapat dimanfaatkan Kabupaten Wajo sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan dan mobilisasi komoditas. Dengan adanya pembangunan IKN juga dapat menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi, hal ini juga sekaligus mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional. Pare-pare yang berstatus kota besar dan Palopo berstatus kota sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Wajo memiliki posisi strategis karena berada diantara kedua kota tersebut.

Sulawesi ditetapkan sebagai wilayah dengan industri prioritas berbasis SDA diantaranya industri berbasis agro yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, industri berbasis hilirisasi tambang, serta industri berbasis sumber daya laut. Berdasarkan Peta sebaran potensi wilayah, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi seperti industri pariwisata, angkutan laut, industri kertas, percetakan dan media rekaman, industri bahan galian bukan logam, industri karet dan plastik. Besarnya potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Wajo, perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek agar pengelolaan SDA dapat menjadikan Kabupaten Wajo sebagai lumbung pangan di Sulawesi Selatan.

3.2.5 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan kegiatannya. Kondisi alih fungsi lahan di Kabupaten Wajo lebih besar diperuntukkan bagi permukiman masyarakat. Sawah dan lahan pertanian umumnya diubah menjadi perumahan, industri, dan infrastruktur perkotaan. Selain itu banyaknya bukit di Kabupaten Wajo yang dikeruk untuk dijadikan lahan oleh masyarakat. Alih fungsi ini berisiko mengakibatkan bencana alam, sumber serapan yang berkurang, hasil perkebunan berkurang dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dampak tersebut dapat dimitigasi apabila pemerintah daerah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga dapat

mempengaruhi tren kualitas lingkungan yang lebih baik kedepannya. Selain itu perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan RTRW Kabupaten Wajo.

3.2.6 Kerusakan Gunung Latimojong

Pegunungan Latimojong merupakan gunung tertinggi di Pulau Sulawesi dengan tujuh puncak yang dimilikinya. Kerusakan hutan yang terjadi di area Gunung Latimojong berawal dari lahirnya konsesi-konsesi tambang termasuk di area gunung Latimojong. Dalam kondisi krisis dan kritis, Pemerintah Pusat hingga Provinsi Sulawesi Selatan terus mengoleksi dan mengeluarkan konsesi-konsesi pengelolaan hutan di wilayah-wilayah penyangga termasuk Pegunungan Latimojong. Bentang Verbeek Latimojong telah ditetapkan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan yang berada di bawahannya yang tercantum di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 dan Peta InaRisk BNPB menetapkan bentang Pegunungan Latimojong merupakan wilayah rawan bencana banjir dan longsor tingkat sedang hingga tinggi.

Potensi petaka bencana banjir dan longsor bersumber dari kerusakan ekologis yang disebabkan penggunaan bentang pegunungan sebagai atap dan tiang penyangga serta hulu bagi tak kurang dari lima kabupaten di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Penurunan tutupan hutan ini karena masifnya pembukaan lahan, sekitar 70% pembukaan lahan dikarenakan aktivitas tambang emas, sementara 30% pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat sekitar. aktivitas tambang emas ini mengeruk tebing dan dinding sungai, sehingga menyebabkan luapan air sungai semakin deras ketika musim hujan.

Daerah yang berada di sekitar pegunungan Latimojong merupakan area dengan tanah yang produktif. Jika kejadian banjir dan longsor terus terjadi, maka hal tersebut dapat mengancam lumbung pangan nasional. Sulawesi Selatan merupakan lumbung pangan nasional, kejadian banjir ini akan mengancam ketahanan pangan nasional.

3.2.7 Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masih rendahnya pengelolaan SDA seperti upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru serta pola konsumsi dan pola produksi. Dalam aspek pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, peningkatan jumlah penduduk

harus diperhatikan Karena dapat berpengaruh besar dalam pola konsumsi SDA.

Sumber daya alam Kabupaten Wajo yang meliputi gas alam, perikanan, rumput laut, lahan pertanian yang luas dan kondisi tanah yang subur menjadikan Kabupaten Wajo berpeluang sebagai koridor ekonomi dengan industri berbasis SDA serta menjadi lumbung pangan di Sulawesi Selatan .

Sejauh ini sumber daya alam yang sangat berpotensi di Kabupaten Wajo adalah gas alam dimana telah dimanfaatkan sebagai sumber daya listrik di Sulawesi Selatan yang mampu menghasilkan 315 megawatt tiap tahunnya. Selain dimanfaatkan sebagai sumber daya listrik, potensi gas alam ini juga bisa dimanfaatkan menjadi gas untuk rumah tangga yang dapat mengalirkan gas alam tekanan rendah yang bisa langsung dipergunakan ke rumah-rumah warga dengan harga yang sangat ekonomis. Namun sampai saat ini instalasi gas untuk rumah tangga baru dirasakan langsung manfaatnya di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tempe, Kecamatan Pammana, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Tanasitolo. Empat kecamatan masih dianggap rendah karena masih ada 10 kecamatan lainnya, sementara disatu sisi ada potensi gas alam yang sangat melimpah. Menurut penelitian, Kabupaten Wajo memiliki cadangan gas kurang lebih 2 triliun *cubic feet* sehingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk pengembangan dan pengelolaan yang optimal agar memberi manfaat lebih luas bahkan bisa didistribusikan ke beberapa kabupaten yang ada di provinsi sulawesi selatan. Selain potensi tersebut diatas, gas alam yang ada di Kabupaten Wajo juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung hadirnya produksi petrokimia dimana gas alam sebagai salah satu bahan baku utamanya.

3.2.8 Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Wajo sebagai salah satu daerah penghasil produksi pangan di Sulawesi Selatan. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam pasokan bahan pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Wajo dengan kelas risiko tinggi diantaranya adalah bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vektor melalui air dan peningkatan suhu, sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

3.2.9 Pengelolaan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkannya sejumlah Kawasan Strategis di Sulawesi Selatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru bisa melahirkan sejumlah peluang baru bagi pembangunan daerah terutama di Kabupaten Wajo. Dalam jangka panjang diharapkan Kabupaten Wajo menjadi pendorong dan penggerak tata kelola niaga sektor pertanian mulai dari pusat-pusat produksi barang dan jasa mengingat potensi yang ada di Kabupaten Wajo sangat melimpah. Untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa hal untuk mendukung pengelolaan pusat pertumbuhan baru seperti perencanaan dan pengelolaan yang bijaksana, pembangunan infrastruktur pendukung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Peluang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru harus diimbangi dengan perluasan kerjasama skala regional dan nasional, penguatan kelembagaan distribusi dan pemasaran berbasis teknologi. Hal itu harus menjadi perhatian, tak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah pusat dapat mengintervensi untuk membantu Kabupaten Wajo dalam mengelola pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pemanfaatan peluang dengan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan pula berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat maupun ketimpangan antar wilayah.

3.2.10 Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata

Kinerja dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Wajo masih berada di bawah potensinya. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan, bahkan ada beberapa destinasi wisata yang terbengkalai. Pada Data Peruntukan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Wajo terdapat 3 kategori peruntukan yaitu kawasan peruntukan pariwisata Budaya dan Sejarah, Alam serta Buatan dengan total 16 objek wisata. Namun banyaknya objek wisata yang tersedia di Kabupaten Wajo tidak disertai dengan manajemen yang baik, sehingga produktivitas dan sumbangsih terhadap pendapatan daerah menurun.

Pemanfaatan potensi ekonomi kreatif juga belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan, transformasi digital dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, serta akses ke pasar luar juga masih terbatas. Rasio PDB Pariwisata ditargetkan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebesar 8,0 pada tahun 2045 sehingga butuh transformasi dalam mengembangkan potensi pariwisata Pemerintah Kabupaten Wajo. Dengan berkembangnya pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pelestarian dan tradisi lokal, dan dapat membantu mendiversifikasi ekonomi daerah.

3.2.11 Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Urgensi pembenahan infrastruktur dan konektivitas wilayah semakin penting seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk. Kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya berdampak pada kenaikan volume kendaraan pribadi yang belum diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur dan sistem jaringan yang memadai. Transportasi publik di Kabupaten Wajo juga belum sepenuhnya optimal difungsikan, padahal penting untuk menghubungkan secara efektif pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan simpul transportasi.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah memiliki hubungan timbal balik dengan pengembangan ekonomi makro dikarenakan dapat menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Dengan adanya ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, apabila infrastruktur belum memadai dapat mempengaruhi daya tarik iklim investasi. Pembangunan infrastruktur daerah seyogyanya disertai dengan perhatian pemerintah terhadap lingkungan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah

Pengertian visi dalam RPJPD ini adalah kondisi Kabupaten Wajo yang hendak dicapai dari pembangunan daerah pada akhir periode RPJPD tahun 2045, dengan mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Wajo. Perumusan visi daerah memperhatikan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Rumusan visi Kabupaten Wajo juga memperhatikan tujuan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW yaitu mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk mendukung keterpaduan fungsi kegiatan pertanian, perikanan, industri, minyak dan gas, serta pariwisata. Selain itu, rumusan visi RPJPD ini mengacu pada visi RPJPN Tahun 2025-2045 yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dengan memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah, serta menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka rumusan visi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

*WAJO DAERAH PERNIAGAAN YANG MAJU DENGAN PERTANIAN MODERN
YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN*

Rumusan visi tersebut memuat 3 (tiga) pokok visi yakni “Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”, yang disertai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Wajo sebagai “Daerah Perniagaan” dan “Pertanian Modern”. Adapun rumusan visi RPJPD Kabupaten Wajo dijelaskan sebagai berikut.

Daerah Perniagaan adalah kondisi Kabupaten Wajo pada tahun 2045 yang menjadi pusat perniagaan berbagai komoditas, dimana Kota Sengkang berfungsi sebagai kota jasa yang mendukung eksistensi Wajo sebagai daerah perniagaan. Secara historis, Kabupaten Wajo sudah tercatat sebagai simpul perdagangan dan eksistensi itu akan dipertahankan hingga tahun 2045 sebagai pilar utama bagi kemajuan daerah.

Pertanian Modern adalah kondisi pertanian di Kabupaten Wajo pada tahun 2045 yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, dengan menerapkan praktik ramah lingkungan, fokus pada konservasi sumber daya, pengurangan limbah dan emisi karbon, serta mengupayakan perlindungan keanekaragaman hayati. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian yang mencakup sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta tata niaga dan pasca panennya.

Maju adalah kondisi Kabupaten Wajo pada tahun 2045 yang masyarakatnya memiliki kesejahteraan yang tinggi dan merata, dimana pendapatan masyarakat mendekati atau setara dengan pendapatan masyarakat pada negara kategori maju dan tingkat pendapatan antar lapisan masyarakat relatif merata. Sumber utama kesejahteraan tersebut adalah aktivitas perniagaan dan pertanian yang didukung oleh industrialisasi. Maju juga merupakan kondisi dimana manusia Kabupaten Wajo memiliki derajat kesehatan yang optimal dan kualitas pendidikan yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, sehingga menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Maju tidak hanya mengacu pada kesejahteraan berdasarkan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mencakup penguatan religiusitas, yang menjadi bagian integral masyarakat Kabupaten Wajo.

Mandiri adalah kondisi Kabupaten Wajo pada tahun 2045 yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama pangan, yang didukung oleh kemandirian dalam pemenuhan sarana produksi, alat dan mesin, dan air irigasi. Mandiri juga merupakan kondisi Kabupaten Wajo yang berdaya saing tinggi dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Berkelanjutan adalah kondisi Kabupaten Wajo pada tahun 2045 yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang terpelihara, menjamin kesinambungan pembangunan serta ketersediaan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup generasi berikutnya. Selain itu, berkelanjutan dilandasi dengan semakin kuatnya komitmen dan implementasi dalam penerapan ekonomi hijau, resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Bentang lahan Kabupaten Wajo dikelola melalui pertanian berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, infrastruktur transportasi hijau, yang secara signifikan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi selanjutnya. Bentang laut, pesisir, dan perairan darat Kabupaten Wajo dikelola keberlanjutannya untuk menguatkan

perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata berbasis maritim, ketenagakerjaan berkompetensi maritim, dan kesehatan masyarakat pesisir. Berkelanjutan juga merupakan kondisi Kabupaten Wajo yang berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan regional, nasional, dan global, keberlanjutan pembangunan yang terjaga, penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta ketaatan kepada hukum yang berkeadilan, yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara substantif dan berkesetaraan gender, beragama secara maslahat, berkebudayaan maju, dan memelihara kearifan lokal. Adapun keselarasan visi RPJPD Kabupaten Wajo dengan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1
Penyelarasan Visi RPJP Nasional dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

Visi Nasional	Visi Provinsi Sulawesi Selatan	Visi Kabupaten Wajo
Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan	Wajo Daerah Perniagaan Maju dengan Pertanian Modern yang Mandiri dan Berkelanjutan

4.2 Sasaran Visi

Indikator pencapaian visi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 terdiri dari lima sasaran utama beserta targetnya sebagaimana termuat dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Sasaran Utama Pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan/ kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	72,72	415,09
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL)	80,9	254,25
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,25	7,15
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,40	0,52
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,358	0,318
		6. Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,76	4,01
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,01	7,79

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	45	60
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,7
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	74,68	79,10
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	10,6	78,77
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	71,14	75,37

Target sasaran visi daerah tersebut akan dicapai dalam setiap tahap pembangunan jangka menengah seperti tercantum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Target Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Wajo
Per Tahapan Lima Tahun

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target			
				2029	2034	2039	2045
1.	Peningkatan pendapatan/ kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	72,72	156,4	243,17	330,73	415,09
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	80,9	136,56	167,57	210,91	254,25
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,25	4,25	5,18	5,87	7,15
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,40	5,20	3,90	2,20	0,52
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,358	0,348	0,338	0,328	0,318
		6. Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,76	3,87	3,96	4,01	4,01
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,01	3,45	4,90	6,34	7,79

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target			
				2029	2034	2039	2045
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	45	50	55	58	60
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,29	3,42	3,56	3,7
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	74,68	75,79	76,67	78,00	79,10
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	10,6	15,44	36,63	60,85	78,77
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	71,14	71,99	73,04	74,10	75,37

Pencapaian sasaran visi Kabupaten Wajo mendukung pencapaian sasaran visi Nasional dan visi Provinsi Sulawesi Selatan. Keselarasan sasaran visi tersebut termuat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Penyelarasan Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Wajo
dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	72,72	415,09
		2. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	80,9	254,25
		3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	18,62-19,92		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,25	7,15
2.	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,40	0,52
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382	0,379 – 0,382		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332		5. Rasio Gini (Indeks)	0,358	0,318
		6. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,21	3,23		6. Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,76	4,01
						7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,01	7,79

3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	7. Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	45	60
						9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,7
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	8. Indeks Modal Manusia	0.54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	74,68	79,10
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	9. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	10,6	78,77
						12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	71,14	75,37

4.3 Misi Daerah

Misi daerah dalam RPJPD ini adalah rumusan mengenai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah secara jangka panjang sampai tahun 2045. Upaya umum tersebut tidak hanya bersifat evolutif atau reformatif, tetapi juga menggerakkan perubahan secara transformatif. Upaya transformasi merupakan keniscayaan agar Kabupaten Wajo berkontribusi secara signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional, yaitu sebagai lima besar kekuatan ekonomi di dunia pada tahun 2045 dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Perumusan misi daerah terdiri atas upaya umum terkait substansi transformasi, upaya umum terkait landasan transformasi, dan upaya umum terkait implementasi transformasi. Perumusan misi daerah juga memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJP Nasional 2025-2045 serta masalah dan isu strategis daerah yang hendak diatasi. Rumusan misi RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Kolaborasi untuk Transformasi Sosial

Transformasi sosial di Kabupaten Wajo tidak hanya bertujuan untuk melahirkan manusia yang unggul, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga mengandalkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi, baik sebagai penggerak maupun sebagai penerima manfaat pembangunan, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi. Misi ini mencakup upaya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menyediakan pendidikan berkualitas dan merata, serta menyediakan perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak.

2. Kolaborasi untuk Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi di Kabupaten Wajo bertujuan untuk menggiatkan berbagai aktivitas ekonomi dengan nilai tambah tinggi melalui kolaborasi antar berbagai pihak. Kolaborasi menjadi penting dalam menguatkan struktur ekonomi daerah dan membuka peluang usaha baru yang berbasis pada sumber daya ekonomi lokal, dengan didukung oleh penerapan teknologi, inovasi serta kewirausahaan yang tangguh untuk mempercepat penciptaan nilai tambah produk.

Misi ini mencakup upaya kolaborasi dalam menciptakan nilai tambah pada produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta dalam pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah, baik di sektor industri manufaktur maupun industri ekstraktif. Selain itu, kolaborasi juga mencakup upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian potensi ekonomi biru serta mendorong ekonomi hijau yang dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif.

3. Kolaborasi untuk Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan didorong oleh kolaborasi yang erat antara berbagai pihak. Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi, serta menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat yang partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, inklusivitas dan kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Misi ini mencakup upaya yang mengkolaborasikan berbagai pihak dalam memperkuat pemerintahan berbasis elektronik, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan inovasi daerah, dan digitalisasi pemerintahan.

4. Kolaborasi untuk Keamanan dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah merupakan salah satu landasan penting bagi penyelenggaraan ketiga misi kolaborasi untuk transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Keamanan daerah yang kokoh dan ekonomi makro daerah yang stabil dapat mempercepat pencapaian ketiga transformasi tersebut. Keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah akan menjadi fondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Misi ini mencakup upaya yang mengkolaborasikan berbagai pihak dalam menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, mewujudkan demokrasi substansial dalam kehidupan sosial politik, dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro daerah.

5. Kolaborasi untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan yang juga penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata

kelola di Kabupaten Wajo. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan. Ketahanan seperti itu diperlukan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terus terjaga secara berkelanjutan, sehingga setiap individu di Kabupaten Wajo dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Misi ini mencakup upaya umum yang mengkolaborasikan berbagai pihak dalam memelihara ketahanan keluarga dan membangun masyarakat yang berakhlak dan berbudaya sebagai pilar utama ketahanan sosial. Misi ini juga mencakup upaya yang mengkolaborasikan berbagai pihak dalam menjaga ketahanan ekologi yang senantiasa memiliki hubungan timbal balik dan mencari keseimbangan dengan ketahanan sosial budaya demi pembangunan berkelanjutan. Fokus utama keseimbangan tersebut adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, membangun kapasitas ketahanan energi, air dan pangan, meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

6. Kolaborasi untuk Pembangunan Kewilayahan yang Inklusif dan Terintegrasi Antar Pusat-Pusat Produksi Komoditas Daerah

Pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas daerah merupakan kerangka implementasi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Misi ini mencakup upaya umum yang mengkolaborasikan peran pemangku kepentingan dan lintas sektor dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Wajo, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dan mempertimbangkan kesetaraan gender. Misi ini juga mencakup pembangunan kewilayahan yang saling terintegrasi untuk mengoptimalkan potensi lokal dan penguatan kapasitas daerah.

7. Kolaborasi untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan bagian dari kerangka implementasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Misi ini mencakup upaya yang mengkolaborasikan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana, dan memastikan bahwa penyediaan tersebut memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan sehingga dapat mendukung berlangsungnya transformasi di

Kabupaten Wajo. Pembangunan insfrastruktur diperlukan untuk memastikan konektivitas dan aksesibilitas yang baik antar wilayah sehingga dapat memudahkan mobilisasi dan transportasi barang dan jasa untuk menunjang penghidupan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam pemerataan pembangunan kewilayahan.

Misi ini juga mencakup upaya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi dan menangani bencana serta dampak perubahan iklim melalui restorasi ekosistem, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan optimalisasi jasa lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan untuk mendukung ketahanan masyarakat secara menyeluruh.

8. Kolaborasi untuk Kestinambungan Pembangunan dan Daya Saing Daerah

Kestinambungan pembangunan dan daya saing daerah juga merupakan kerangka implementasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketiga transformasi tersebut terangkai dalam suatu kestinambungan antar tahapan pembangunan. Misi ini mencakup upaya umum yang mengkolaborasikan berbagai pihak dalam mendorong kerjasama antardaerah, inovasi daerah, dan penguatan kapasitas fiskal. Selain itu, juga tercakup kolaborasi dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi, daya saing infrastruktur, daya saing SDM, dan daya saing investasi untuk mendukung kestinambungan antar tahapan pembangunan.

Misi RPJPD Kabupaten Wajo memiliki keselarasan dengan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan misi RPJP Nasional sebagaimana termuat dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Wajo dengan
Misi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045		Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045
Agenda	Misi		
1. Transformasi Indonesia	1. Transformasi sosial	1. Mewujudkan transformasi sosial	1. Kolaborasi untuk transformasi sosial
	2. Transformasi ekonomi	2. Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Kolaborasi untuk transformasi ekonomi
	3. Transformasi tata kelola	3. Mewujudkan transformasi tata kelola	3. Kolaborasi untuk transformasi tata kelola
2. Landasan Transformasi	4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan	4. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi	4. Kolaborasi untuk keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah

RPJPN Tahun 2025-2045		Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045
Agenda	Misi		
	Indonesia	makro	
	5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Kolaborasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi
3. Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Kolaborasi untuk pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas daerah
	7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	8. Kestinambungan pembangunan	8. Mendorong daya saing daerah untuk kestinambungan pembangunan	8. Kolaborasi untuk kestinambungan pembangunan dan daya saing daerah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Transformasi sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat Wajo. Hal ini diwujudkan dengan memastikan masyarakat memiliki akses kesehatan yang merata dan berkualitas, pendidikan yang setara bagi semua, dan standar hidup yang layak untuk semua kalangan. Dengan ini, diharapkan masyarakat dapat hidup sehat, berpendidikan, dan sejahtera, sehingga mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan.

Transformasi tata kelola diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, serta kepatuhan hukum dijunjung tinggi untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintahan yang berbasis elektronik diimplementasikan agar segala proses pemerintahan lebih mudah diakses dan lebih cepat melayani kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, transformasi ekonomi fokus pada mempercepat pertumbuhan ekonomi Wajo melalui pemanfaatan potensi wilayah. Pendekatan ini termasuk pengembangan ekonomi biru (sektor maritim) dan ekonomi hijau (sektor ramah lingkungan) sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan transformasi digital dan penguatan keterkaitan antar wilayah, Wajo berupaya memperluas peranannya hingga ke tingkat nasional dan internasional. Semua ini dilakukan agar Wajo bisa berperan lebih besar dalam rantai pasok global, menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakatnya.

Landasan utama untuk transformasi ini adalah keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang kuat, dan stabilitas ekonomi makro di tingkat daerah. Tujuannya adalah menjamin keberhasilan perubahan di semua bidang dengan menciptakan kestabilan ekonomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membangun demokrasi yang benar-benar hadir dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya landasan ini, masyarakat dapat merasakan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sementara ekonomi daerah berjalan dengan stabil dan demokrasi memberikan ruang bagi suara masyarakat untuk didengar dan diperhatikan.

Selain itu, landasan transformasi juga mencakup ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan

tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memelihara nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan dengan lebih manusiawi dan berkelanjutan, tidak merusak budaya setempat atau lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan transformasi di Kabupaten Wajo, diperlukan kerangka kerja yang kuat, terutama melalui pembangunan di berbagai wilayah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pembangunan ini harus dilaksanakan secara bertahap, dengan perhatian pada kesinambungan agar setiap tahap dapat berjalan sesuai rencana. Dengan menjaga kesinambungan ini, seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan transformasi yang diharapkan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Transformasi Kabupaten Wajo hingga tahun 2045 dibagi dalam empat tahapan, yaitu:

1. Tahap Penguatan Fondasi Transformasi pada tahun 2025-2029;
2. Tahap Akselerasi Transformasi pada tahun 2030-2034;
3. Tahap Perluasan Transformasi pada tahun 2035-2039; dan
4. Tahap Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai Daerah yang Maju dengan Pertanian Modern yang Mandiri dan Berkelanjutan pada tahun 2040-2045.

Tahap 1 pada tahun 2025-2029 sebagai Tahap Penguatan Fondasi Transformasi, berfokus pada langkah-langkah strategis untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi jangka panjang daerah. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dasar pembangunan sudah dipersiapkan dengan baik, dan bertujuan untuk membangun pondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan transformasi pada tahap berikutnya dalam RPJPD.

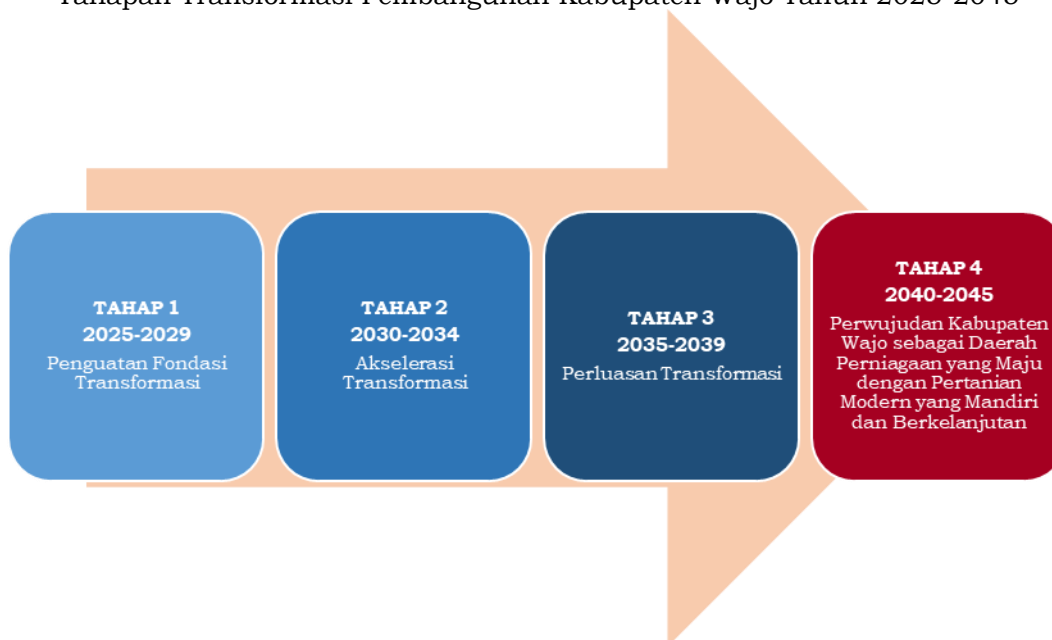
Tahap 2 pada tahun 2030-2034 sebagai Tahap Akselerasi Transformasi merupakan percepatan pelaksanaan dan pencapaian tujuan RPJPD. Tahap ini bertujuan untuk mempercepat kemajuan dan hasil dari rencana pembangunan jangka panjang dengan menerapkan berbagai strategi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Akselerasi transformasi dalam RPJPD bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tahap 3 pada tahun 2035-2039 sebagai Tahap Perluasan Transformasi, berfokus pada upaya penguatan dan perluasan transformasi dengan mencakup lebih banyak area dan aspek/sektor pembangunan. Perluasan transformasi bertujuan untuk memperluas dampak positif dari rencana pembangunan sehingga mencapai hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah, serta memastikan bahwa manfaat dari transformasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Tahap 4 pada tahun 2040-2045 sebagai Tahap Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai Daerah yang Maju dengan Pertanian Modern yang Mandiri dan Berkelanjutan, merupakan tahap perwujudan transformasi dan visi daerah. Tahap ini berfokus pada pendekatan yang lebih komprehensif, mengoptimalkan potensi daerah dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, dan tetap berfokus pada upaya-upaya transformasi yang lebih terarah dan berkelanjutan dari tahap sebelumnya. Terwujudnya visi daerah ditandai dengan perniagaan yang lebih maju dibandingkan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, dan pengelolaan pertanian yang modern namun tetap mengedepankan keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Tahapan transformasi pembangunan Kabupaten Wajo hingga tahun 2045 tersebut disajikan pada gambar berikut.

Gambar 5. 1
Tahapan Transformasi Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045



Kerangka kerja transformasi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wajo untuk periode 2025-2045 dirancang melalui kebijakan lima tahunan. Tujuannya adalah memberikan panduan prioritas yang berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan tidak terputus. Dalam penyusunan arah

kebijakan ini, perhatian khusus diberikan pada Arah Pengembangan Wilayah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2025-2045. Salah satu fokus utama adalah kawasan Watampone, yang menjadi titik sentral kebijakan pembangunan di wilayah ini.

Kebijakan lima tahunan ini dirancang dengan tujuan agar setiap tahapan pembangunan saling mendukung, menciptakan kesinambungan antara kebijakan yang telah dilakukan dengan rencana kebijakan berikutnya. Setiap periode lima tahun memiliki arah kebijakan yang jelas, yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah serta potensi yang ada di Kabupaten Wajo.

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahap pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wajo diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Transformasi”. Tahap pertama ini berfokus pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, serta penguatan keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi didukung oleh persiapan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang inklusif dan mengintegrasikan pusat-pusat produksi komoditas daerah, disertai dengan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan, memastikan kesinambungan dengan tahapan selanjutnya dan menguatkan pilar-pilar daya saing daerah.

Kolaborasi untuk transformasi sosial tahap pertama ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemenuhan pelayanan kesehatan dilakukan secara merata dan terjangkau, pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Pemenuhan pelayanan pendidikan dilakukan melalui perluasan akses, pemerataan, dan mendorong terlaksananya Wajib Belajar 13 tahun. Sedangkan pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dilakukan secara komprehensif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem.

Kolaborasi untuk transformasi ekonomi pada tahap pertama ini diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang kuat melalui penguatan UMKM dan

BUMD, peningkatan produktifitas SDA unggulan (khususnya sutra dan pertanian) dan industri kerajinan yang didukung oleh *up-skilling* dan *re-skilling* tenaga kerja, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan ekosistem industrialisasi berorientasi ekspor, digitalisasi ekonomi, mempersiapkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta optimalisasi tata kelola dan fungsi ekonomi Danau Tempe untuk produksi ikan dan non ikan yang berkelanjutan.

Kolaborasi untuk transformasi tata kelola pada tahap pertama diarahkan untuk menyiapkan basis tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui penguatan kelembagaan yang inovatif, tepat fungsi, mematuhi kaidah efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi, dengan didukung oleh peningkatan profesionalisme ASN dan penerapan sistem merit. Penguatan fondasi ini juga dititikberatkan pada digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan nilai-nilai antikorupsi, yang didukung oleh keberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Kolaborasi untuk keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah pada tahap pertama diarahkan pada penguatan kapasitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan stabilitas ekonomi makro daerah. Penguatan kapasitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditekankan pada gerakan sadar hukum masyarakat, swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penguatan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat. Sedangkan penguatan stabilitas ekonomi makro daerah ditekankan pada upaya menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif, menjaga stabilitas sektor keuangan, pengendalian inflasi, dan menumbuhkan kepercayaan investor.

Kolaborasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi pada tahap pertama ini didorong melalui peningkatan kualitas keluarga, inklusifitas masyarakat, kesetaraan gender, pemajuan kebudayaan serta kehidupan yang religius dan rukun. Ini diiringi dengan konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi ekosistem terdegradasi, pengembangan teknologi dan kesiapan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kolaborasi untuk pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas daerah pada tahap pertama berfokus untuk pemenuhan fondasi dalam rangka persiapan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan, yang diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi

dampak perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif bencana, dan optimalisasi infrastruktur melalui penguatan kerja sama antar daerah.

Kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan pada tahap pertama ini diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan, antara lain kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, konsolidasi reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah prioritas tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pemenuhan sarana dan prasarana ini mempertimbangkan dinamika demografi dengan menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan, ketahanan terhadap bencana terutama banjir, dan dampak perubahan iklim khususnya terhadap pertanian dengan mempertimbangkan sumber dana inovatif.

Kolaborasi untuk kesinambungan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah pada tahap ini diarahkan untuk memastikan kesinambungan antar tahapan pembangunan dalam skala regional dan nasional, penguatan pengembangan sektor unggulan dan kerja sama daerah, serta konsolidasi untuk memperkuat pilar-pilar daya saing daerah.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Periode kedua pembangunan jangka panjang Kabupaten Wajo difokuskan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi.” Tahap kedua ini dilakukan melalui akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan kapasitas kemandirian, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dan pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah, penguatan lingkungan sosial untuk keluarga dan masyarakat. Tahap kedua ini juga didukung oleh pengembangan wilayah berdasarkan potensi ekonomi dan percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, rendah karbon dan berketahanan iklim, serta pemantapan daya saing sektor unggulan dan stimulasi fiskal.

Kolaborasi untuk transformasi sosial tahap kedua ini diarahkan pada terwujudnya kualitas manusia yang sehat, produktif, dan inovatif, melalui akselerasi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Akselerasi pembangunan kesehatan lebih dititikberatkan pada upaya promotif dan preventif kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan, baik sarana prasarana, maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan. Akselerasi

pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu lulusan pendidikan jenjang PAUD, dasar, dan menengah, terutama dalam kemampuan literasi dan numerasi, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Sedangkan akselerasi pembangunan perlindungan sosial lebih dititikberatkan pada inklusifitas sosial dan perbaikan kelayakan hidup seluruh kelompok rentan dan miskin ekstrem.

Kolaborasi untuk transformasi ekonomi pada tahap kedua diarahkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi produk SDA dan pengembangan UMKM menjadi industri pengolahan, yang ditunjang oleh kompetensi kewirausahaan serta penguatan dukungan sarana prasarana bagi aktivitas perniagaan, penguatan struktur industri berorientasi ekspor, dan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemanfaatan energi gas, dan pengembangan fungsi Danau Tempe sebagai destinasi wisata.

Kolaborasi untuk transformasi tata kelola pada tahap ini diarahkan pada peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang menyeluruh, serta semakin terinternalisasinya nilai-nilai antikorupsi, yang diperkuat dengan ASN yang sejahtera dan berkompeten dan masyarakat yang partisipatif.

Kolaborasi untuk keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah tahap kedua diarahkan pada pemeliharaan situasi kondusif, penyelenggaraan demokrasi substansial oleh partai politik dan konstituennya, penciptaan ruang publik yang sehat untuk partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, kebebasan sipil dan jaminan kesetaraan bagi semua warga masyarakat dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. Pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada penguatan iklim investasi dan struktur keuangan daerah, pemeliharaan stabilitas harga barang pokok dan barang penting, serta optimalisasi pengelolaan sektor keuangan.

Kolaborasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi tahap kedua diarahkan pada penguatan lingkungan sosial untuk keluarga dan masyarakat yang beradab dan religius serta tangguh dalam memajukan diri untuk menghadapi unsur-unsur budaya global diiringi dengan peningkatan kapasitas tampungan air dalam pemenuhan ketahanan pangan, air dan energi, disertai dengan akselerasi teknologi dalam pemanfaatan air Danau

Tempe dan air Teluk Bone untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta menciptakan energi terbarukan.

Kolaborasi untuk pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas daerah tahap ini diarahkan pada pengembangan wilayah berdasarkan potensi ekonomi mencakup pembangunan wilayah kawasan Danau Tempe, kawasan perkebunan sawit, kawasan produksi gas alam, kawasan pertanian padi sawah, sentra industri tenun sutera, dan kawasan perniagaan. Dilanjutkan dengan percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, melalui penguatan kemitraan dengan lembaga ekonomi dan pemerintah daerah lain.

Kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan pada tahap ini diarahkan pada peningkatan dan penerapan konstruksi hijau (*green construction*) dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan tahan terhadap bencana alam serta beradaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, dengan memobilisasi modal publik dan swasta untuk investasi kolaboratif dalam perwujudan sarana prasarana yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan berketahanan iklim.

Kolaborasi untuk kesinambungan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah tahap kedua ini diarahkan pada pemantapan daya saing sektor unggulan daerah melalui kerjasama daerah secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang didukung oleh kinerja SDM berdaya saing tinggi serta stimulasi fiskal dari berbagai sumber keuangan daerah.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wajo diarahkan pada kebijakan “Perluasan Transformasi”. Tahap ketiga ini dilakukan dengan penguatan daya saing SDM dalam transformasi sosial, perluasan transformasi ekonomi dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahap ini didukung dengan pemantapan ketangguhan keluarga dan masyarakat, pemantapan koneksi dan jejaring fungsional antarwilayah, pemantapan akses dan kualitas sarana prasarana, perluasan kolaborasi untuk peningkatan daya saing daerah.

Kolaborasi untuk transformasi sosial tahap ketiga ini diarahkan pada penguatan daya saing SDM yang dapat berkontribusi secara mandiri, adaptif,

inovatif, produktif, dan lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan melalui pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penguatan daya saing SDM dalam pembangunan kesehatan ditekankan pada berkembangnya budaya hidup sehat yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana serta tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan yang di seluruh wilayah Kabupaten Wajo. Penguatan daya saing SDM dalam pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan khususnya literasi dan numerasi, serta pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan penguatan daya saing SDM dalam pembangunan perlindungan sosial lebih ditekankan pada dukungan warga lanjut usia, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Kolaborasi untuk Transformasi Ekonomi pada tahap ketiga ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui peningkatan daya saing ekonomi dan berkelanjutan, dengan menekankan pada pengembangan rantai pasok untuk integrasi ekonomi lokal, regional, nasional dan global, pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khususnya industri pertenunan sutra dan pengolahan hasil pertanian, serta penguatan fasilitas perekonomian dalam mendukung Kota Sengkang sebagai pusat perniagaan.

Kolaborasi untuk transformasi tata kelola pada tahap ketiga ini diarahkan pada perwujudan kelembagaan yang adaptif dan berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berintegritas, pelayanan publik secara menyeluruh yang memenuhi standar dan berkualitas, yang disertai dengan ASN yang profesional, beretos kerja tinggi dan berkompetensi unggul, serta partisipasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol dan keswadayaan.

Kolaborasi untuk keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah pada tahap ini berfokus pada pemantapan keamanan, ketertiban, serta jaminan kebebasan sipil dan kesetaraan bagi semua warga masyarakat dalam kehidupan dan dalam mengakses sumber daya sosial, politik dan ekonomi, yang diarahkan pada penguatan ruang publik dan situasi kondusif dengan paradigma restoratif dan berperspektif HAM, serta berlangsungnya investasi yang dilandasi oleh sektor keuangan daerah yang kuat.

Kolaborasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi tahap ketiga dititikberatkan pada pemantapan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan untuk hidup inklusif, religius dan

rukun, serta berkebudayaan maju, diiringi dengan ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui partisipasi dalam kebijakan yang memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

Kolaborasi untuk pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas pada tahap ini diarahkan untuk pemantapan koneksi dan jejaring fungsional antarwilayah untuk berkembangnya rantai pasok komoditas yang memberi nilai tambah berkeadilan kepada seluruh aktor yang terlibat dalam produksi primer, industri pengolahan, dan sektor jasa sehingga Kota Sengkang dapat berfungsi efektif sebagai pusat perniagaan bagi daerah sekitarnya dan Pelabuhan Siwa berfungsi efektif dalam alur pergerakan logistik.

Kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan tahap ketiga ini diarahkan pada pemantapan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar, permukiman, dan lingkungan serta infrastruktur dasar yang berfokus pada penguatan implementasi kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi degradasi lingkungan, perluasan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, serta mendukung ketersediaan sarana prasarana bagi pembangunan rendah karbon khususnya pada sektor energi baru dan terbarukan.

Kolaborasi untuk kesinambungan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah tahap ketiga ini diarahkan pada perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan pengembangan kerja sama daerah dengan fokus pada pengembangan rantai nilai dan rantai pasok serta mengefektifkan sumber pembiayaan public-private partnership dalam kesinambungan pembangunan.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wajo diarahkan pada kebijakan “Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Perniagaan yang Maju dengan Pertanian Modern yang Mandiri dan Berkelanjutan”. Tahap keempat ini dilakukan dengan optimalisasi upaya transformasi yang berkesinambungan dan lebih konsisten dalam rangka perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta keamanan dan ekonomi makro daerah yang stabil. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang semakin merata

dengan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan menjadi daerah yang berdaya saing tinggi.

Kolaborasi untuk transformasi sosial tahap keempat ini mengarah pada perwujudan manusia Kabupaten Wajo yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Pada tahap ini, stunting dan kematian ibu sangat rendah, seluruh wilayah memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sebagian besar sekolah telah memenuhi standar kompetensi minimum literasi dan numerasi, serta kemiskinan berada pada kisaran nol persen.

Kolaborasi untuk transformasi ekonomi dalam tahap keempat ini difokuskan untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan dan Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan. Pada tahap ini, telah terwujud industri berbasis SDA unggulan, khususnya pertenunan sutra dan hasil pertanian, yang didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang handal, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang memberikan manfaat besar bagi sosial dan lingkungan.

Kolaborasi untuk transformasi tata kelola selama tahap keempat diarahkan pada perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah penggerak tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, bersih, adaptif, inovatif, inklusif, profesional, dan akuntabel serta masyarakat sipil yang partisipatif, berdaya, dan bertanggungjawab. Pada tahap ini telah terwujud digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikelola secara profesional dan handal yang bebas korupsi.

Kolaborasi untuk keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah pada tahapan ini diarahkan pada perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban dengan iklim investasi yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga.

Kolaborasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi tahap keempat ini diarahkan pada perwujudan Wajo sebagai daerah berkebudayaan maju dalam masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan beragama serta memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Kolaborasi untuk pembangunan kewilayahan yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas dalam tahap keempat berfokus perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan, serta

pemerataan infrastruktur konektivitas yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan pada tahap keempat ini diarahkan pada perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mendukung pencapaian *net zero emission* dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Kolaborasi untuk Keresinambungan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah tahap keempat ini diarahkan pada perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah berdaya saing tinggi dengan pembangunan yang berkesinambungan.

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan tersebut diformulasi dalam setiap misi yang secara lengkap disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1
Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Misi Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Wajo Daerah Perniagaan yang Maju dengan Pertanian yang Mandiri dan Berkelanjutan	1. Kolaborasi untuk Transformasi Sosial	Penguatan fondasi transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Akselerasi transformasi sosial diarahkan pada terwujudnya kualitas manusia yang sehat, produktif, dan inovatif, melalui akselerasi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Perluasan transformasi sosial diarahkan pada penguatan daya saing SDM yang dapat berkontribusi secara mandiri, adaptif, inovatif, produktif, dan lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan melalui pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Perwujudan manusia Kabupaten Wajo yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.
		Pemenuhan pelayanan kesehatan dilakukan secara merata dan terjangkau, pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Akselerasi pembangunan kesehatan lebih dititikberatkan pada upaya promotif dan preventif kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan, baik sarana prasarana, maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Penguatan daya saing SDM dalam pembangunan kesehatan ditekankan pada berkembangnya budaya hidup sehat yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana serta tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan yang di seluruh wilayah Kabupaten Wajo.	Pada tahap ini, stunting dan kematian ibu sangat rendah, seluruh wilayah memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sebagian besar sekolah telah memenuhi standar kompetensi minimum literasi dan numerasi, serta kemiskinan berada pada kisaran 0 persen.
		Pemenuhan pelayanan pendidikan dilakukan melalui perluasan akses, pemerataan, dan mendorong terlaksananya Wajib Belajar 13 tahun.	Akselerasi pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu lulusan pendidikan jenjang PAUD, dasar, dan menengah, terutama dalam kemampuan literasi dan numerasi, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar.	Penguatan daya saing SDM dalam pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan khususnya literasi dan numerasi, serta pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan masyarakat dalam berbagai	
		Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dilakukan secara komprehensif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem.	Akselerasi pembangunan perlindungan sosial lebih dititikberatkan pada inklusifitas sosial dan perbaikan kelayakan hidup seluruh kelompok rentan		

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
			dan miskin ekstrem.	aspek kehidupan. Penguatan daya saing SDM dalam pembangunan perlindungan sosial lebih ditekankan pada dukungan warga lanjut usia, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.	
	2. Kolaborasi untuk Transformasi Ekonomi	Penguatan fondasi transformasi ekonomi diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang kuat melalui penguatan UMKM dan BUMD, peningkatan produktifitas SDA unggulan (khususnya sutra dan pertanian) dan industri kerajinan, yang didukung oleh <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> tenaga kerja, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan ekosistem industrialisasi berorientasi ekspor, digitalisasi ekonomi, mempersiapkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta optimalisasi tata kelola dan fungsi ekonomi Danau Tempe untuk produksi ikan dan non ikan yang berkelanjutan.	Akselerasi transformasi ekonomi diarahkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi produk SDA dan pengembangan UMKM menjadi industri pengolahan, yang ditunjang oleh kompetensi kewirausahaan serta penguatan dukungan sarana prasarana bagi aktivitas perniagaan, penguatan struktur industri berorientasi ekspor, dan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemanfaatan energi gas, dan pengembangan fungsi Danau Tempe sebagai destinasi wisata.	Perluasan transformasi ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui peningkatan daya saing ekonomi dan berkelanjutan, dengan menekankan pada pengembangan rantai pasok untuk integrasi ekonomi lokal, regional, nasional dan global, pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khususnya industri pertenunan sutra dan pengolahan hasil pertanian, serta penguatan fasilitas perekonomian dalam mendukung Kota Sengkang sebagai pusat perniagaan.	Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan dan Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan. Pada tahap ini, telah terwujud industri berbasis SDA unggulan, khususnya pertenunan sutra dan hasil pertanian, yang didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang handal, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang memberikan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
					manfaat besar bagi sosial dan lingkungan.
	3. Kolaborasi untuk Transformasi Tata Kelola	Penguatan fondasi transformasi tata kelola diarahkan pada penyiapan basis tata kelola yang berintegritas dan adaptif, melalui penguatan kelembagaan yang inovatif, tepat fungsi, mematuhi kaidah efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi, dengan didukung oleh peningkatan profesionalisme ASN dan penerapan sistem merit. Penguatan fondasi ini juga dititikberatkan pada digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan nilai-nilai antikorupsi, yang didukung oleh keberdayaan dan partisipasi masyarakat.	Akselerasi transformasi tata kelola diarahkan pada peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang menyeluruh, serta semakin terinternalisasinya nilai-nilai antikorupsi, yang diperkuat dengan ASN yang sejahtera dan berkompeten dan masyarakat yang partisipatif.	Perluasan transformasi tata kelola diarahkan pada perwujudan kelembagaan yang adaptif dan berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berintegritas, pelayanan publik secara menyeluruh yang memenuhi standar dan berkualitas, yang disertai dengan ASN yang profesional, beretos kerja tinggi dan berkompetensi unggul, serta partisipasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol dan keswadayaan.	Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah penggerak tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, bersih, adaptif, inovatif, inklusif, profesional, dan akuntabel serta masyarakat sipil yang partisipatif, berdaya, dan bertanggungjawab. Pada tahap ini telah terwujud digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikelola secara profesional dan handal yang bebas korupsi.
	4. Kolaborasi untuk Keamanan dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penguatan keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada penguatan kapasitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan stabilitas ekonomi makro daerah. Penguatan kapasitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditekankan	Pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat diarahkan pada pemeliharaan situasi kondusif, penyelenggaraan demokrasi substansial oleh partai politik dan konstituennya, penciptaan ruang publik yang sehat untuk partisipasi	Pemantapan keamanan, ketertiban, serta jaminan kebebasan sipil dan kesetaraan bagi semua warga masyarakat dalam kehidupan dan dalam mengakses sumber daya sosial, politik dan ekonomi, yang diarahkan pada penguatan ruang publik dan situasi	Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		<p>pada gerakan sadar hukum masyarakat, swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penguatan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat.</p> <p>Penguatan stabilitas ekonomi makro daerah ditekankan pada upaya menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif, menjaga stabilitas sektor keuangan, pengendalian inflasi, dan menumbuhkan kepercayaan investor.</p>	<p>masyarakat yang lebih bermakna, kebebasan sipil dan jaminan kesetaraan bagi semua warga masyarakat dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.</p> <p>Pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada penguatan iklim investasi dan struktur keuangan daerah, pemeliharaan stabilitas harga barang pokok dan barang penting, serta optimalisasi pengelolaan sektor keuangan.</p>	<p>kondusif dengan paradigma restoratif dan berperspektif HAM, serta berlangsungnya investasi yang dilandasi oleh sektor keuangan daerah yang kuat.</p>	
	5. Kolaborasi untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi didorong melalui peningkatan kualitas keluarga, inklusifitas masyarakat, kesetaraan gender, pemajuan kebudayaan serta kehidupan yang religius dan rukun. Ini diiringi dengan konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi ekosistem terdegradasi, pengembangan teknologi dan kesiapan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p>	<p>Penguatan lingkungan sosial untuk keluarga dan masyarakat yang beradab dan religius serta tangguh dalam memajukan diri untuk menghadapi unsur-unsur budaya global diiringi dengan peningkatan kapasitas tampungan air dalam pemenuhan ketahanan pangan, air dan energi, disertai dengan akselerasi teknologi dalam pemanfaatan air Danau Tempe dan air Teluk Bone untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta menciptakan energi terbarukan.</p>	<p>Pemantapan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan untuk hidup inklusif, religius dan rukun, serta berkebudayaan maju, diiringi dengan ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui partisipasi dalam kebijakan yang memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.</p>	<p>Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah berkebudayaan maju dalam masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan beragama serta memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan.</p>
	6. Kolaborasi untuk	<p>Pemenuhan fondasi dalam rangka persiapan pembangunan wilayah</p>	<p>Pengembangan wilayah berdasarkan potensi ekonomi</p>	<p>Pemantapan koneksi dan jejaring fungsional antarwilayah</p>	<p>Perwujudan Kabupaten Wajo</p>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
	Pembangunan Kewilayahan yang Inklusif dan Terintegrasi Antar Pusat-Pusat Produksi Komoditas Daerah	perkotaan dan perdesaan yang inklusif dan mengintegrasikan pusat-pusat produksi komoditas daerah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif bencana, dan optimalisasi infrastruktur melalui penguatan kerja sama antar daerah.	mencakup pembangunan wilayah kawasan Danau Tempe, kawasan perkebunan sawit, kawasan produksi gas alam, kawasan pertanian padi sawah, sentra industri tenun sutera, dan kawasan perniagaan. Dilanjutkan dengan percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, melalui penguatan kemitraan dengan lembaga ekonomi dan pemerintah daerah lain.	untuk berkembangnya rantai pasok komoditas yang memberi nilai tambah berkeadilan kepada seluruh aktor yang terlibat dalam produksi primer, industri pengolahan, dan sektor jasa sehingga Kota Sengkang dapat berfungsi efektif sebagai pusat perniagaan bagi daerah sekitarnya dan Pelabuhan Siwa berfungsi efektif dalam alur pergerakan logistik.	sebagai daerah dengan pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan infrastruktur konektivitas yang tangguh terhadap perubahan iklim.
	7. Kolaborasi untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	<p>Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan antara lain kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, konsolidasi reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah prioritas tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut mempertimbangkan dinamika demografi dengan menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan, ketahanan terhadap bencana terutama banjir,</p>	Peningkatan dan penerapan konstruksi hijau (<i>green construction</i>) dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan tahan terhadap bencana alam serta beradaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, dengan memobilisasi modal publik dan swasta untuk investasi kolaboratif dalam perwujudan sarana prasarana yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan berketahanan iklim.	Pemantapan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar, permukiman, dan lingkungan serta infrastruktur dasar yang berfokus pada penguatan implementasi kebijakan pembangunan yang mengurangi degradasi lingkungan, perluasan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, serta mendukung ketersediaan sarana prasarana bagi pembangunan rendah karbon khususnya pada sektor energi baru dan terbarukan.	Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mendukung pencapaian <i>net zero emission</i> dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		dan dampak perubahan iklim khususnya terhadap pertanian dengan mempertimbangkan sumber dana inovatif.			
	8. Kolaborasi untuk Kesyinambungan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah	Memastikan kesyinambungan antar tahapan pembangunan dalam skala regional dan nasional, penguatan pengembangan sektor unggulan dan kerja sama daerah, serta konsolidasi untuk memperkuat pilar-pilar daya saing daerah.	Pemantapan daya saing sektor unggulan daerah melalui kerjasama daerah secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang didukung oleh kinerja SDM berdaya saing tinggi serta stimulasi fiskal dari berbagai sumber keuangan daerah.	Perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan pengembangan kerja sama daerah dengan fokus pada pengembangan rantai nilai dan rantai pasok serta mengefektifkan sumber pembiayaan <i>public-private partnership</i> dalam kesyinambungan pembangunan.	Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah berdaya saing tinggi dengan pembangunan yang berkesinambungan.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang progresif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, ditetapkan 8 (delapan) sasaran pokok dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 17 (tujuh belas) arah kebijakan transformasi. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai ukuran kinerja daerah yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

Tabel 5.2
Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1. Kolaborasi untuk Transformasi Sosial	1. Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan manusia yang sehat, cerdas, dan sejahtera	SS01. Kesehatan untuk Semua
		SS02. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		SS03. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Kolaborasi untuk Transformasi Ekonomi	2. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan	SS04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
		SS05. Penerapan Ekonomi Hijau
		SS06. Transformasi Digital
		SS07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3. Kolaborasi untuk Transformasi Tata Kelola	3. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai penggerak tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	SS08. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif
4. Kolaborasi Untuk Keamanan Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif	SS09. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, serta Demokrasi Substansial
		SS10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Kolaborasi untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah berkebudayaan maju dan menjunjung kemaslahatan beragama, serta sumber pemenuhan energi, air, dan pangan berkelanjutan	SS11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		SS12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		SS13. Berketahanan Energi, Air dan Pangan
6. Kolaborasi Untuk Pembangunan Kewilayahan yang Inklusif dan Terintegrasi Antar Pusat-Pusat Produksi Komoditas Daerah	6. Terwujudnya Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan	SS14. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
7. Kolaborasi Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	7. Terwujudnya Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan, tangguh bencana dan perubahan iklim, yang didukung sarana prasarana berkualitas	SS15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		SS16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8. Kolaborasi untuk Kesenambungan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah	8. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan daya saing tinggi	SS17. Ketangguhan Diplomasi Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi

Penjelasan setiap sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Sasaran 1. Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang berkualitas secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat, sehingga terwujud sumber daya manusia Kabupaten Wajo yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, maka berfokus pada tiga arah pembangunan yaitu Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Penjelasan ketiga arah pembangunan tersebut beserta arah kebijakan transformasinya diuraikan sebagai berikut.

SS01. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Transformasi kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Wajo, dapat tercapai dengan memenuhi beberapa prasyarat yaitu tersedianya infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan alat kesehatan) yang memadai di seluruh wilayah, tersedianya sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata, serta tersedianya regulasi yang mendukung penyempurnaan sistem kesehatan.

Arah kebijakan transformasi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah:

- 1) perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- 2) pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk

ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis; 3) percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor; 4) percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor; 5) pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen; 6) peningkatan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*); 7) pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal; 8) penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim; 9) peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat; dan 10) pengembangan sistem *telemedicine* yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).

SS02. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing sehingga terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Wajo dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada transformasi pendidikan, yang meliputi transformasi tata kelola pendidikan, aksesibilitas layanan pendidikan, dan kualitas lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 2) pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara; 3) peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif; 4) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi komoditas unggulan wilayah dan kebutuhan lapangan usaha; 5) pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk ekosistem pariwisata; dan 6) peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan *internet of things* (IoT).

SS03. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wajo tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan, dengan prinsip berkeadilan dan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan. Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Wajo dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran; 2) perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial; 3) perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas; 4) penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsif bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya; 5) perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas; 6) integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim; dan 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah, melalui kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar kehandalan bangunan.

Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan manusia yang sehat, cerdas, dan sejahtera pada tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.3
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
1. Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan manusia	1. Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,85	79,25
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:		

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
yang sehat, cerdas, dan sejahtera		a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	99,45	100
		b) Jumlah kematian ibu (kasus)	6	3
		c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	3,80	0,70
		3. Penanganan Tuberkulosis:		
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85	95
		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90
		4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	5. a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		i) Literasi Membaca (%)	64,00	87,80
		ii) Numerasi (%)	56,00	79,73
		b) Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,71-7,74	10,35-10,38
		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,39-13,40	14,19-14,23
		6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	12.02	12.74-12.97
		7. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	14.25	27.65
	3. Perlindungan sosial yang adaptif	8. a) Tingkat Kemiskinan (%)	6,40	0,52
		b) Indeks Gini	0,358	0,318

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
		9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	5	8
		10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	22,65	22,95

5.2.2. Sasaran 2. Terwujudnya Kabupaten Wajo Sebagai Daerah Pusat Perniagaan

Perwujudan sasaran pokok kedua ini dilakukan secara bertahap dan konsisten untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang selama ini memiliki produktifitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi dengan produktifitas tinggi, terutama pada sektor unggulan daerah. Peningkatan produktifitas dilakukan dengan mendorong hilirisasi yang didukung dengan digitalisasi ekonomi berbasis riset dan inovasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan, maka arah pembangunan difokuskan pada iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, serta integrasi domestik dan global. Setiap arah pembangunan tersebut diterjemahkan melalui arah kebijakan tranformasi sebagai berikut.

SS04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Peningkatan produktifitas ekonomi Kabupaten Wajo dilakukan secara optimal berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau. Arah kebijakan transformasi mewujudkan Iptek, inovasi, dan produktifitas di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; 2) peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan wisata bahari); 3) peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*); 4) penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta

pengembangan industri pengolahan; 5) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 6) peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; 7) peningkatan produktivitas BUMD; 8) pelaksanaan afirmasi *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri; 9) peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif; serta 10) penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.

SS05. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan perlu menjaga keberlanjutan ekonomi sampai ke generasi selanjutnya. Penerapan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru akan memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin ketersediaan sumber daya alam. Arah kebijakan transformasi penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) pengembangan komoditas di wilayah daratan dan perairan berbasis keunggulan wilayah; 2) pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; 3) pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan; 4) peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan laut; 5) peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif; 6) peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan; 7) pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman lokal; 8) peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam; serta 9) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.

SS06. Transformasi Digital

Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang mampu menggerakkan perekonomian an Kabupaten Wajo. Arah kebijakan transformasi untuk membangun transformasi digital tangguh di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada

dalam *blank spot* sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan; 2) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok; 3) penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru di kawasan strategis; serta 4) peningkatan literasi digital terpadu dan kemampuan SDM digital (*digital skill*) melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan keterampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.

SS07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Arah pembangunan integrasi domestik dan global dimaksudkan untuk menguatkan posisi Kabupaten Wajo sebagai superhub dalam perekonomian domestik dan global. Arah kebijakan transformasi integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi; 2) perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya; 3) peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (*global supply chain*); 4) peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; serta 5) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.

Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.4
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah Pusat Perniagaan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
---------------	------------------	--	---------------	-------------

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
2. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi tinggi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,00	6,00
		12. Pengembangan pariwisata:		
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,42	0,57
		b) Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	372.500	806.200
		13. Jumlah industri ekonomi kreatif (industri)	11	17
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		a) Jumlah industri kecil dan menengah (industri)	761	911
		b) Persentase koperasi sehat (%)	6,43	8,87
		c) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	47,10	63,88
		d) Produktivitas padi (Ku/Ha)	52,00	60,00
		e) Jumlah produksi perikanan (ton)	568425,17	614450,69
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,98-2,04	1,20-1,14
		16. a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,57	54,38
		b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	54,50	72,07
		17. Tingkat penguasaan IPTEK		
		a) Indeks Kapabilitas Inovasi	2,40	3,80
	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		
		a) Indeks Ekonomi Hijau	23,07	37,34
	6. Transformasi Digital	19. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	45	85
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	8,64	5,22

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,85	37,06
		22. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,14	1,50

5.2.3 Sasaran 3. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Penggerak Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif.

Pemerintahan Kabupaten Wajo yang berintegritas, adaptif, dan inovatif adalah sebuah pemerintahan yang menempatkan kejujuran, etika, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prioritas, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, serta mendorong terciptanya solusi baru dan lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan sasaran ketiga ini difokuskan pada tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif dengan arah kebijakan transformasi sebagai berikut.

SS08. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif

Arah kebijakan transformasi tata kelola yang berintegrasi, adaptif, dan inovatif di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penguatan organisasi pemerintah berbasis *functional government*, peningkatan kualitas kepemimpinan bagi *top and middle management*, dan institusionalisasi budaya kerja *functional government*; 2) optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah; 3) peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 4) peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat; 5) pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; 6) percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 7) peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; 8) transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; 9) sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; 10) transparansi layanan perizinan berbasis digital; serta 11) pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;

12) penguatan integritas partai politik; 13) peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional; dan 14) penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai penggerak tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.4
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Penggerak Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif
Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
3. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai penggerak tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	8. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	23. Indeks Reformasi Hukum	91,6	98
		24. Indeks SPBE	3,00	4,00
		25. Indeks Pelayanan Publik	2,80-2,86	4,06-4,15
		26. a) Indeks Survey Penilaian Integritas	78,80	85
		b) Nilai MCP KPK	75	85
		c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 5

5.2.4 Sasaran 4. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah dengan Iklim Investasi yang Kondusif

Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif merupakan cerminan upaya yang dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, proses demokrasi yang transparan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif berfokus pada arah pembangunan ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh, serta stabilitas ekonomi makro daerah, yang diuraikan sebagai berikut.

SS09. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, serta Demokrasi Substansial

Ketaatan hukum serta ketertiban dan keamanan yang tangguh merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah kebijakan transformasi ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh di

Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif; 2) optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial; 3) mendukung penguatan integritas partai politik di daerah; 4) peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi; 5) peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah; serta 6) perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

SS10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas ekonomi makro daerah adalah kondisi perekonomian Kabupaten Wajo dengan keseimbangan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, lapangan kerja yang cukup, serta pengelolaan fiskal dan moneter yang sehat. Arah kebijakan transformasi stabilitas ekonomi makro daerah di Kabupaten Wajo dua puluh tahun mendatang adalah: 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD); 2) penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder; 3) peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis; 4) pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*; serta 5) mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah.

Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.5
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah dengan Iklim Investasi yang Kondusif Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
4. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan	9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh	27. Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (%)	100	100
		28. Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	74,5	86,3

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
iklim investasi yang kondusif		29. a) Persentase perempuan terpilih terhadap total Anggota DPRD (%)	11,00	14,00
		b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD (perda)	5	10
		c) Persentase perempuan pengurus partai politik (%)	37,47	38,00
	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,61
		31. Tingkat Inflasi (%)	2 ±1	2 ±1
		32. Pertumbuhan investasi daerah (%)	100	100
		33. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	100

5.2.5 Sasaran 5. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah Berkebudayaan Maju, dan Menjunjung Kemaslahatan Beragama, serta Sumber Pemenuhan Energi, Air, dan Pangan Berkelanjutan.

Perwujudan Kabupaten Wajo sebagai daerah berkebudayaan maju, dan menjunjung kemaslahatan beragama, serta sumber pemenuhan energi, air, dan pangan berkelanjutan merupakan cerminan kondisi masyarakat Kabupaten Wajo yang menjalin hubungan harmonis dan kokoh antar individu dan kelompok, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan sosial secatra efektif. Perwujudan sasaran kelima ini juga mencakup keberhasilan dalam menjaga budaya dan nilai-nilai tradisional yang memperkuat identitas daerah, serta mampu mengembangkan praktik yang berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran ini, arah pembangunan berfokus pada beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, serta berketahanan energi, air, dan pangan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

SS11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menunjukkan integrasi antara nilai-nilai agama yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan kebudayaan yang progresif yang keduanya berperan penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Arah kebijakan transformasi beragama maslahat dan berkebudayaan maju di

Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial; 2) pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya; 3) pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi; 4) peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat; 5) penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan; 6) pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal; 7) peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya; 8) penguatan kerukunan antar umat beragama; 9) penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual masyarakat sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika; 10) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dan 11) penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama.

SS12. Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan pilar penting yang saling berkaitan dalam membangun kehidupan sosial yang adil, sejahtera dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan sebuah tatanan lingkungan dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat, meraih potensi sepenuhnya, serta dapat mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan yang lebih besar. Arah kebijakan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2) pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; 3) pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah; 4) pemenuhan hak dan

perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 5) pelebagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan; 6) pengintegrasian kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di seluruh sektor pembangunan; 7) pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif; 8) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 9) peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah regional, nasional dan internasional; 10) penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi; serta 11) peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.

SS13. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Kabupaten Wajo yang berketahanan energi, air, dan pangan merupakan gambaran daerah yang memiliki kemampuan kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal berupa energi, air, dan pangan secara berkelanjutan, aman, dan merata. Arah kebijakan transformasi berketahanan energi, air dan pangan di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu *Food Energy Water (FEW) Nexus*; 2) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 3) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 4) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 5) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; 6) peningkatan kapasitas energi Listrik yang bersumber

dari energi baru dan terbarukan; 7) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; 8) penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain; 9) pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air; 10) penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan perdesaan; 11) persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah; 12) pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang; 13) penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah atau terkena dampak bencana; 14) penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas; 15) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting; 16) optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman; 17) pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat; 18) penguatan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal; dan 19) pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.

Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah berkebudayaan maju, dan menjunjung kemaslahatan beragama, serta sumber pemenuhan energi, air, dan pangan berkelanjutan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5. 6
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah Berkebudayaan Maju, dan Menjunjung Kemaslahatan Beragama, serta Sumber Pemenuhan Energi, Air, dan Pangan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
5. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah berkebudayaan maju, dan	11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	21	80

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
menjunjung kemaslahatan beragama, serta sumber pemenuhan energi, air, dan pangan berkelanjutan	12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	35. Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah (%)	100	100
		36. a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67,34-67,35	72,33-72,42
		b) Indeks Perlindungan Anak	58,20-59,31	71,83-81,83
	13. Berketahanan Energi, Air, dan Pangan	37. Indeks Ketimpangan Gender	0,457-0,453	0,258-0,217
		38. Ketahanan energi, air dan pangan:		
		a) Ketahanan energi:		
		i) Konsumsi listrik per kapita (KwH)	350	505
		b) Ketahanan pangan:		
		i) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,50	5,20
		ii) Indeks Ketahanan Pangan	84,45	87.00
		iii) Skor Pola Ketahanan Pangan	85,9	100
		c) Ketahanan air:		
		i) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,58	1,17
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	70	100

5.2.6 Sasaran 6. Terwujudnya Kota Sengkang sebagai Pusat Pertumbuhan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Perdesaan

Perwujudan sasaran keenam ini merupakan kondisi dimana Kota Sengkang berperan penting dalam menghubungkan kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan. Kota Sengkang tidak hanya sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan dan mendorong interaksi harmonis antara perkotaan dan perdesaan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan, maka arah pembangunan berfokus pada perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

SS14. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa keduanya berkontribusi secara signifikan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Wajo sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Arah kebijakan transformasi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital; 2) pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara); 3) peningkatan konektivitas antara perdesaan dan perkotaan; 4) pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis antara perdesaan dan perkotaan; 5) penerapan transportasi ramah lingkungan *electric vehicle* (EV); 6) pengembangan transportasi di perdesaan dan perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang; 7) pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan dan perkotaan; 8) penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; 9) penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan, perdesaan, dan sekitar wilayah pertumbuhan; 10) penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan; serta 11) penguatan BUMD dan BUMDes.

Terwujudnya Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.7

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya

Kota Sengkang sebagai Pusat Pertumbuhan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Perdesaan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
6. Terwujudnya Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan	14. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan:		
		a) Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi (%)	3,76	4,01
		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98,19	100
		c) Indeks Layanan Infrastruktur	80,00	90,00
		d) Persentase Desa Mandiri (%)	8,45	35,21

5.2.7 Sasaran 7. Terwujudnya Kabupaten Wajo yang Ramah Lingkungan, Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim, yang didukung Sarana Prasarana Berkualitas

Perwujudan Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan dan memiliki ketangguhan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim merupakan cerminan kondisi daerah yang mampu meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi, serta melakukan pengelolaan risiko secara proaktif, dengan didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas. Arah pembangunan untuk mewujudkan sasaran pokok ini berfokus pada lingkungan hidup berkualitas dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, yang dijelaskan sebagai berikut.

SS15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi dimana lingkungan alam dan sosial mendukung kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Lingkungan hidup bukan hanya mengenai kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. Arah kebijakan transformasi lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah; 1) perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya lokal; 2) perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana; 3) peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; 4) penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi

tata ruang daerah; 5) mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan; 6) pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal; 7) penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan; 8) perencanaan dan percepatan upaya penuntasan RDTR; 9) penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan; 10) peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; 11) penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; 12) eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; 13) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 14) penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan; 15) penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler; dan 16) pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif.

SS16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk tidak hanya bertahan hidup saat terjadi bencana atau perubahan iklim, tetapi juga untuk pulih dengan cepat, mengurangi kerentanan terhadap dampak masa depan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah mengalami krisis tersebut. Secara keseluruhan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim bukan hanya tentang respons terhadap krisis saat terjadi, tetapi juga tentang upaya preventif, adaptasi jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan lingkungan di masa depan.

Arah kebijakan transformasi resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan

terhadap bencana; 2) pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; 3) pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir seperti penguatan tanggul alami di sungai; 4) pengembangan *flood forecasting warning system*; 5) pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim; 6) peningkatan kapasitas sdm petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim; 7) pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim; 8) pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian; 9) peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 10) penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim; 11) pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana; 12) penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon; 13) peningkatan rehabilitasi hutan/ lahan; 14) penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian; 15) penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah; 16) dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*) dan pembiayaan alternatif lainnya; 17) penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi; dan 18) pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.

Terwujudnya Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan, tangguh bencana dan perubahan iklim, yang didukung sarana prasarana berkualitas tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.8
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo yang Ramah Lingkungan, Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim, yang didukung Sarana Prasarana Berkualitas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
7. Terwujudnya Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan, tangguh bencana dan perubahan iklim, yang didukung sarana prasarana berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40. Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati:		
		a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia (%)	3,02	8,25
		Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati:		
		b) Indeks pertanaman (IP) padi (kali)	2	3
		c) Proporsi sawah irigasi (%)	31,42	34,56
		d) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	524.208	559.204
		e) Angka Konsumsi Ikan (%)	71,40	71,48
		41. Kualitas lingkungan hidup:		
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,14	75,37
		b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,00	59,84
	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	c) Pengelolaan sampah:		
		i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	83,94	90
		ii) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	80	100
		42. Indeks Risiko Bencana	154,8	136,86
		43. Penurunan Emisi GRK Tahunan	0.95	32.52

5.2.8 Sasaran 8. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah dengan Daya Saing Tinggi

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan daya saing tinggi, maka arah pembangunan berfokus pada ketangguhan diplomasi daerah dan daya saing daerah tinggi, yang diuraikan sebagai berikut.

SS17. Ketangguhan Diplomasi Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi

Ketangguhan diplomasi daerah dan daya saing daerah tinggi merupakan kondisi yang saling berkaitan dan berperan penting untuk mencapai

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Arah kebijakan transformasi ketangguhan diplomasi daerah dan daya saing daerah tinggi di Kabupaten Wajo dua puluh tahun kedepan adalah: 1) penataaan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah; 2) peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global; dan 3) penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.

Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan daya saing tinggi tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut.

Tabel 5.9
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai Daerah dengan Daya Saing Tinggi Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	Baseline 2025	Target 2045
8. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan	17. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	44. Jumlah Kerja Sama Daerah (MoU)	30	45
		45. Indeks Daya Saing Daerah	3,15	3,7

Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan serta arah kebijakan transformasi dan indikator utamanya serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2045, secara lengkap disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi, dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Wajo
Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045
1. Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera	1. Kesehatan untuk semua	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 2. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis; 3. Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor; 4. Percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor; 5. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen; 6. Peningkatan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>); 7. Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal; 8. Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim; 9. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat; dan 10. Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,85	79,25
			2.	Kesehatan ibu dan anak:		
				a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	99,45	100
				b) Jumlah kematian ibu (kasus)	6	3
				c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	3,80	0,70
			3.	Penanganan Tuberkulosis:		
				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85	95
				b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90
			4.	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 2. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara; 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi komoditas unggulan wilayah dan kebutuhan lapangan usaha; 5. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk ekosistem pariwisata; dan 6. Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan <i>internet of things</i> .	5. a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i) Literasi Membaca (%)	64,00	87,80
			ii) Numerasi (%)	56,00	79,73
			b) Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,71-7,74	10,35-10,38
			c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,39-13,40	14,19-14,23
			6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	12.02	12.74-12.97
			7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	14.25	27.65
	3. Perlindungan sosial yang adaptif	1. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran; 2. Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial; 3. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh	8. a) Tingkat Kemiskinan (%)	6,40	0,52
			b) Indeks Gini	0,358	0,318
			9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	5	7
			10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	22,65	22,70

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045
		<p>masyarakat terutama di perdesaan antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas;</p> <p>4. Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsif bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya;</p> <p>5. Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas;</p> <p>6. Integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim; dan</p> <p>7. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah, melalui kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar kehandalan bangunan.</p>				
2. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi tinggi	<p>1. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;</p> <p>2. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan</p>	11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4	6
			12.	Pengembangan pariwisata:		
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,42	0,57

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
		budidaya, perikanan tangkap, dan wisata bahari); 3. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (<i>eco-tourism</i>); 4. Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan; 5. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 6. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; 7. Peningkatan produktivitas BUMD; 8. Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri; 9. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif; serta 10. Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	372.500	806.200
			13. Jumlah industri ekonomi kreatif (industri)	11	17
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:		
			a) Jumlah industri kecil dan menengah (industri)	780	1050
			b) Persentase koperasi sehat (%)	6,43%	8,87%
			c) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	47,10	63,88
			d) Produktifitas padi (Ku/Ha)	52,00	60,00
			e) Jumlah produksi perikanan (ton)	568.425,17	614.450,69
			15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,98-2,04	1,20-1,14
			16. a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,57	54,38
			b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,50	72,07
			17. Tingkat penguasaan iptek:		
			a) Indeks Kapabilitas Inovasi	2,40	3,80
			18. Penerapan ekonomi hijau dan biru:		
			a) Indeks Ekonomi Hijau	23,07	42,09
	5. Penerapan ekonomi hijau dan biru	1. Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan dan perairan berbasis keunggulan wilayah; 2. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045
		<ul style="list-style-type: none">3. Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan;4. Peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan laut;5. Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif;6. Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan;7. Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman lokal;8. Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam; serta9. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.				
	6. Transformasi digital	<ul style="list-style-type: none">1. Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik <i>blank spot</i> sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan;2. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;3. Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru di kawasan strategis; serta4. Peningkatan literasi digital terpadu dan kemampuan SDM digital (<i>digital skill</i>) melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan	19.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	45	85

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045
		tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan keterampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.				
	7. Integrasi ekonomi domestik dan global	1. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi; 2. Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya; 3. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (<i>global supply chain</i>); 4. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; serta 5. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.	20.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	8,64	5,22
			21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,85	37,06
			22.	Net Ekspor Barang dan Jasa (ribu rupiah)	-1,14	1,50
3. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai penggerak tata kelola pemerintahan yang	8. Tata kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif	1. Penguatan organisasi pemerintah berbasis <i>functional government</i> , peningkatan kualitas kepemimpinan bagi <i>top and middle management</i> , dan institusionalisasi budaya kerja <i>functional government</i> ; 2. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah;	23.	Indeks Reformasi Hukum	91,6	98
			24.	Indeks SPBE	3,00	4,00
			25.	Indeks Pelayanan Publik	2,80-2,86	4,06-4,15
			26.	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	78,80	85
				b) Nilai MCP KPK	75	85

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
berintegritas, adaptif dan inovatif		3. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 4. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat; 5. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah; 6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 7. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; 8. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; 9. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; 10. Transparansi layanan perizinan berbasis digital; 11. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; 12. Penguatan integritas partai politik; 13. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional; dan 14. Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 5
4. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah	9. Ketaatan hukum, ketertiban dan	1. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum,	27. Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (%)	100	100
			28. Persentase tindak kriminal	74,5	86,3

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
dengan iklim investasi yang kondusif	keamanan tangguh	masyarakat yang partisipatif; 2. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial; 3. Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah; 4. Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi; 5. Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah; serta 6. Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.	yang ditangani (%)		
			29. a) Persentase perempuan terhadap total anggota DPRD (%)	11	14
			b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD (perda)	5	10
			c) Persentase perempuan pengurus partai politik (%)	37,47	38,00
	10. Stabilitas ekonomi makro daerah	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD); 2. Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder; 3. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis; 4. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> ; serta 5. Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah	30. Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,61
			31. Tingkat inflasi (%)	2 ±1	2 ±1
			32. Pertumbuhan investasi daerah (%)	100	100
			33. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	100
5. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah	11. Beragama maslahat dan berkebudayaan	1. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan	34. Persentase benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs cagar budaya yang telah	21	80

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045	
berkebudayaan maju, dan menjunjung kemaslahatan beragama, serta sumber pemenuhan energi, air, dan pangan berkelanjutan	maju	karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial; 2. Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya; 3. Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi; 4. Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat; 5. Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan; 6. Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal; 7. Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya; 8. Penguatan kerukunan antar umat beragama; 9. Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual masyarakat sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika; 10. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dan 11. Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama.		ditetapkan terhadap total registrasi			
			35.	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah (%)	100	100	
	12. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	1. Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang	36.	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67,34-67,35	72,33-72,42	
				b) Indeks Perlindungan Anak	58,20-59,31	71,83-81,83	
			37.	Indeks Ketimpangan Gender	0,457-0,453	0,258-0,217	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
		<p>disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain;</p> <p>3. Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah;</p> <p>4. Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;</p> <p>5. Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan;</p> <p>6. Pengintegrasian kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di seluruh sektor pembangunan;</p> <p>7. Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif;</p> <p>8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan</p>			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
		kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 9. Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah regional, nasional dan internasional; 10. Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi; serta 11. Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.			
	13. Berketahanan energi, air dan pangan	1. Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu <i>Food Energy Water (FEW) Nexus</i> ; 2. Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 3. Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 4. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 5. Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; 6. Peningkatan kapasitas energi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan; 7. Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; 8. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan	38. Ketahanan energi, air dan pangan: a) Ketahanan energi: i) Konsumsi listrik per kapita (kWh) b) Ketahanan pangan: i) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%) ii) Indeks Ketahanan Pangan iii) Skor Pola Pangan Harapan c) Ketahanan air: i) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik) ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	350 6,50 84,45 85,9 0,58 70	505 5,20 85,00 100 1,17 100

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
		<p>yang lain;</p> <p>9. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air;</p> <p>10. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan;</p> <p>11. Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman;</p> <p>12. Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang;</p> <p>13. Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah atau terkena dampak bencana;</p> <p>14. Penerapan teknologi <i>climate smart agriculture</i> melalui penyediaan bibit berkualitas;</p> <p>15. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting;</p> <p>16. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman;</p> <p>17. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;</p> <p>18. Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal; dan</p> <p>19. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p>			
6. Terwujudnya Kota Sengkang sebagai pusat	14. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat	1. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital;	39.	Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan:	
			a) Kontribusi PDRB terhadap provinsi (%)	3,76	4,01

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan	pertumbuhan ekonomi	2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara); 3. Peningkatan konektivitas antara perdesaan dan perkotaan; 4. Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis antara perdesaan dan perkotaan; 5. Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>electric vehicle</i> ; 6. Pengembangan transportasi di perdesaan dan perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang; 7. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan dan perkotaan; 8. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; 9. Penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan, perdesaan, dan sekitar wilayah pertumbuhan; 10. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan; serta 11. Penguatan BUMD dan BUMDes.	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98,19	100
			c) Indeks Layanan Infrastruktur	80,00	90,00
			d) Persentase desa mandiri (%)	8,45	35,21
7. Terwujudnya Kabupaten Wajo yang ramah	15. Lingkungan hidup berkualitas	1. Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik,	40. Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati		
			a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik	3,02	8,25

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
lingkungan, tangguh bencana dan perubahan iklim, yang didukung sarana prasarana berkualitas		dengan mempertimbangkan budaya lokal; 2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana; 3. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; 4. Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah; 5. Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan; 6. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal; 7. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan; 8. Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan RDTR; 9. Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan; 10. Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; 11. Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; 12. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana	terhadap pupuk kimia (%)		
			Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati		
			b) Indeks pertanaman (IP) padi (kali)	2	3
			c) Proporsi sawah irigasi (%)	31,42	34,56
			d) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	524208	559204
			e) Angka Konsumsi Ikan (%)	71,40	71,48
			41. Kualitas lingkungan hidup		
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,14	75,37
			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7	59,84
			c) Pengelolaan sampah		
			i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	83,94	90
			ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	80	100

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045
		rantai layanan sanitasi yang aman; 13. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 14. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan; 15. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler; dan 16. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif.				
	16. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana; 2. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; 3. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir seperti penguatan tanggul alami di sungai; 4. Pengembangan <i>Flood Forecasting Warning System</i> ; 5. Pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim; 6. Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim; 7. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai	42.	Indeks Risiko Bencana	154,8	136,86
			43.	Penurunan Emisi GRK Tahunan	0,95	32,52

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target 2025	Target 2045
		<p>resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim;</p> <p>8. Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian;</p> <p>9. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;</p> <p>10. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim;</p> <p>11. Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana;</p> <p>12. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon;</p> <p>13. Peningkatan rehabilitasi hutan/lahan;</p> <p>14. Penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian;</p> <p>15. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah;</p> <p>16. Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (<i>green financing</i>) dan pembiayaan alternatif lainnya;</p> <p>17. Penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi; dan</p> <p>18. Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.</p>			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan		Target 2025	Target 2045
8. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan daya saing tinggi	17. Ketangguhan diplomasi daerah dan daya saing daerah tinggi	1. Penataaan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah; 2. Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global; dan 3. Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.	44.	Jumlah Kerja Sama Daerah	30	45
			45.	Indeks Daya Saing Daerah	3,15	3,70

Selanjutnya, untuk mengarahkan pencapaian target indikator pembangunan jangka menengah daerah, maka ditetapkan target capaian indikator utama pembangunan pada setiap periode lima tahun hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 sebagai berikut.

Tabel 5.11
Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan berdasarkan Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
1. Terwujudnya Kabupaten Wajo dengan manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera	1. Kesehatan untuk semua	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,85	74,75	76,25	77,75	79,25
		2.	Kesehatan ibu dan anak:					
			a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	99,45	99,65	99,85	100	100
			b) Jumlah kematian ibu (kasus)	6	6	5	4	3
			c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	3,80	3,70	2,70	1,70	0,70
		3.	Penanganan Tuberkulosis:					
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85	90	90	92	95
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90	90	90	90
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	4.	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98	98	98	98
		5.	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Literasi Membaca (%)	64,00	63,80 - 69,80	71,30 - 77,30	78,80 - 84,80	85,30 - 87,80

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
			ii) Numerasi (%)	56,00	55,73 - 61,73	63,23 - 69,23	70,73 - 76,73	77,23 - 79,73
			b) Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,71-7,74	8,24-8,27	8,90-8,93	9,56-9,59	10,35-10,38
			c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,39-13,40	13,55-13,57	13,75-13,78	13,95-13,99	14,19-14,23
		6.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	12.02	12.05-12.28	12.28-12.51	12.51-12.74	12.74-12.97
		7.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	14.25	17.6	20.95	24.3	27.65
	3. Perlindungan sosial yang adaptif	8.	a) Tingkat Kemiskinan (%)	6,40	5,20	3,90	2,20	0,52
			b) Indeks Gini	0,358	0,348	0,338	0,328	0,318
		9.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	5	7	8	8	8
		10.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	22,65	22,75	22,80	22,90	22,95
	2. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah pusat perniagaan	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4	4,5	5	5,5	6
			12. Pengembangan pariwisata:					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	372.500	478.900	584.650	685.400	806.200

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
		13. Jumlah industri ekonomi kreatif (industri)	11	13	15	16	17
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:					
		a) Jumlah industri kecil dan menengah (industri)	780	850	905	980	1050
		b) Persentase koperasi sehat (%)	6,43%	7,10	7,76	8,43	8,87
		c) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	47,10	48,76	53,76	58,76	63,88
		d) Produktifitas padi (ton)	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
		e) Jumlah produksi perikanan (ton)	568425,17	585864,79	596352,61	604501,05	61445,69
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,98-2,04	1,90-1,80	1,80-1,74	1,50-1,44	1,20-1,14
		16. a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,57	45,57	48,51	51,44	54,38
		b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,50	65,50	67,69	69,88	72,07
		17. Tingkat penguasaan iptek:					
		a) Indeks Kapabilitas Inovasi					
	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18. Penerapan ekonomi hijau dan biru:					
		a) Indeks Ekonomi Hijau	23,07	23,07	27,83	32,58	37,34
	6. Transformasi Digital	19. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	45	45-55	55-65	65-75	75-85
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	8,64	7,96	7,1	6,25	5,22
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,85	32,07	34,29	35,51	37,06

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
		22.	Net Ekspor Barang dan Jasa (ribu rupiah)	-1,14	-0,79	1,05	1,25	1,50
3. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai penggerak tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	8. Tata Kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif	23.	Indeks Reformasi Hukum	91,6	92	94	96	98
		24.	Indeks SPBE	3,00	3,00-3,25	3,26-3,50	3,51-3,75	3,76-4,00
		25.	Indeks Pelayanan Publik	2,80-2,86	3,05-3,11	3,37-3,40	3,68-3,75	4,06-4,15
		26.	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	78,80	78,80	79,6	80,00	85,00
			b) Nilai MCP KPK	75	75	78	80	85
			c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5
4. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif	9. Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh	27.	Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100
		28.	Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	74,5	78,2	80,4	83,8	86,3
		29.	a) Persentase perempuan terhadap total anggota DPRD (%)	11	11	12	13	14
			b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD (perda)	5	5	7	7	10
			c) Persentase perempuan pengurus partai politik (%)	37,47	37,47	37,70	37,80	38,00
	10. Stabilitas ekonomi makro daerah	30.	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,24	0,30	0,39	0,49	0,61
		31.	Tingkat inflasi (%)	2 ±1	2 ±1	2 ±1	2 ±1	2 ±1
		32.	Pertumbuhan investasi daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%
		33.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	97	98	99	100
	11. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	34.	Persentase benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total	21	21	30	80	80
5. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah berkebudayaan								

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
maju, dan menjunjung kemaslahatan beragama, serta sumber pemenuhan energi, air, dan pangan berkelanjutan	12. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif		registrasi					
		35.	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
		36.	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67,34-67,35	68,34-68,36	69,59-69,63	70,83-73,90	72,33-72,42
	13. Berketahanan energi, air dan pangan		b) Indeks Perlindungan Anak	58,20-59,31	60,63-63,33	63,93-68,43	69,33-71.53	71,83-81,83
		37.	Indeks Ketimpangan Gender	0,457-0,453	0,410-0,400	0,364-0,334	0,304-0,272	0,258-0,217
		38.	Ketahanan energi, air dan pangan:					
			a) Ketahanan energi:					
			i) Konsumsi listrik per kapita (kWh)	350	380	420	460	505
			b) Ketahanan pangan:					
			i) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,50	6,10	6,05	5,70	5,20
			ii) Indeks Ketahanan Pangan	84,45	85,36	85,55	86,70	87.00
			iii) Skor Pola Pangan Harapan	85,9	87,8	90.00	96,2	100
			c) Ketahanan air:					
			i) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,58	0,82	0,93	1,05	1,17
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)	70	100	100	100	100
6. Terwujudnya	14. Perkotaan dan	39.	Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan:					

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
Kota Sengkang sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan	perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		a) Kontribusi PDRB terhadap provinsi (%)	3,76	3,87	3,96	4,01	4,01
			b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98,11	98,19	100	100	100
			c) Indeks Layanan Infrastruktur	80,00	83,00	85,00	88,00	90
			d) Persentase desa mandiri (%)	31,42	34,56	31,50	32,29	33,10
7. Terwujudnya Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan, tangguh bencana dan perubahan iklim, yang didukung sarana prasarana berkualitas	15. Lingkungan hidup berkualitas	40.	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati					
			a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia (%)	3,02	5,54	6,90	7,40	8,25
			Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati					
			a) Indeks pertanaman (IP) padi (kali)	2	2	2	3	3
			b) Proporsi sawah irigasi (%)	31,42	31,50	32,29	33,10	34,56
			c) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	524208	536098	544060	550888	559204
			d) Angka Konsumsi Ikan (%)	71,40	71,42	71,44	71,46	71,48
		41.	Kualitas lingkungan hidup					
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,14	71,99	73,04	74,10	75,37
			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7	7	10	27,8	59,84
			c) Pengelolaan sampah					
			i) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	83,94	85	88	90	90
			ii) Proporsi Rumah Tangga	80	90	95	100	100

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
			(RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)					
	16. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	42.	Indeks Risiko Bencana	154,8	151,93	146,91	141,89	136,86
		43.	Penurunan Emisi GRK Tahunan					
			a) Kumulatif	0,21	0,82	2,27	7,16	12,85
			b) Tahunan	0,96	3,80	10,20	32,52	53,45
8. Terwujudnya Kabupaten Wajo sebagai daerah dengan daya saing tinggi	17. Ketangguhan diplomasi daerah dan daya saing daerah tinggi	44.	Jumlah Kerja Sama Daerah (MoU)	30	35	40	45	50
		45.	Indeks Daya Saing Daerah	3,15	3,29	3,42	3,56	3,7

5.3 Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi wilayah berupa dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Secara regional, Kabupaten Wajo, terkait dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo dalam satu kesatuan ekosistem danau yaitu Danau Tempe yang secara administratif wilayahnya berada pada 3 kabupaten, yaitu kabupaten Wajo, kabupaten Sidrap dan kabupaten Soppeng. Kabupaten Wajo merupakan bagian dari Kawasan Pembangunan Watampone yang pembangunannya diarahkan sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yang dinilai memiliki peranan penting untuk bertransformasi sebagai salah satu daerah yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan dalam ekosistem agropolitan.

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan antar kawasan pembangunan di Kabupaten Wajo. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, maka pada setiap kawasan pembangunan, sebagaimana menjadi misi pembangunan jangka panjang nasional, akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi ini diterjemahkan kedalam 8 (delapan) misi pembangunan daerah Kabupaten Wajo.

5.3.1 Arah Kebijakan Wilayah

Pengembangan wilayah kabupaten Wajo sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Watampone yang diarahkan menjadi Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dilakukan dengan pendekatan wilayah rencana struktur ruang wilayah berdasarkan sistem pusat permukiman yang mengacu arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo yang meliputi:

5.3.1.1 Arah Pembangunan PKL

a. Arah pembangunan PKL Sengkang di Kecamatan Tempe, berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Wajo yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu

pengembangan PKL Sengkang di Kecamatan Tempe diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Sengkang sebagai pusat pertumbuhan dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, pertanian perkebunan, kemudian pengembangan pariwisata budaya dan sejarah di kawasan rumah adat Atakkae dan wisata Goa Nippon, pengembangan pariwisata alam wisata Danau Tempe yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan. Selain itu, awasan sempadan Danau Tempe juga merupakan kawasan dengan sudut kepentingan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Ketiga, pengembangan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, Peningkatan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTT Sengkang-Sidrap, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, Gardu Induk Sengkang, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan tersier, Pembangunan bangunan sumber daya air. Peningkatan dan perluasan unit dan jaringan air baku, perluasan dan peningkatan SPAM IKK Tempe, Pembangunan IPA Sengkang, peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM,

peningkatan fungsi badan air, dan kawasan perlindungan setempat. Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan kolektor, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder serta infrastruktur jembatan. Kemudian peningkatan Terminal Tipe C dan Terminal Tipe B Sawerigading, pembangunan terminal barang, pembangunan alur pelayaran kelas II berupa alur dermaga Danau Tempe-Dermaga Sidenreng, pelabuhan sungai dan danau pengumpan berupa Dermaga Danau Tempe. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier, peningkatan fungsi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestic, sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), TPS3R, TPS dan TPA, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir, bangunan pengendali banjir berupa Bendung Gerak Tempe, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap, infrastruktur jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler.

b. Arah pembangunan PKL Siwa di Kecamatan Pitumpanua berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Wajo yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu

pengembangan PKL Siwa di Kecamatan Pitumpanua diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Pitumpanua sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis agrobisnis yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perkebunan rakyat dan perikanan budidaya, dan kawasan strategis pengembangan minapolitan. Kemudian pada kawasan ini juga dikembangkan pariwisata alam yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau berbasis agropolitan. Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, Pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, pembangunan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik yaitu jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTT Sengkang-Siwa, SUTT Palopo-Siwa, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, Gardu Induk Siwa. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan tersier, jaringan pengendalian banjir, pembangunan bangunan sumber daya air, Peningkatan dan perluasan unit dan jaringan air baku, peningkatan dan perluasan SPAM IKK Pitumpanua, peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM, peningkatan fungsi badan air, kawasan ekosistem mangrove, dan

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, serta jembatan. Pembangunan jalan tol, Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C dan Terminal barang. Selain itu, pembangunan Jalur kereta api Bone-Wajo-Palopo-Malili, peningkatan, operasional dan pemeliharaan Pelabuhan penyeberangan kelas I berupa Pelabuhan Siwa dan pelabuhan pengumpan regional berupa Pelabuhan Siwa/Bangsalae. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier, peningkatan fungsi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestic, sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi TPS, serta pembangunan TPA dan TPS dengan sistem 3R yang dikembangkan dengan sistem transfer depo, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan dan jaringan bergerak seluler.

5.3.1.2 Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan

a. Pusat Pelayanan Kawasan Anabanua di Kecamatan Maniangpajo berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Anabanua di Kecamatan Maniangpajo diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Maniangpajo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta hutan produksi. Kemudian pengembangan pariwisata alam di wisata situs Makam Puang Masora dan wisata alam buatan di kawasan Wisata Rumah Adat Maniangajo yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemandirian stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui peningkatan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTT Sengkang-Sidrap, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR. Kemudian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan tersier. Pembangunan bangunan sumber daya air. Peningkatan dan perluasan unit dan jaringan air baku, peningkatan dan perluasan SPAM IKK Maniangpajo, peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM. Peningkatan fungsi badan air, dan kawasan perlindungan setempat. Keenam, perwujudan pembangunan

antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder dan jembatan. Kemudian pembangunan jalan tol, pembangunan Terminal Tipe C, dan jalur kereta api Parepare-Wajo. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier, peningkatan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi TPS3R dan TPS, serta pembangunan TPA dan TPST, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir, bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap, dan jaringan bergerak seluler.

b. Pusat Pelayanan Kawasan Belawa di Kecamatan Belawa berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Belawa di Kecamatan Belawa diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Belawa sebagai pusat pertumbuhan baru

dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kemudian pengembangan kawasan pelestarian budaya dan pendidikan syiar agama Islam melalui pariwisata budaya dan sejarah alam di wisata Mesjid Belawa. Selain itu juga sebagai pengembangan pariwisata alam di kawasan wisata Danau Tempe yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, pengembangan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTT Sengkang-Sidrap, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan tersier. Peningkatan dan perluasan unit dan jaringan air baku, peningkatan dan perluasan SPAM IKK Belawa, peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM. Peningkatan fungsi badan air, dan kawasan perlindungan setempat. Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan kolektor, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, serta jembatan. Kemudian pembangunan Terminal Tipe C, pembangunan alur pelayanan kelas II berupa alur dermaga Danau Tempe-Dermaga Sidenreng.

Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier. Peningkatan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi TPS dan pembangunan TPS3R dan TPA, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler.

c. Pusat Pelayanan Kawasan Doping di Kecamatan Penrang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Doping di Kecamatan Penrang diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Penrang sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan budidaya. Kemudian kawasan ini juga dikembangkan pula sebagai kawasan minapolitan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan

adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Pembangunan bangunan sumber daya air. peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM. Peningkatan fungsi badan air, dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan ekosistem mangrove. Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan kolektor, Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, dan jembatan. Kemudian pembangunan Terminal Tipe C, pembangunan Jalur kereta api Bone-Wajo-Palopo-Malili. Peningkatan, operasional dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal berupa Pelabuhan Doping. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier, peningkatan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi TPS dan pembangunan TPA, TPS3R dan TPTS, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah

tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler.

d. Pusat Pelayanan Kawasan Keera di Kecamatan Keera berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Keera di Kecamatan Keera diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Keera sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan budidaya. Kawasan ini juga merupakan kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industry, kawasan minapolitan dan kawasan pelabuhan khusus LNG Keera. Selain itu, pengembangan pariwisata melalui wisata alam di kawasan wisata air terjun Awo yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan

stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui peningkatan infrastruktur minyak dan gas bumi, pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTT Sengkang-Siwa, SUTT Keera-Incomer 1phi Sengkang - Siwa, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, gardu Induk Keera, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder-tersier, Pembangunan bangunan sumber daya air. Peningkatan dan perluasan SPAM IKK Keera, peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM. Peningkatan fungsi badan air dan kawasan ekosistem mangrove. Selain itu, kawasan ini juga merupakan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya serta kawasan perlindungan setempat. Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, dan jembatan. Kemudian pembangunan Terminal Tipe C, jalan tol dan pembangunan Jalur kereta api Bone-Wajo-Palopo-Malili. Pelabuhan pengumpan lokal berupa pembangunan Pelabuhan Danggae, Terminal khusus, Pelabuhan perikanan berupa pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Cendanae, kawasan ini juga merupakan kawasan pelabuhan khusus LNG Keera. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier, peningkatan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi TPS dan pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), TPA serta TPS3R, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir,

pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler.

e. Pusat Pelayanan Kawasan Paria di Kecamatan Majauleng berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Majauleng di Kecamatan Majauleng diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Majauleng sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Kemudian pengembangan pariwisata wisata alam pada kawasan wisata situs Tosora yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, pengembangan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi

penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTT Sengkang-Siwa, SUTT Sengkang-Sidrap, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, operasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi sekunder, tersier, Pembangunan bangunan sumber daya air, peningkatan dan perluasan unit produksi SPAM, Peningkatan fungsi badan air dan kawasan perlindungan setempat, Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, dan jembatan. Peningkatan Terminal Atapange, pembangunan Jalur kereta api Bone-Wajo-Palopo-Malili. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier, peningkatan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestic. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi TPS dan pembangunan TPST serta TPS3R, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang. Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler.

f. Pusat Pelayanan Kawasan Solo di Kecamatan Bola berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Wajo, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau. Untuk itu pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Solo di Kecamatan Bola diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat Wajo yang unggul, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Solo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan budi daya. Kemudian pengembangan pariwisata wisata alam pada kawasan wisata pantai pasir putih dan wisata permandian telaga biru yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan Kabupaten Wajo sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada pengembangan smart government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mematuhi standar, melalui interaksi harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, perwujudan kenyamanan masyarakat melalui ketaatan hukum, penciptaan pekerjaan yang layak, penciptaan stabilitas, ketentraman dan ketertiban, yang diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah dan kemantapan stabilitas ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan, pajak daerah dan asset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah. Kelima, pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, Pembangunan bangunan sumber daya air. Peningkatan dan perluasan unit dan jaringan air baku, peningkatan dan perluasan SPAM IKK Bola, peningkatan dan perluasan unit

produksi SPAM. Peningkatan fungsi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan ekosistem mangrove. Keenam, perwujudan pembangunan antar wilayah yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan kolektor, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, dan jembatan. Pembangunan erminial Penumpang Tipe C, pembangunan Jalur kereta api Bone-Wajo-Palopo-Malili, peningkatan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Botto. Peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier peningkatan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ketujuh, perwujudan pemenuhan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, peningkatan kapasitas dan optimalisasi TPS, dan pembangunan TPST dan TPS3R, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pengendalian rencana tata ruang, Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Wajo dan perwujudan Kabupaten Wajo yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025–2045 merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025–2045 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2045, serta hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh pemerintah Kabupaten Wajo , terutama dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam pelaksanaan RPJPD perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada

RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.

Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan calon anggota DPRD kabupaten.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan

regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembanguna daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan system insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas.

5. Mekanisme Perubahan RPJPD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

6. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat

umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

7. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini pemerintah Kabupaten Wajo berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

Pj. BUPATI WAJO,
Ttd
ANDI BATARALIFU